KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
(BA. 130)

LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN (UAPA)

Untuk Periode Yang
Berakir Tanggal
31 Desember 2025

AUDITED

Jalan H.R.Rasuna Said Kav.8-9 Gedung Eks. Sentra Mulia,
Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Bagian Anggaran 130
Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Laporan Keuangan
Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
(Selaku UAPA)

Tahun Anggaran 2025
(AUDITED)

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8 – 9, Kuningan
Jakarta Selatan

KATA
PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025 *Audited* mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 08 Mei 2026

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Yusril Ihza Mahendra

DAFTAR
ISI

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	vi
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	vii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	viii
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	3
II. NERACA	4
III. LAPORAN OPERASIONAL	5
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	6
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
A. PENJELASAN UMUM	7
A.1. DASAR HUKUM	7
A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS	9
A.2.1. Profil Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan	9
A.2.2. Logo Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan	9
A.2.3. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan	10
A.2.4. Visi dan Misi	12
A.2.5. Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan	13
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	15
A.4. BASIS AKUNTANSI	16
A.5. DASAR PENGUKURAN	16
A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI	17
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	25
B.1. PENDAPATAN	27
B.2. BELANJA	30
B.2.1. Belanja Pegawai	31
B.2.2. Belanja Barang	36
B.2.3. Belanja Modal	45
B.3 CATATAN PENTING LAINNYA	47
B.3.1. Prioritas Nasional	47
B.3.2. Capaian Output	47
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	52

DAFTAR ISI

C.1. ASET LANCAR 52
C.1.1. Belanja Dibayar Dimuka *(Prepaid)* 52
C.1.2. Persediaan 53
C.2. ASET TETAP 56
C.2.1. Peralatan dan Mesin 57
C.2.2. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 60
C.3. ASET LAINNYA 61
C.2.1. Aset Tak Berwujud 61
C.2.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya 62
C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 63
C.2.1. Utang Kepada Pihak Ketiga 63
C.5. EKUITAS 65
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL 66
D.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 66
D.2. BEBAN PEGAWAI 68
D.3. BEBAN PERSEDIAAN 70
D.4. BEBAN BARANG DAN JASA 72
D.5. BEBAN PEMELIHARAAN 74
D.6. BEBAN PERJALANAN DINAS 76
D.7. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI 77
D.8. KEGIATAN NON OPERASIONAL 78
D.8.1. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 78
D.8.2. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 79
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 81
E.1. EUKITAS AWAL 81
E.2. SURPLUS (DEFISIT) LO 81
E.3. KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS 81
E.4. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS 82
E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/ Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL) 82
E.4.2. Transfer Masuk/Keluar 82
E.5. EKUITAS AKHIR 83
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA 84
F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA 84
F.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN 84



PERNYATAAN
TANGGUNG TELAH DIREVIU

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT KEMENTERIAN KOORDINATOR
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Laman : https://www.kumham-imipas.go.id Pos-el : humas.kumhamimipas@gmail.com

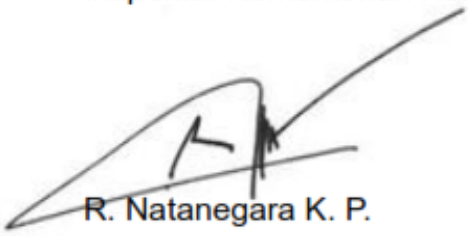
PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah melakukan reviu Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu yang berlaku. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan dimaksud menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan telah disajikan secara akurat dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan dimaksud.

Jakarta, 18 Februari 2026
Inspektur Kementerian Koordinator,



R. Natanegara K. P.



PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB

MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: MKH-UM.01.01-94

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025 (*Audited)* yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan tersebut sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Jakarta, 08 Mei 2026

Menteri Koordinator Bidang Hukum,
Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan
Pemasyarakatan

Yusril Ihza Mahendra

RINGKASAN
LAPORAN KEUANGAN

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan per 31 Desember 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur Pendapatan dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (Netto) sebesar **Rp12.212.279,00** atau mencapai **0,00%** dari estimasi Pendapatan sebesar **Rp0,00.**

Realisasi Belanja Negara (Netto) per 31 Desember 2025 sebesar **Rp171.915.532.601,00** atau mencapai **82.21%** dari alokasi anggaran sebesar **Rp209.124.409.000,00.**

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar **Rp43.710.172.494,00** yang terdiri dari: Aset Lancar (Netto) sebesar **Rp1.368.185.533,00;** Aset Tetap (Netto) sebesar **Rp41.380.774.159,00;** dan Aset Lainnya (Netto) sebesar **Rp961.212.802,00**.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar **Rp947.151.900,00** dan **Rp42.763.020.594,00.**

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp12.212.279,00**, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar **Rp129.572.360.157,00** sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai **Rp129.560.147.878,00.** Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar **Rp207.000,00** dan **Rp0,00** sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar **Rp129.560.354.878,00**.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar **Rp0,00,** ditambah Defisit-LO sebesar **Rp129.560.354.878,00,** ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar **Rp0,00** dan transaksi antar entitas senilai total **Rp172.323.375.472,00,** sehingga Ekuitas entitas per 31 Desember 2025 adalah senilai **Rp42.763.020.594,00.**

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

a.n. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

R. Andika Dwi Prasetya



FACE
LAPORAN
REALISASI ANGGARAN

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Cat.	Tahun 2025				Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas / (Di Bawah)	%	Realisasi
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	**B.1.**					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	0,00	12.212.279,00	12.212.279,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH		**0,00**	**12.212.279,00**	**12.212.279,00**	**0,00**	**0,00**
BELANJA	**B.2.**					
Belanja Operasi						
Belanja Pegawai	B.2.1.	56.582.768.000,00	38.275.757.017,00	(18.307.010.983,00)	67,65	0,00
Belanja Barang	B.2.2.	103.284.229.000,00	86.427.964.778,00	(16.856.264.222,00)	83,68	0,00
Belanja Modal	B.2.3.	49.257.412.000,00	47.211.810.806,00	(2.045.601.194,00)	95,85	0,00
JUMLAH BELANJA		**209.124.409.000,00**	**171.915.532.601,00**	**(37.208.876.399,00)**	**82,21**	**0,00**

a.n. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

R. Andika Dwi Prasetya



FACE
NERACA

II. NERACA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR	**C.1.**		
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	C.1.1.	848.216.607,00	0,00
Persediaan	C.1.2.	519.968.926,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR		**1.368.185.533,00**	**0,00**
ASET TETAP	**C.2.**		0,00
Peralatan dan Mesin	C.2.1.	47.577.329.916,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.2.	(6.196.555.757,00)	0,00
JUMLAH ASET TETAP		**41.380.774.159,00**	**0,00**
ASET LAINNYA	**C.3.**		0,00
Aset Tak Berwujud	C.3.1.	1.011.802.950,00	0,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2.	(50.590.148,00)	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA		**961.212.802,00**	**0,00**
JUMLAH ASET		**43.710.172.494,00**	**0,00**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**C.4.**		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	947.151.900,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		**947.151.900,00**	**0,00**
EKUITAS			0,00
Ekuitas	**C.5.**	42.763.020.594,00	0,00
JUMLAH EKUITAS		**42.763.020.594,00**	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**43.710.172.494,00**	**0,00**

a.n. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

R. Andika Dwi Prasetya



FACE
LAPORAN OPERASIONAL

III. LAPORAN OPERASIONAL

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Cat.	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	**D.1.**	12.212.279,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		**12.212.279,00**	**0,00**
BEBAN			
Beban Pegawai	**D.2.**	38.275.757.017,00	0,00
Beban Persediaan	**D.3.**	647.320.004,00	0,00
Beban Barang dan Jasa	**D.4.**	39.083.825.011,00	0,00
Beban Pemeliharaan	**D.5.**	1.444.405.774,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas	**D.6.**	44.119.289.396,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	**D.7.**	6.001.762.955,00	0,00
JUMLAH BEBAN		**129.572.360.157,00**	**0,00**
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**(129.560.147.878,00)**	**0,00**
KEGIATAN NON OPERASIONAL	**D.8.**		
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**D.8.1**	60.000,00	0,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**D.8.2.**	(267.000,00)	0,00
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		**(207.000,00)**	**0,00**
SURPLUS (DEFISIT) LO		**(129.560.354.878,00)**	

a.n. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

R. Andika Dwi Prasetya



FACE
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	**E.1.**	**0,00**	**0,00**
SURPLUS (DEFISIT) LO	**E.2.**	**129.560.354.878,00**	**0,00**
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	**E.3.**	**0,00**	**0,00**
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	**E.4.**	**172.323.375.472,00**	**0,00**
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS			**0,00**
EKUITAS AKHIR	**E.5.**	**42.763.020.594,00**	**0,00**

a.n. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

R. Andika Dwi Prasetya



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENJELASAN UMUM

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tanggal 21 Oktober 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2024 tanggal 05 November 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
16. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KM.6/2022 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266/KMK.6/2023 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
19. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
20. Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor SES-PR.01.02-73 Tahun 2026 tentang Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
21. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-86/PB/2026 tanggal 6 April 2026 hal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian LKKL Tahun 2025 Audited.

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN

Profil dan Kebijakan Teknis

A.2.1. Profil Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan terbentuk pada tanggal 21 Oktober 2024 berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Adapun dasar hukum lainnya pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tanggal 21 Oktober 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2024 tanggal 05 November 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Menindaklanjuti pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan serta pengaturan organisasi dan tata kerja ditetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Logo Kementerian Koordinator

A.2.2. Logo Kementerian Koordinator

Logo Kementerian Koordinator, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan diluncurkan pada November 2024, yang mewakili makna persatuan, keadilan, serta sinergi antara hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan.

Logo Kementerian Koordinator, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dapat dilihat pada gambar dibaawah ini:

Gambar 1
Logo Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Arti Logo Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sebagai berikut:

1. Bentuk elips hitam: memiliki filosofi sebagai benteng negara Republik Indonesia dari sisi hukum yang tangguh, tegak lurus, siap melindungi dan membela kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia;
2. Lingkaran emas: memiliki filosofi sebagai integritas, dan kontinuitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
3. Warna hitam: melambangkan ketangguhan, kewibawaan dan kehormatan;
4. Warna emas: melambangkan kejayaan bangsa Indonesia;
5. Padi, kapas dan rantai: melambangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai syarat utama negara yang adil adalah yang bisa mencapai kemakmuran untuk rakyatnya secara merata;
6. Timbangan Keadilan Sibi: diambil dari relief Candi Borobudur tentang kisah Raja Sibi yang arif dan bijaksana, hal ini melambangkan bahwa hukum harus ditegakkan secara jujur, adil dan tidak memihak;
7. Garuda Pancasila: merupakan lambang negara Republik Indonesia dengan gambar burung garuda yang gagah dan berani yang mencerminkan nilai luhur bangsa Indonesia.

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

A.2.3. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, diatur sebagai berikut:

1. Kementerian Koordinator berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia;
2. Kementerian Koordinator dipimpin oleh Menteri Koordinator;
3. Dalam memimpin Kementerian Koordinator, Menteri Koordinator dibantu oleh Wakil Menteri Koordinator sesuai dengan penunjukan Presiden;
4. Wakil Menteri Koordinator diangkat dan diberhentikan oleh Presiden;
5. Wakil Menteri Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator;
6. Menteri Koordinator dan Wakil Menteri Koordinator merupakan satu kesatuan unsur pemimpin dalam Kementerian Koordinator.

Dalam pasal 3 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, disebutkan tugas Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan adalah menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan.

Tugas tersebut dilaksanakan untuk memberikan dukungan dan koordinasi pelaksanaan inisiatif kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden secara inklusif dan terintegrasi.

Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan;
b. Perumusan dan penetapan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan;

c. Pengelolaan dan penanganan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan;
d. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator;
e. Pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam sidang kabinet;
f. Penyelesaian permasalahan di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan;
h. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator;
i. Pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator; dan
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Kementerian Koordinator, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan mengoordinasikan/mambawahi:
1. Kementerian Hukum;
2. Kementerian Hak Asasi Manusia;
3. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
4. Instansi lain yang dianggap perlu.

Visi dan Misi

A.2.4. Visi dan Misi

Untuk mewujudkan tujuan, Kementerian Koordinator, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan berkomitmen dengan visi:

> **"Terwujudnya stabilitasi hukum dan perlindungan HAM dalam mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".**

Untuk Mewujudkan visi tersebut, Kementerian Koordinator, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,

Imigrasi, dan Pemasyarakatan melakukan langkah-langkah strategis/misi sebagai berikut:

a. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk menyelaraskan Pembangunan hukum berkualitas dan Implementasi P5 HAM;
b. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di bidang Hukum dan HAM.

Struktur Organisasi

A.2.5. Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, susunan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan terdiri atas:

a. Sekretariat Kementerian Koordinator;
b. Deputi Bidang Koordinasi Hukum;
c. Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia;
d. Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan;
e. Staf Ahli Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga;
f. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Transformasi Digital; dan
g. Staf Ahli Bidang Reformasi Hukum.

Sekretariat Kementerian Koordinator

Sekretariat Kementerian Koordinator dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator, terdiri atas:

1. Biro Umum dan Keuangan:
   - Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan:
     - Sub Bagian Layanan Pengadaan;
     - Sub Bagian Rumah Tangga dan BMN;
   - Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol:
     - Sub Bagian Tata Usaha Menteri dan Wakil Menteri Koordinator;
     - Sub Bagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator;
     - Sub Bagian Protokol;
     - Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Kooridnator.
2. Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama;

3. Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum;
4. Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi;
5. Inspektorat Kementerian Koordinator:
   - Bagian Tata Usaha Inspektorat

Deputi Bidang Koordinasi Hukum

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Hukum, terdiri atas:

1. Sekretariat Deputi Koordinasi Hukum;
2. Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Administrasi Hukum;
3. Asisten Deputi Koordinasi Pemanfaatan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Kekayaan Intelektual;
4. Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum dan Keadilan Restoratif;
5. Asisten Deputi Koordinasi Budaya, Informasi, dan Komunikasi Hukum;
6. Asisten Deputi Koordinsai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Litigasi.

Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia

Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia dipimpina oleh Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia, terdiri atas:

1. Sekretariat Deputi Koordinasi Hak Asasi Manusia;
2. Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan Hak Asasi Manusia;
3. Asisten Deputi Koordinasi Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat;
4. Asisten Deputi Koordinasi Pembangunan dan Kerja Sama Hak Asasi Manusia;
5. Asisten Deputi Koordinasi Pendidikan Hak Asasi Manusia;
6. Asisten Deputi Koordinsai Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan.

Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia

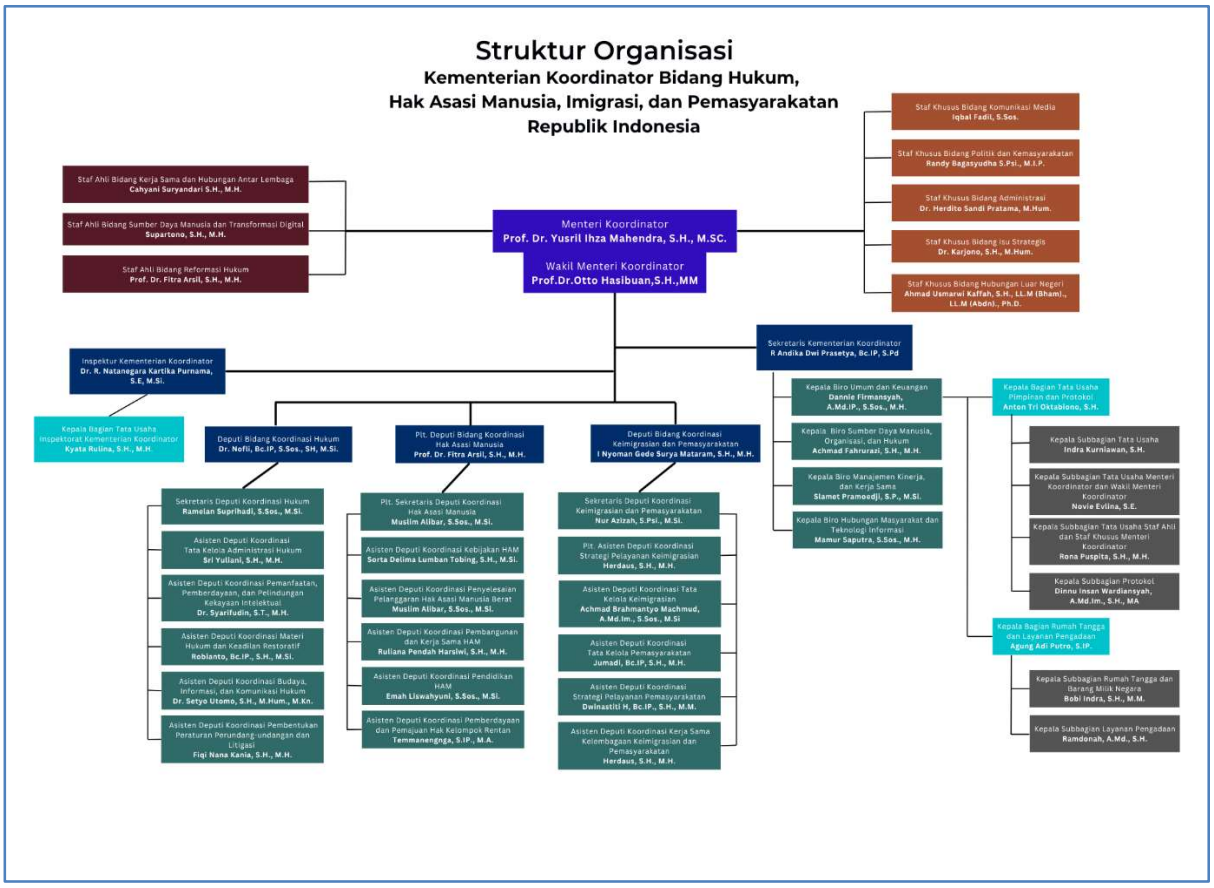
Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia dipimpina oleh Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia, terdiri atas:

1. Sekretariat Deputi Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan;
2. Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian;
3. Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian;
4. Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemasyarakatan;
5. Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Pemasyarakatan;

6. Asisten Deputi Koordinsai Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasyarakatan.

Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2
Struktur Organisasi
Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan



Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Laporan ini dihasilkan melaui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian

Negara/Lembaga.

SAI dilaksanakan melalui aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) yang merupakan sistem terintegrasi yang digunakan oleh satuan kerja (satker) Kementerian/Lembaga untuk mengelola keuangan negara, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban APBN dan menghasilkan Laporan Keuangan Entitas yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. SAKTI berbasis web dan wajib digunakan secara nasional oleh seluruh instansi pemerintah.

Basis Akuntansi

A.4. BASIS AKUNTANSI

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Selaku UAKPA) menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.5. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor SES-PR.01.02-73 Tahun 2026 tentang Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

1. Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

2. Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

3. Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

4. Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Perhitungan Penyisihan Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	**0.5%**
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	**10%**
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	**50%**
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	**100%**
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat disebutkan bahwa pengukuran nilai persediaan disajikan sebesar:
  - Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
  - Harga pokok produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.
  - Dalam mencatat persediaan, pemerintah

menggunakan metode *Perpetual*. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO), di mana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Dengan metode ini saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing.

- Selanjutnya berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3/PB/PB.6/2021 tanggal 22 Januari 2021 hal Penerapan Metode *First In First Out* (FIFO) bahwa mulai tahun 2021 metode penilaian persediaan yang digunakan adalah FIFO.
- Dalam rangka penyajian persediaan di neraca, satuan kerja melaksanakan opname fisik (*stock opname*) persediaan yang dilakukan setiap semester. Berdasarkan hasil opname fisik tersebut, selanjutnya dilakukan penyesuaian data nilai persediaan.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah rupiah);
  - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/ irigasi/ jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain

karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - Tanah;
  - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
  - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap

Pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat aset tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 Tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jauh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
- TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atau suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
Software Komputer	4 Tahun
Franchise	5 Tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10 Tahun
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20 Tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 Tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50 Tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70 Tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah yang disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

6. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Kurs Pelaporan

8. Kurs Pelaporan

Penyajian terhadap transaksi mata uang asing di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan disajikan dalam laporan keuangan dengan menggunakan kurs tengah BI/ kurs penutup penutup 31 Desember 2025 atau sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-21/PB/PB.6/2021 tanggal 20 Juli 2021 Hal: Kebijakan Akuntansi atas Penggunaan Kurs Penutup.



CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN
REALISASI ANGGARAN

Penjelasan atas Pos Laporan Realisasi Anggaran

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran awal sejumlah Rp9.029.527.000,00 yang ditetapkan pada SP DIPA-130.01.1.693734/2025.

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan memperoleh alokasi anggaran biaya tambahan sejumlah Rp200.094.882.000,00 dari SP SABA berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Direktur Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Nomor S-168/AG/AG.5/2025 tanggal 14 April 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan TA 2025.

Sebelum mendapat penambahan anggaran dari SP SABA, anggaran awal sejumlah Rp9.029.527.000,00 telah mengalami beberapa rekonstruksi sebagai berikut:

a. Atas surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara Tahun 2025 telah dilakukan blokir sebesar Rp6.000.000.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp9.029.527.000,00. Pemblokiran tersebut telah ditetapkan revisi DIPA dengan Surat Penetapan Revisi Anggaran No. S-28/AG/AG.5/2025 tanggal 4 Februari 2025;

b. Selanjutnya berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 hal Tindaklanjut Efisiensi Belanja Kementerian/ Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, efisiensi berubah menjadi Rp4.492.707.000,00, (berkurang sebesar Rp1.507.293.000,00 dari semula Rp6.000.000.000,00). Surat Menteri Keuangan tersebut merupakan rekonstruksi efisiensi Instruksi Presiden No. 1/2025. Perubahan blokir tersebut telah ditetapkan revisi DIPA dengan Surat Penetapan Revisi Anggaran No. S-39/AG/AG.5/2025 tanggal 19 Februari 2025.

Sampai tanggal pelaporan, masih terdapat pemblokiran anggaran sebesar Rp4.492.707.000,00 yang merupakan amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4
Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Tahun Anggaran 2025

(dalam satuan rupiah)

URAIAN	31 Desember 2025		
	Anggaran Awal	Anggaran Revisi	Nilai Revisi
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Belanja			
Belanja Pegawai	299.786.000,00	56.582.768.000,00	56.282.982.000,00
Belanja Barang	8.729.741.000,00	103.284.229.000,00	94.554.488.000,00
Belanja Modal	0,00	49.257.412.000,00	49.257.412.000,00
Jumlah Belanja	**9.029.527.000,00**	**209.124.409.000,00**	**200.094.882.000,00**

Revisi Anggaran sejumlah Rp200.094.882.000,00 merupakan Anggaran Biaya Tambahan dari SP SABA berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Direktur Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Nomor S-168/AG/AG.5/2025 tanggal 14 April 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan TA 2025 dalam rangka pemenuhan kebutuhan belanja pegawai, belanja operasional, pemenuhan layanan sarana dan prasarana internal serta pemenuhan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025.

Adapun beberapa rincian revisi anggaran tersebut mengenai hal-hal sebagai berikut:

a. Revisi Anggaran Biaya Tambahan dalam memenuhi kebutuhan belanja pegawai (gaji, tunjangan kinerja, uang makan, lembur) dengan perhitungan estimasi kebutuhan 12 bulan dan estimasi jumlah pegawai 270 orang;
b. Revisi Anggaran Biaya Tambahan dalam rangka pemenuhan belanja operasional keperluan perkantoran sehari-hari (baik yang bersifat persediaan maunpun non persediaan) serta kebutuhan anggaran dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi; serta
c. Revisi Anggaran Biaya Tambahan belanja modal pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana internal.

Adapun rincian revisi anggaran menurut sumber dana/ program/kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5
Revisi Anggaran Menurut Sumber Dana/Program/Kegiatan
Tahun Anggaran 2025

(dalam satuan rupiah)

Kode	Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Revisi	Nilai Revisi
01	**RUPIAH MURNI**			
CL	**Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan**			
7151	Koordinasi Bidang Hukum	2.280.458.000,00	15.430.643.000,00	13.150.185.000,00
7152	Koordinasi Bidang Hak Asasi Manusia	2.123.179.000,00	14.984.439.000,00	12.861.260.000,00
7153	Koordinasi Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan	2.148.587.000,00	15.005.311.000,00	12.856.724.000,00
Jumlah Belanja Program CL		**6.552.224.000,00**	**45.420.393.000,00**	**38.868.169.000,00**
WA	**Program Dukungan Manajemen**			
7150	Dukungan Manajemen Sekretariat Kementerian Koordinator	2.477.303.000,00	163.704.016.000,00	161.226.713.000,00
Jumlah Belanja Program WA		**2.477.303.000,00**	**163.704.016.000,00**	**161.226.713.000,00**
Jumlah Belanja Rupiah Murni		**9.029.527.000,00**	**209.124.409.000,00**	**200.094.882.000,00**
	JUMLAH	**9.029.527.000,00**	**209.124.409.000,00**	**200.094.882.000,00**

Sepanjang Tahun Anggaran 2025, terdapat sepuluh kali revisi pergeseran anggaran (tidak merubah nilai anggaran per program) dalam rangka revisi perubahan rencana kerja dan anggaran serta penyesuaian rencana penarikan dana.

Realisasi Pendapatan (Netto) Rp12.212.279,00

B.1. PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan (*netto*) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp12.212.279,00 atau mencapai 0,0% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,00.

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan bukan kementerian yang berorientasi PNBP atau Kementerian penghasil PNBP dari jasa pelayanan kepada masyarakat.

Perbandingan Realisasi PNBP untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Perbandingan Realisasi PNBP *(Netto)*
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam satuan rupiah)

Kode MAK	Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
4251	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim	1.223.468,00	0,00	1.223.468,00	0,00
4258	Pendapatan Denda	488.811,00	0,00	488.811,00	0,00
4259	Pendapatan Lain-Lain	10.500.000	0,00	10.500.000,00	0,00
Jumlah Pendapatan		**12.212.279,00**	**0,00**	**12.212.279,00**	**0,00**

Berdasarkan Tabel di atas, realisasi PNBP per 31 Desember 2025 dibandingkan dengan per 31 Desember 2024 terdapat kenaikan sebesar Rp12.212.279,00 atau 0,00% karena Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan baru terbentuk di bulan Oktober Tahun 2024 dan tidak ada pendapatan dalam bentuk apapun per 31 Desember 2024.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(dalam satuan rupiah)

Kode MAK	Uraian	31 Desember 2025		
		Estimasi	Realisasi	%
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0,00	1.223.468,00	0,00
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	488.811,00	0,00
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0,00	10.500.000,00	0,00
Jumlah Pendapatan		**0,00**	**12.212.279,00**	**0,00**

Penjelasan atas realisasi pendapatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi sebesar Rp1.223.468,00 merupakan pendapatan yang berasal dari kesalahan atau ketidaksesuaian ADK e-SKPP (Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran) beberapa pegawai yang beralih ke Kementerian Koordinator, dimana

pegawai-pegawai tersebut mempunyai potongan sewa rumah dinas di satker asal, namun data potongan sewa tersebut tidak dihapus saat menerbitkan ADK e-SKPP, sehingga saat ADK tersebut diterima dan diproses pembayaran Gaji di Kementerian Koordinator masih terproses potongan sewa rumah dinas secara otomatis pada SPM Gaji.
Data Pegawai dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8
Rincian Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(dalam satuan rupiah)

No	No. SPM	Uraian	Nilai Potongan Rumah Dinas	Rincian Potongan	Nama Pegawai
1	00023A	Potongan Gaji Susulan Mei 2025	354.620,00	66.282,00	Robiana Suryajatmika
				127.958,00	Muhammad Arifin
				160.380,00	Muslim Nasution
2	00033A	Potongan Gaji Induk Juni 2025	354.620,00	66.282,00	Robiana Suryajatmika
				127.958,00	Muhammad Arifin
				160.380,00	Muslim Nasution
3	00096A	Potongan Gaji Susulan Juni 2025	159.994,00	159.994,00	Muhammad Irfan Mulki
4	00119A	Potongan Gaji Induk Juli 2025	354.234,00	66.282,00	Robiana Suryajatmika
				127.958,00	Muhammad Arifin
				159.994,00	Muhammad Irfan Mulki
			1.223.468,00	**1.223.468,00**	

b. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp488.811,00 merupakan pendapatan denda keterlambatan pengadaan pakaian dinas pegawai Kementerian Koordinator Tahun Anggaran 2025. Denda keterlambatan tersebut diproses melalui pemotongan SPM pembayaran No.02133A tanggal 22 Desember 2025.

c. Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar Rp10.500.000,00 merupakan pendapatan yang berasal dari kesalahan setor masyarakat/pihak ketiga ke Kementerian Koordinator yang sedianya mengajukan layanan ke instansi lain. Terdapat tiga nama masyarakat/pihak ketiga yang melakukan salah setor namun baru satu nama masyarakat yang melaporkan atas kesalahan tersebut (a.n Herlina) dan mengajukan permohonan pengembalian PNBP, sedangkan dua nama masyarakat/pihak ketiga lainnya belum melakukan pelaporan dan pengajuan permohonan pengembalian PNBP.

Rincian pendapatan anggaran lain-lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Rincian Pendapatan Anggaran Lain-lain
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(dalam satuan rupiah)

No	Nama Penyetor	31 Desember 2025			
		Tanggal Setor	NTB	NTPN	Nilai
1	Rachel Luwih Budi	22-04-2025	851294661877	FBFE92G502S8IB6S 820250421243100	4.500.000,00
2	Herlina	06-03-2025	002074643870	857190NA0DK2JFLB 820250306789035	2.000.000,00
3	PT Alia Kreasi Mandiri inter.	06-02-2025	000088073887	D9E0C0NA0DH38FJL 820250206813813	4.000.000,00
Jumlah Pendapatan					**10.500.000,00**

Realisasi Belanja Rp171.915.532.601,00

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp171.915.532.601,00 atau 82,21% dari anggaran belanja sebesar Rp209.124.409.000,00.

Rincian anggaran dan realisasi belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(dalam satuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	56.582.768.000,00	38.321.253.134,00	67,73
Belanja Barang	103.284.229.000,00	86.706.160.664,00	83,95
Belanja Modal	49.257.412.000,00	47.211.810.806,00	95,85
Jumlah *Brutto*	**209.124.409.000,00**	**172.239.224.604,00**	**82,36**
Pengembalian Belanja	**0,00**	**(323.692.003,00)**	
Total Belanja *Netto*	**209.124.409.000,00**	**171.915.532.601,00**	**82,21**

Perbandingan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Belanja
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam satuan rupiah)

Uraian	Realisasi *Netto*		Kenaikan /Penurunan	%
	31 Des 2025	31 Des 2024		
Belanja Pegawai	38.275.757.017,00	0,00	38.275.757.017,00	0,00
Belanja Barang	86.427.964.778,00	0,00	86.427.964.778,00	0,00
Belanja Modal	47.211.810.806,00	0,00	47.211.810.806,00	0,00
Jumlah	**171.915.532.601,00**	**0,00**	**171.915.532.601,00**	**0,00**

Realisasi Belanja per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp171.915.532.601,00 atau sebesar 0,00% dibandingkan periode per 31 Desember 2024, karena di Tahun 2024 Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan belum memilki anggaran sendiri, masih menginduk ke anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Belanja Pegawai Rp38.275.757.017,00

B.2.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp38.275.757.017,00 dan Rp0,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 12
Perbandingan Belanja Pegawai
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam satuan rupiah)

31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / Penurunan	%
38.275.757.017,00	0,00	38.275.757.017,00	0,00

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp38.275.757.017,00 atau sebesar 0,00% dibandingkan periode per 31 Desember 2024 karena di Tahun 2024 Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan belum memilki anggaran sendiri, masih menginduk ke anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Rincian realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Realisasi Belanja Pegawai
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(dalam satuan rupiah)

Kode	Rincian Belanja	Anggaran Revisi	Realisasi *Brutto*	Pengembalian	Realisasi Neto	%
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	12.594.258.000,00	7.359.216.700,00	(8.662.367,00)	7.350.554.333,00	58,36
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	269.000,00	102.405,00	0,00	102.405,00	38,07
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	675.275.000,00	413.819.750,00	0,00	413.819.750,00	61,28
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	165.383.000,00	95.443.470,00	0,00	95.443.470,00	57,71
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	2.157.159.000,00	1.176.360.000,00	0,00	1.176.360.000,00	54,53
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.231.976.000,00	669.837.000,00	0,00	669.837.000,00	54,37
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1.387.981.000,00	135.579.382,00	0,00	135.579.382,00	9,77
511126	Belanja Tunj. Beras	497.801.000,00	309.523.080,00	0,00	309.523.080,00	62,18
511129	Belanja Uang Makan PNS	2.678.792.000,00	1.089.512.000,00	(209.550,00)	1.089.302.450,00	40,66
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	165.934.000,00	99.970.000,00	(1.035.000,00)	98.935.000,00	59,62
511512	Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	1.020.000.000,00	333.000.780,00	0,00	333.000.780,00	32,65

511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	93.355.000,00	47.095.400,00	0,00	47.095.400,00	50,45
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	130.000,00	64,00	0,00	64,00	0,05
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	6.500.000,00	4.709.540,00	0,00	4.709.540,00	72,45
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	2.500.000,00	1.883.816,00	0,00	1.883.816,00	75,35
511623	Belanja Tunjangan Struktural PPPK	56.875.000,00	48.125.000,00	0,00	48.125.000,00	84,62
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.860.000,00	3.186.480,00	0,00	3.186.480,00	82,55
511628	Belanja Uang Makan PPPK	16.500.000,00	5.822.000,00	0,00	5.822.000,00	35,28
512211	Belanja Uang Lembur	5.603.040.000,00	2.529.560.000,00	0,00	2.529.560.000,00	45,15
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan/Kinerja)	27.866.180.000,00	23.695.153.767,00	(35.589.200,00)	23.659.564.567,00	84,90
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/ Kinerja PPPK	359.000.000,00	303.352.500,00	0,00	303.352.500,00	84,50
Jumlah		**56.582.768.000,00**	**38.321.253.134,00**	**(45.496.117,00)**	**38.275.757.017,00**	**67,65**

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat realisasi belanja pegawai *netto* sebesar Rp38.275.757.017,00 atau sebesar 67,65% dari pagu anggaran sebesar Rp56.582.768.000,00.

Rendahnya persentase realisasi belanja pegawai disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengajuan Anggaran Biaya Tambahan pada bulan Februari 2025 memperhitungkan estimasi kebutuhan anggaran untuk 12 bulan, yaitu bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2025 ditambah dengan Gaji dan Tunjangan Kinerja ke-13 serta Gaji dan Tunjangan Kinerja ke-14, namun Anggaran Biaya Tambahan baru disetujui pada akhir bulan April 2025, dan baru efektif mulai pembayaran belanja pegawai per bulan Mei 2025, sehingga alokasi anggaran bulan Maret dan April 2025 tidak terealisasi.
2. Perhitungan estimasi kebutuhan anggaran belanja pegawai adalah dengan memperhitungkan estimasi pegawai sebanyak 270 orang, sedangkan sampai dengan periode per 31

Desember 2025, jumlah pegawai Kementerian Koordinator sebanyak 252 orang, yang terdiri dari:
- Pegawai PNS sebanyak 244 orang;
- Pegawai PPNPN sebanyak 1 orang (Wakil Menteri Koordinator);
- Pegawai PPPK sebanyak 1 orang (Staf Ahli Non PNS);
- Pegawai Non PNS 6 orang.

3. Proses peralihan pegawai masuk ke Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan tidak dalam satu waktu/bertahap, sehingga pada beberapa bulan awal sejak bulan Mei, realisasi belanja pegawai masih sangat rendah karena jumlah pegawai yang rendah.
   Pegawai PNS Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan merupakan peralihan pegawai dari:
   - Kementerian Hukum;
   - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
   - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
   - Kementerian Pertahanan;
   - Kejaksaan Agung;
   - BRIN;
   - BP Batam;
   - Universitas Indonesia.
4. Proses peralihan pegawai ke Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan tidak disertai dengan penerbitan e-SKPP (Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran) dari satker asal pegawai, sehingga banyak pegawai yang sudah peralihan ke Kementerian Koordinator namun hak keuangannya (gaji dan tunjangan kinerja) masih dibayarkan di satker asal, sehingga makin mempengaruhi rendahnya realisasi belanja pegawai.

Berdasarkan tabel di atas juga, dapat dilihat realisasi pengembalian belanja pegawai sebesar Rp45.496.117,00. Penjelasan atas pengembalian belanja pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Rincian Pengembalian Belanja Pegawai
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(dalam satuan rupiah)

Akun	Rincian Belanja	Pengembalian
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	(8.662.367,00)
511129	Belanja Uang Makan PNS	(209.550,00)
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	(1.035.000,00)
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan/Kinerja)	(35.589.200,00)
Jumlah		**(45.496.117,00)**

Penjelasan atas tabel di atas adalah sebagai berikut:

- Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS sebesar Rp8.662.367,00 adalah pengembalian yang terjadi secara otomatis oleh Aplikasi Gaji saat memperhitungkan pengajuan SPM pembayaran kekurangan Gaji Pegawai, akibat dari Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat dan lain-lain.
- Pengembalian Belanja Uang Makan PNS sebesar Rp209.550,00 adalah pengembalian atas kelebihan pembayaran uang makan pegawai yang berstatus Dinas Luar. Merupakan hasil temuan sampling Inspektorat atas dokumen pertanggung jawaban pembayaran uang makan pegawai.
- Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS sebesar Rp1.035.000,00 merupakan pengembalian atas pembayaran mundur pegawai yang beralih/diangkat menjadi Pegawai Fungsional, sehingga Tunjangan Umum PNS yang sebelumnya sudah terbayar dikembalikan dan berubah menjadi Tunjangan Fungsional PNS.
- Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan/Kinerja) sebesar Rp35.589.200,00 merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran/double bayar tunjangan kinerja pegawai berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dengan Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

  Kelebihan pembayaran/double bayar ini terjadi karena kesalahan satker asal dalam mencantumkan bulan terakhir pembayaran tunjangan kinerja yang telah di lakukan pada e-SKPP pegawai.

  Rincian pengembalian belanja pegawai (tunjangan khusus/kegiatan/kinerja) adalah sebagai berikut:

Tabel 15
Rincian Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan/Kinerja)
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(dalam satuan rupiah)

No	Nama	Instansi Asal	Pengembalian Tukin Bulan	Tanggal Pengembalian	Nomor NTPN	Nilai Pengembalian
1	Alwin Saut	Ditjen KI (Kemenkum)	Februari 2025	20-10-2025	2A68E397D 7ANBVV8	5.079.200,00
			Maret 2025	06-11-2025	7E82F2CPT DHV8JJ0	5.079.200,00
2	Stevanus Rionaldo	Ditjen KI (Kemenkum)	Februari 2025	02-12-2025	AE6257NAS D6I3RK6	4.595.150,00
			Maret 2025	30-12-2025	BA9E9522C UE3ETMF	4.595.150,00
3	Rona Puspita	BPHN (Kemenkum)	Tukin 14 (Tukin THR)	30-12-2025	65BA72CPT EMU7SNE	3.915.950,00
4	Dinnu Insan	Kanim Cirebon (Kemen Imipas)	Tukin 14 (Tukin THR)	23-10-2025	A795A5UFS N2P6UF3	4.595.150,00
5	Agung Priambodo	Kanim Ngurah Rai (Kemen Imipas)	April 2025	30-12-2025	198338JOC 8NL2SHD	4.595.150,00
6	Nando Nofrianto	Kanim Tj. Balai Karimun (Kemen Imipas)	April 2025	20-10-2025	C30960JUT NJI507S	3.134.250,00
	TOTAL					**35.589.200,00**

Belanja Barang Rp86.427.964.778,00

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi belanja barang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp86.427.964.778,00 atau 83,68% dari pagu sebesar Rp103.284.229.000,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 16
Perbandingan Belanja Barang
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam satuan rupiah)

31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / Penurunan	%
86.427.964.778,00	0,00	86.427.964.778,00	0,00

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi belanja barang untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2025 mengalami kenaikan sebesar Rp86.427.964.778,00 atau sebesar 0,00% dibandingkan periode per 31 Desember 2024 karena di Tahun 2024 Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan belum memilki anggaran sendiri, masih menginduk ke anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Rincian realisasi belanja barang per 31 Desember 2025 per kelompok akun adalah sebagai berikut:

Tabel 17
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang per Kelompok Akun
Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam satuan rupiah)

Akun	URAIAN	Realisasi Per 31 Desember 2025
5211	Belanja Barang Operasional	11.248.700.347,00
5212	Belanja Barang Non Operasional	4.314.343.199,00
5218	Belanja Barang Persediaan	1.357.327.930,00
5221	Belanja Jasa	24.521.571.288,00
5231	Belanja Pemeliharaan	866.732.618,00
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	40.986.029.071,00
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	3.411.456.211,00
Total Realisasi Belanja *Brutto*		**86.706.160.664,00**
Pengembalian Belanja Barang		**(278.195.886,00)**
Total Realisasi *Netto*		**86.427.964.778,00**

Belanja barang operasional adalah pembelian barang dan/atau jasa habis pakai yang digunakan untuk mendukung kegiatan sehari-hari, kebutuhan dasar, dan pelayanan internal suatu satuan kerja atau pemerintah.

Rincian anggaran dan realisasi belanja barang operasional disajikan pada tabel berikut:

Tabel 18
Realisasi Belanja Barang Operasional
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(dalam satuan rupiah)

Kode	Rincian Belanja	Anggaran Revisi	Realisasi *Brutto*	Pengembalian	Realisasi Neto	%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	5.462.160.000,00	3.900.470.347,00	0,00	3.900.470.347,00	71,41
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	164.130.000,00	148.230.000,00	0,00	148.230.000,00	90,31
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	7.200.000.000,00	7.200.000.000,00	0,00	7.200.000.000,00	100,00
Jumlah		**12.826.290.000,00**	**11.248.700.347,00**	**0,00**	**11.248.700.347,00**	**87,70**

Penjelasan atas belanja barang operasional Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

a. Belanja keperluan perkantoran digunakan untuk pengeluaran barang non-persediaan guna mendukung operasional sehari-hari kantor dan bersifat habis pakai. Contoh belanja keperluan perkantoran pada Kementerian Koordinator diantaranya: jamuan tamu Menteri, cindermata, fotokopi, materai, dan ATK harian (non persediaan), biaya cetak/fotokopi, pakaian kerja satpam, pengadaan pakaian dinas, langganan koran/majalah, langganan aplikasi Canva, Google Drive, *Zoom Meeting*, Adobe, Chat GPT dan lain-lain.
b. Belanja honor operasional satuan kerja adalah jenis pengeluaran APBN untuk membayar honorarium tidak tetap kepada pegawai (PNS/Non-ASN) yang terlibat dalam kegiatan operasional penunjang tugas dan fungsi satuan kerja. Belanja honor operasional satuan kerja pada Kementerian Koordinator digunakan untuk pembayaran honor pejabat pengelola keuangan (KPA/PPK/PPSPM/Bendahara/ Bendahara Pembantu/Staf Pengelola Keuangan), serta honor pengelola SAKTI (Keuangan dan BMN).
c. Belanja barang operasional lainnya adalah jenis pengeluaran pemerintah (satuan kerja/satker) untuk barang/jasa habis pakai yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, operasional sehari-hari, dan pelayanan internal, yang tidak masuk dalam kategori belanja keperluan kantor, bahan makanan, atau daya/jasa lainnya.
   Belanja barang operasional lainnya pada Kementerian Koordinator sebesar Rp7.200.000.000,00 merupakan belanja atas Dana Operasional Menteri senilai Rp350.000.000,00/bulan dan Dana Operasional Wakil Menteri senilai Rp250.000.000,00/bulan, Besaran nilai Dana Operasional ini berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Nomor S-324/MK.02/2025 tanggal 11 Mei 2025 hal Dana Operasional Menteri/Wakil Menteri.

Belanja barang non operasional adalah pembelian barang atau jasa habis pakai yang dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja tertentu. Ini adalah biaya yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan operasional inti atau harian satuan kerja. Fokusnya lebih kepada pelayanan eksternal dan mendukung pencapaian output/kegiatan khusus.

Realisasi belanja barang non operasional untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, adalah sebagai berikut:

Tabel 19
Realisasi Belanja Barang Non Operasional
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(dalam satuan rupiah)

Kode	Rincian Belanja	Anggaran Revisi	Realisasi *Brutto*	Pengembalian	Realisasi Neto	%
521211	Belanja Bahan	7.359.900.000,00	3.444.542.999,00	0,00	3.444.542.999,00	46,80
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	31.792.000,00	18.432.000,00	0,00	18.432.000,00	57,98
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	893.498.000,00	851.368.200,00	0,00	851.368.200,00	95,28
Jumlah		**8.285.190.000,00**	**4.314.343.199,00**	**0,00**	**4.314.343.199,00**	**52,07**

Penjelasan atas belanja non operasional Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

a. Belanja bahan adalah pengeluaran pemerintah (bagian dari belanja barang/jasa) untuk membeli material habis pakai yang digunakan langsung dalam operasional, produksi, atau kegiatan tertentu. Contoh belanja bahan pada Kementerian Koordinator diantaranya: snack dan makan rapat, seminar kit kegiatan, penggandaan dan penjilidan, spanduk/banner, bahan komputer kegiatan dan lain-lain.
b. Belanja honor output kegiatan adalah jenis honorarium tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai (PNS/Non-PNS) atas pelaksanaan kegiatan yang menghasilkan output tertentu, bersifat insidentil, dan tidak dibayarkan terus-menerus sepanjang tahun. Contoh belanja honor output kegiatan pada Kementerian Koordinator diantaranya: honor rohaniawan serta honor kelompok kerja pemilihan unit kerja pengadaan barang dan jasa.
c. Belanja barang non operasional lainnya adalah pengeluaran anggaran untuk pembelian barang/jasa habis pakai yang mendukung kegiatan strategi target kinerja satuan kerja (satker) dan bersifat tidak rutin/eksternal, seperti rapat kerja, crash program, beasiswa pegawai, atau bantuan transport dalam kota. Contoh belanja barang non operasional lainnya pada Kementerian Koordinator diantaranya: dekorasi, taman kering, perlengkapan acara, giat peningkatan kapasitas pengamanan pimpinan, paket latihan menembak, *medical check up* dan lain-lain.

Belanja barang persediaan adalah pembelian aset lancar berupa barang/perlengkapan untuk operasional, produksi, atau diserahkan kepada masyarakat. Persediaan mencakup barang konsumsi, amunisi, bahan pemeliharaan, hingga pita cukai.

Realisasi Belanja Barang Persediaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, adalah sebagai berikut:

Tabel 20
Realisasi Belanja Barang Persediaan
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(dalam satuan rupiah)

Kode	Rincian Belanja	Anggaran Revisi	Realisasi *Brutto*	Pengembalian	Realisasi Neto	%
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.419.005.000,00	1.357.327.930,00	0,00	1.357.327.930,00	95,65
Jumlah		**1.419.005.000,00**	**1.357.327.930,00**	**0,00**	**1.357.327.930,00**	**95,65**

Belanja barang persediaan barang konsumsi adalah pengeluaran negara untuk membeli barang yang akan digunakan dalam operasional kantor, tidak sekali habis, dan dicatat dalam Aplikasi Persediaan, seperti alat tulis kantor (ATK), kertas, map, dan alat rumah tangga. Contoh belanja persediaan barang konsumsi pada Kementerian Koordinator diantaranya: belanja ATK untuk persediaan, bahan komputer, pengadaan obat-obatan klinik, cetakan dinas (map dan amplop kop Kementerian Koordinator), bahan sanitasi, *aromatic,* tissue kering dan basah, dan lain-lain.

Belanja jasa adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh layanan non-fisik yang habis pakai guna mendukung operasional, pemeliharaan aset, atau kegiatan suatu instansi/organisasi. Ini mencakup jasa profesi, sewa, dan jasa lainnya yang bertujuan menambah nilai guna aset atau melayani masyarakat.

Realisasi Belanja Jasa untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, adalah sebagai berikut:

Tabel 21
Realisasi Belanja Jasa
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(dalam satuan rupiah)

Kode	Rincian Belanja	Anggaran Revisi	Realisasi *Brutto*	Pengembalian	Realisasi Neto	%
522111	Belanja Langganan Listrik	510.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522112	Belanja Langganan Telepon	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522113	Belanja Langganan Air	334.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1.033.248.000,00	782.763.000,00	0,00	782.763.000,00	75,76
522131	Belanja Jasa Konsultan	443.634.000,00	443.633.500,00	0,00	443.633.500,00	100,00
522141	Belanja Sewa	10.651.867.000,00	10.188.850.200,00	0,00	10.188.850.200,00	95,65

522151	Belanja Jasa Profesi	4.096.200.000,00	2.791.050.000,00	0,00	2.791.050.000,00	68,14
522172	Belanja Jasa Pelayanan Perbendaharaan	1.260.000,00	17.500,00		17.500,00	1,39
522191	Belanja Jasa Lainnya	10.641.893.000,00	10.315.257.088,00	0,00	10.315.257.088,00	96,93
Jumlah		**27.718.262.000,00**	**24.521.571.288,00**	**0,00**	**24.521.571.288,00**	**88,47**

Penjelasan atas belanja jasa Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

a. Tidak ada realisasi belanja langganan listrik, langganan telepon, langganan air karena Kementerian Koordinator belum punya Aset Gedung dan Bangunan sendiri. Status gedung adalah penggunaan bersama dengan Ditjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dimana Kementerian Koordinator menempati lantai 15 dan 16. Selama tahun 2025, pemakaian jasa listrik, telepon dan air lantai 15 dan 16 masih dibayarkan tagihannya oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
b. Realisasi belanja langganan daya dan jasa lainnya pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sebesar Rp782.763.000,00 merupakan belanja langganan internet/wifi dan penguat jaringan internet;
c. Realisasi belanja jasa konsultan sebesar Rp443.633.500,00 merupakan jasa konsultan bisnis;
d. Realisasi belanja sewa sebesar Rp10.188.850.200,00 merupakan belanja sewa ruang pertemuan untuk kegiatan, belanja sewa kendaraan dinas dan operasional, sewa kendaraan insidentil pimpinan tinggi saat dinas luar kota, sewa peralatan untuk kegiatan (sound system, tenda, AC Standing, panggung, genset, LED Monitor, kursi, meja), sewa rumah dinas dan lain-lain.
   Sewa kendaraan dinas dan operasional terdiri dari:
   - Kendaraan Menteri 1 unit;
   - Kendaraan Wakil Menteri 1 unit;
   - Kendaraan Pimpinan Tinggi Madya 12 unit;
   - Kendaraan Pimipinan Tinggi Pratama 23 unit;
   - Kendaraan operasional 7 unit;
   - Kendaraan operasional kawal 2 unit.
e. Realisasi belanja jasa profesi sebesar Rp2.791.050.000,00 merupakan honor narasumber eksternal kegiatan;

f. Realisasi belanja jasa perbendaharaan sebesar Rp17.500,00 merupakan biaya transfer antar bank RTGS/jasa perbankan;
g. Realisasi belanja jasa lainnya sebesar Rp10.315.257.088,00 merupakan jasa event organizer, jasa pembuatan materi sosialisasi (cetak, video, digital, media), jasa pengelolaan informasi dan komunikasi publik Menteri dan Wakil Menteri, tenaga alih daya (pengelolaan kebersihan, pramubakti, pengemudi dan pengamanan), analisis dan media monitoring, fumigasi dan pest control, laundry, biaya medical checkup dan lain-lain.

Belanja Pemeliharaan adalah pengeluaran rutin pemerintah atau perusahaan untuk merawat, memperbaiki, dan mempertahankan aset tetap agar tetap berfungsi normal (tidak menambah nilai aset/kapasitas).

Realisasi Belanja Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, adalah sebagai berikut:

Tabel 22
Realisasi Belanja Pemeliharaan
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(dalam satuan rupiah)

Kode	Rincian Belanja	Anggaran Revisi	Realisasi Brutto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	0,00	0	0,00	0,00
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	951.730.000,00	866.732.618,00	0	866.732.618,00	91,07
Jumlah		**1.151.730.000,00**	**866.732.618,00**	**0,00**	**866.732.618,00**	**75,25**

Penjelasan atas tabel realisasi belanja pemeliharaan adalah sebagai berikut:

a. Realisasi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya sebesar Rp0,00 dikarenakan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan masih menempati gedung Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan status penggunaan gedung bersama, dan biaya pemeliharaan gedung masih ditanggung oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.
b. Realisasi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp866.732.618,00 merupakan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional serta biaya pemeliharaan peralatan perkantoran.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah biaya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah atau perusahaan untuk membiayai perjalanan keluar tempat kedudukan, baik perseorangan maupun bersama, dalam wilayah Republik Indonesia guna kepentingan negara atau perusahaan. Biaya ini mencakup uang harian, transpor, penginapan, dan uang representasi.

Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, adalah sebagai berikut:

Tabel 23
Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(dalam satuan rupiah)

Kode	Rincian Belanja	Anggaran Revisi	Realisasi Brutto	Pengembalian	Realisasi Netto	%
524111	Belanja Perjalanan Biasa	24.400.924.000,00	20.691.598.542,00	242.443.454,00	20.449.155.088,00	83,80
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	937.264.000,00	401.130.000,00	340.000,00	400.790.000,00	42,76
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	14.870.254.000,00	12.850.165.201,00	260.000,00	12.849.905.201,00	86,41
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7.822.330.000,00	7.043.135.328,00	20,00	7.043.135.308,00	90,04
Jumlah		**48.030.772.000,00**	**40.986.029.071,00**	**243.043.474,00**	**40.742.985.597,00**	**84,83**

Penjelasan atas tabel realisasi belanja perjalanan dalam negeri adalah sebagai berikut:

a. Belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp20.449.155.088,00 merupakan belanja perjalanan dinas luar kota (biaya tiket, hotel, uang harian, taksi) dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi ke daerah seperti ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Pemerintah Daerah maupun ke kantor instansi lainnya. Pengembalian sebesar Rp242.443.454,00 disebabkan karena pelaksana kegiatan mengajukan pembayaran LS di muka sebelum pelaksanaan dinas sesuai dengan pagu maksimal pada SBM, namun saat pelaksanaan dinas biaya tiket pesawat, hotel, taksi tidak terserap secara maksimal sehingga atas kelebihan pembayaran LS di muka tersebut dilakukan pengembalian.
   Pengembalian belanja perjalanan dinas biasa diantaranya atas dinas sebagai berikut:
   - Papua sebesar Rp129.929.954,00;
   - Kalimantan Barat sebesar Rp17.854.810,00;
   - Jawa Timur sebesar Rp11.036.380,00;

- Aceh sebesar Rp2.087.940,00;
- Padang sebesar Rp2.812.950,00;
- Kalimantan Utara sebesar Rp6.986.460,00;
- Dan lain-lain.

b. Belanja perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp400.790.000,00 dalam kota merupakan biaya transport lokal dalam rangka koordinasi maupun menghadiri undangan kegiatan instansi lain. Pengembalian sebesar Rp340.000,00 merupakan pengembalian transport lokal.
c. Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota sebesar Rp12.849.905.201,00 merupakan belanja atas pelaksanaan kegiatan paket meeting dalam kota seperti FGD, seminar, rapat koordinasi dan lain-lain. Pengembalian sebesar Rp260.000,00 merupakan pengembalian uang harian FGD.
d. Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota sebesar Rp7.043.135.308,00 merupakan belanja atas pelaksanaan paket meeting luar kota seperti FGD, rapat koordinasi dengan instansi daerah dan lain-lain.

Belanja perjalanan dinas luar negeri adalah biaya yang dikeluarkan untuk perjalanan ke luar dan/atau masuk wilayah Republik Indonesia, serta perjalanan di dalam wilayah luar negeri untuk kepentingan dinas/negara. Biaya ini mencakup transportasi, uang harian, penginapan, dan biaya lainnya.

Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, adalah sebagai berikut:

Tabel 24
Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(dalam satuan rupiah)

Kode	Rincian Belanja	Anggaran Revisi	Realisasi Brutto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	3.852.980.000,00	3.411.456.211,00	35.152.412,00	3.376.303.799,00	87,63

Realisasi belanja perjalanan dinas biasa-luar negeri sebesar Rp3.376.303.799,00 merupakan belanja perjalanan dinas luar negeri Menteri, Wakil Menteri, Pimpinan Tinggi beserta pendamping dalam rangka melaksanakan tugas kenegaraan mewakili negara Republik Indonesia maupun atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan di luar negeri. Pengembalian sebesar Rp 35.152.412,00 adalah pengembalian atas perjalanan dinas ke Swiss Rp33.678.412,00 dan ke Australia sebesar Rp1.474.000,00.

Belanja Modal Rp47.211.810.806,00

B.2.3. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat ekonomi lebih dari satu periode akuntansi. Tujuan utamanya adalah untuk menambah kekayaan/aset pemerintah atau perusahaan, seperti tanah, gedung, mesin, dan infrastruktur, guna mendukung operasional atau pelayanan publik dalam jangka panjang.

Realisasi Belanja Modal Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp47.211.810.806,00 atau 95,85% dari pagu sebesar Rp49.257.412.000,00.

Perbandingan realisasi belanja modal untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 25
Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam satuan rupiah)

Uraian	Realisasi *Netto*		Kenaikan / Penurunan	%
	31 Des 2025	31 Des 2024		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.632.007.856,00	0,00	46.632.007.856,00	0,00
Belanja Modal Lainnya	579.802.950,00	0,00	579.802.950,00	0,00
Jumlah	**47.211.810.806,00**	**0,00**	**47.211.810.806,00**	0,00

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi belanja modal mengalami kenaikan Rp47.211.810.806,00 atau sebesar 0,00% dari tahun sebelumnya. Pada Tahun Anggaran 2024 Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan belum memiliki anggaran sendiri, karena anggaran masih menginduk kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Rincian belanja modal untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 26
Rincian Realisasi Belanja Modal
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(dalam satuan rupiah)

Kode	Rincian Belanja	Anggaran Revisi	Realisasi Brutto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.677.449.000,00	46.632.007.856,00	0	46.632.007.856,00	95,80

536111	Belanja Modal Lainnya	579.963.000,00	579.802.950,00	0	579.802.950,00	99,97
Jumlah		**49.257.412.000,00**	**47.211.810.806,00**	**0,00**	**47.211.810.806,00**	**95,85**

Penjelasan atas belanja modal Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

a. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp46.632.007.856,00 merupakan belanja atas pengadaan sarana dan prasarana internal, antara lain:
   - Laptop Pimpinan Tinggi Madya 14 unit;
   - Laptop Pimpinan Tinggi Pratama 23 unit;
   - Laptop (Administrator/Pengawas/Pegawai) 211 unit;
   - Komputer/PC 19 unit;
   - Printer 83 unit;
   - Scanner 20 unit;
   - Printer Portable 3 unit;
   - Scanner Portable 3 unit;
   - Laptop Editing 5 unit;
   - Laptop Operasional 50 unit;
   - Komputer/PC Operasional 50 unit;
   - Storage Server 1 unit;
   - Pick Up 1 unit;
   - Mobil Box 1 unit;
   - Sepeda Motor 6 unit;
   - Sepeda Motor Operasional 4 unit;
   - Workstation (Meja, Kursi, Drawer);
   - Meubelair;
   - Meja dan Kursi Rapat;
   - Loker;
   - Dan lain-lain.

b. Realisasi belanja modal lainnya sebesar Rp579.802.950,00 merupakan belanja atas lisensi Microsoft Office Home 2024.

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

B.3.1. Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional Rekomendasi Kebijakan Penguatan Substansi Hukum Pidana yang Mengedepankan Keadilan Restoratif dari 8 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 27
Rincian Prioritas Nasional
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(dalam satuan rupiah)

Kode BA.Prog.Kef.KRO.RO (Kode dari Pemutakhiran RKP)	Uraian RO	Kode PN	Target RO RPJMN	Target RO Monsakti	Realisasi ROMonsakti	Satuan	Pagu Monsakti	Realisasi anggaran Monsakti
130.CL.7151.PBD.001	001 -Rekomendasi Kebijakan Penguatan Substansi Hukum Pidana yang Mengedepankan Keadilan Restoratif	7	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	500.000.000,00	438.000,00

Kegiatan Prioritas Nasional senilai Rp499.526.000,00 sampai tanggal pelaporan masih termasuk pagu yang diblokir yang merupakan amanat dari Inpres No. 1 Tahun 2025.

B.3.2. Capaian Output

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN Tahun 2025 pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

Tabel 28
Capaian *Output* Strategis
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Kementerian/Lembaga	:	Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Fungsi	:	(03) Ketertiban dan Keamanan
Sub Fungsi	:	(03.90) Ketertiban dan Keamanan Lainnya

Kode	Kegiatan	Belanja			Output				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
130.01.CL	**Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan**								
7151	**Koordinasi Bidang Hukum**								
ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Tata Kelola Administrasi Hukum	2.978.579.000,00	2.454.455.494,00	82,40	2,00	2,00	Rekomendasi Kebijakan	100,00	sesuai rencana
ABD.002	Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan Pemberdayaan dan Pelindungan Kekayaan Intelektual	2.975.443.000,00	2.539.700.003,00	85,36	2,00	2,00	Rekomendasi Kebijakan	100,00	sesuai rencana
ABD.003	Rekomendasi Kebijakan Materi Hukum dan Keadilan Restoratif	3.005.335.000,00	2.387.640.985,00	79,45	2,00	2,00	Rekomendasi Kebijakan	100,00	Tidak dilakukan revisi penyesuaian target output
ABD.004	Rekomendasi Kebijakan Budaya Informasi dan Komunikasi Hukum	2.993.803.000,00	2.204.481.662,00	73,63	2,00	2,00	Rekomendasi Kebijakan	100,00	Tidak dilakukan revisi penyesuaian target output

ABD.005	Rekomendasi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundangundangan dan Litigasi	2.977.483.000,00	1.882.585.237,00	63,23	2,00	2,00	Rekomendasi Kebijakan	100,00	Tidak dilakukan revisi penyesuaian target output
PBD.001	Rekomendasi Kebijakan Penguatan Substansi Hukum Pidana yang Mengedepankan Keadilan Restoratif	500.000.000,00	438.000,00	0,09	1,00	1,00	Rekomendasi Kebijakan	100,00	Termasuk pagu blokir efisiensi anggaran
ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Kebijakan HAM	3.007.867.000,00	2.229.805.736,00	74,13	2,00	2,00	Rekomendasi Kebijakan	100,00	Tidak dilakukan revisi penyesuaian target output
ABD.002	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat	2.994.143.000,00	2.274.788.612,00	75,97	2,00	2,00	Rekomendasi Kebijakan	100,00	Tidak dilakukan revisi penyesuaian target output
ABD.003	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Pembangunan dan Kerja Sama HAM	2.994.143.000,00	2.324.731.097,00	77,64	2,00	2,00	Rekomendasi Kebijakan	100,00	Tidak dilakukan revisi penyesuaian target output
ABD.004	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan	2.994.143.000,00	2.513.893.784,00	83,96	2,00	2,00	Rekomendasi Kebijakan	100,00	sesuai rencana
ABD.005	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Pendidikan HAM	2.994.143.000,00	2.417.932.957,00	80,76	2,00	2,00	Rekomendasi Kebijakan	100,00	sesuai rencana
ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian	2.994.143.000,00	2.400.737.500,00	80,18	2,00	2,00	Rekomendasi Kebijakan	100,00	sesuai rencana
ABD.002	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian	3.005.675.000,00	1.953.961.540,00	65,01	2,00	2,00	Rekomendasi Kebijakan	100,00	Tidak dilakukan revisi penyesuaian target output

ABD.003	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Tata Kelola Pemasyarakatan	2.994.143.000,00	2.350.040.563,00	78,49	2,00	2,00	Rekomendasi Kebijakan	100,00	Tidak dilakukan revisi penyesuaian target output
ABD.004	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Strategi Pelayanan Pemasyarakatan	3.005.675.000,00	2.244.026.607,00	74,66	2,00	2,00	Rekomendasi Kebijakan	100,00	Tidak dilakukan revisi penyesuaian target output
ABD.005	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Kerjasama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasyarakatan	3.005.675.000,00	2.190.601.254,00	72,88	2,00	2,00	Rekomendasi Kebijakan	100,00	Tidak dilakukan revisi penyesuaian target output
130.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**								
7150	**Dukungan Manajemen Sekretariat Kementerian Koordinator**								
7150.EBA	**Layanan Dukungan Manajemen Internal**								
EBA.001	Layanan Pengelolaan Komunikasi dan Peliputan	1.124.599.000,00	891.159.720,00	79,24	1,00	1,00	Laporan	100,00	Tidak dilakukan revisi penyesuaian target output
EBA.956	Layanan BMN	315.132.000,00	231.924.658,00	73,60	2,00	2,00	Layanan	100,00	Tidak dilakukan revisi penyesuaian target output
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	348.802.000,00	284.346.300,00	81,52	2,00	2,00	Layanan	100,00	Sesuai rencana
EBA.959	Layanan Protokoler	2.193.611.000,00	1.596.688.796,00	72,79	2,00	2,00	Layanan	100,00	Tidak dilakukan revisi penyesuaian target output
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	342.916.000,00	230.180.750,00	67,12	2,00	2,00	Layanan	100,00	Tidak dilakukan revisi penyesuaian target output
EBA.962	Layanan Umum	14.195.158.000,00	10.748.095.344,00	75,72	2,00	2,00	Layanan	100,00	Tidak dilakukan revisi penyesuaian target output
EBA.963	Layanan Data dan Informasi	162.610.000,00	140.134.554,00	86,18	2,00	2,00	Layanan	100,00	Sesuai rencana

EBA.994	Layanan Perkantoran	92.277.264.000,00	69.438.577.849,00	75,25	2,00	2,00	Layanan	100,00	Tidak dilakukan revisi penyesuaian target output
EBB.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	49.257.412.000,00	44.035.107.687,00	89,40	1,79	1.698,00	Unit	94,43	Output telah tercapai hanya menunggu finalisasi laporan/serah terima
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	283.538.000,00	256.165.000,00	90,35	300,00	300,00	orang	100,00	Sesuai rencana
EBD.001	Layanan Manajemen Kinerja	115.885.000,00	75.313.000,00	64,99	2,00	2,00	Dokumen	100,00	Tidak dilakukan revisi penyesuaian target output
EBD.002	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Kementerian	102.057.000,00	78.632.779,00	77,05	2,00	2,00	Dokumen	100,00	Tidak dilakukan revisi penyesuaian target output
EBD.003	Layanan Kerja Sama	1.011.470.000,00	757.208.965,00	74,86	2,00	2,00	Layanan	100,00	Tidak dilakukan revisi penyesuaian target output
EBD.004	Penyusunan Informasi Kinerja dan Rencana Strategis Kementerian	721.292.000,00	594.074.185,00	82,36	1,00	1,00	Dokumen	100,00	Sesuai rencana
EBD.005	Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi D,K,I, Jakarta	2.700.000,00	600.000,00	22,22	1,00	1,00	Dokumen	100,00	Tidak dilakukan revisi penyesuaian target output
EBD.006	Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian	299.357.000,00	273.241.421,00	91,28	1,00	1,00	Laporan	100,00	Sesuai rencana
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	205.716.000,00	170.334.580,00	82,80	2,00	2,00	Dokumen	100,00	Sesuai rencana
EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	202.103.000,00	101.128.203,00	50,04	2,00	2,00	Dokumen	100,00	Tidak dilakukan revisi penyesuaian target output
EBD.965	Layanan Audit Internal	429.069.000,00	353.991.242,00	82,50	2,00	2,00	Laporan	100,00	Sesuai rencana
EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	113.325.000,00	76.540.000,00	67,54	2,00	2,00	Laporan	100,00	Tidak dilakukan revisi penyesuaian target output

CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN

PENJELASAN ATAS
POS-POS NERACA

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset lancar Rp1.368.185.533,00

C.1. ASET LANCAR

Aset lancar adalah kas, setara kas, piutang, persediaan, atau investasi jangka pendek yang diharapkan dapat dicairkan, dijual, atau digunakan dalam kurun waktu satu tahun untuk mendukung kegiatan operasional. Aset ini disajikan di neraca dan mencakup sumber daya yang dikuasai pemerintah.

Aset lancar Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 29
Perbandingan Aset Lancar
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam satuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	848.216.607,00	0,00	848.216.607,00	0,00
Persediaan	519.968.926,00	0,00	519.968.926,00	0,00
Jumlah	**1.368.185.533,00**	**0,00**	**1.368.185.533,00**	**0,00**

Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Rp848.216.607,00

C.1.1 Belanja Dibayar Dimuka *(Prepaid)*

Belanja dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang atau jasa yang telah dibayarkan secara penuh oleh pemerintah kepada pihak lain namun manfaat atas barang atau jasa tersebut belum diterima seluruhnya oleh pemerintah.

Rincian belanja dibayar dimuka Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 30
Rincian Belanja Dibayar Dimuka
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(dalam satuan rupiah)

No	Uraian	Saldo
1	Sisa Saldo RFID bensin Pertamina yang sudah diakui sebagai beban pemeliharaan peralatan dan mesin, namun belum terealisasi sepenuhnya per 31 Desember 2025 sesuai dengan laporan dari Pertamina.	11.863.274,00
2	Voucher bensin Pertamina hasil konversi sisa saldo RFID Pertamina yang sudah diakui sebagai beban pemeliharaan peralatan dan mesin, namun belum terealisasi sepenuhnya per 31 Desember 2025.	50.000.000,00

3	Biaya langganan aplikasi dengan periode November 2025 s.d November 2026 sebesar Rp199.990.000,00 yang sudah diakui sebagai beban keperluan perkantoran sepenuhnya. Pengakuan belanja dibayar di muka untuk periode Januari s.d November 2026 (10/12 bulan x Rp199.990.000,00).	166.658.333,00
4	Biaya sewa rumah dinas Patraland dengan periode Oktober 2025 s.d Oktober 2026 sebesar Rp420.000.000,00 yang sudah diakui sebagai beban sewa sepenuhnya. Pengakuan belanja dibayar di muka untuk periode Januari s.d Oktober 2026 (9/12 bulan x Rp420.000.000,00).	315.000.000,00
5	Biaya pekerjaan jasa analisis dan media monitoring dengan periode Desember 2025 s.d Januari 2026 sebesar Rp98.790.000,00 yang sudah diakui sebagai beban keperluan perkantoran sepenuhnya. Pengakuan belanja dibayar di muka untuk periode Januari 2026 (1/2 bulan x Rp98.790.000,00).	49.395.000,00
6	Biaya pelatihan dan pendampingan pelaksanaan *podcast* senilai Rp55.500.000,00 dan Rp199.800.000,00 yang sudah diakui sebagai beban sepenuhnya, namun belum ada realisasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan 31 Desember 2025	255.300.000,00
Total		**848.216.607,00**

Persediaan Rp519.968.926,00

C.1.2. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 31
Perbandingan Persediaan
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam satuan rupiah)

Kode	Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
117111	Barang Konsumsi	457.699.926,00	0,00	457.699.926,00	0,00
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	62.269.000,00	0,00	62.269.000,00	0,00
	Jumlah	**519.968.926,00**	**0,00**	**519.968.926,00**	**0,00**

Rincian barang persediaan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, adalah sebagai berikut:

Tabel 32
Rincian Persediaan
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(dalam satuan rupiah)

Kode	Uraian	Jumlah
117111	**Barang Konsumsi**	
1010301001	Alat Tulis	8.587.500,00
1010301003	Penjepit Kertas	1.360.625,00
1010301004	Penghapus/Korektor	470.000,00
1010301005	Buku Tulis	80.000,00
1010301006	Ordner Dan Map	28.745.420,00
1010301007	Penggaris	155.500,00
1010301010	Alat Perekat	2.023.000,00
1010301012	Staples	60.000,00
1010301013	Isi Staples	110.000,00
1010301014	Barang Cetakan	8.500.000,00
1010301015	Seminar Kit	161.700.000,00
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	8.438.000,00
1010302001	Kertas HVS	1.172.000,00
1010302002	Berbagai Kertas	17.530.000,00
1010302004	Amplop	1.613.000,00
1010303999	Bahan Cetak Lainnya	14.953.900,00
1010304004	Tinta/Toner Printer	40.300.000,00
1010304006	USB/Flash Disk	5.400.000,00
1010304009	Harddisk Internal	29.700.000,00
1010304010	Mouse	6.480.000,00
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	8.185.000,00
1010306010	Batu Baterai	1.585.000,00
1010309001	Meterai	410.000,00
1010314001	Obat Cair (Barang Konsumsi)	9.269.045,00
1010314002	Obat Padat (Barang Konsumsi)	88.312.008,00
1010314004	Obat Serbuk/Tepung (Barang Konsumsi)	2.223.608,00
1010314005	Obat Gel/ Salep (Barang Konsumsi)	10.336.320,00
Jumlah Barang Konsumsi		**457.699.926,00**
117113	**Bahan untuk Pemeliharaan**	
1010305008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	2.748.000,00
1010305012	Pengharum Ruangan	37.600.000,00
1010305999	Perabot Kantor Lainnya	21.921.000,00
Jumlah Bahan untuk Pemeliharaan		**62.269.000,00**
TOTAL		**519.968.926,00**

Laporan Barang Persediaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 terdapat pada Lampiran.

Rincian mutasi persediaan pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, adalah sebagai berikut:

Tabel 33
Rincian Mutasi Persediaan
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(dalam satuan rupiah)

Uraian	Jumlah
Mutasi Tambah	
Saldo Awal	0,00
Pembelian	1.357.327.930,00
Koreksi Audited Reklas dari Aset	12.350.000,00
Koreksi Audited Perolehan Lainnya	110.140.981,00
Koreksi Audited Hasil Opname Fisik	36.733.000,00
Koreksi Audited Rupiah Bertambah	60.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	**1.516.611.911,00**
Mutasi Kurang	
Pemakaian	(972.858.885,00)
Koreksi Audited Rupiah Berkurang	(267.000,00)
Koreksi Audited Hasil Opname Fisik	(23.517.100,00)
Jumlah Mutasi Kurang	**(996.642.985,00)**
TOTAL	**519.968.926,00**

Penjelasan atas tabel mutasi persediaan diatas adalah sebagai berikut:

a. Saldo awal senilai Rp0,00 adalah saldo awal per 1 Januari 2025;
b. Pembelian Rp1.357.327.930,00 adalah nilai realisasi belanja barang persediaan sampai dengan 31 Desember 2025;
c. Koreksi Audited Reklas dari Aset merupakan transaksi yang muncul atas reklas pencatatan strip gula darah, strip kolesterol dan strip asam urat senilai total Rp12.350.000,00 yang sebelumnya tercatat sebagai satu kesatuan dengan alat kesehatan Accu Check;
d. Koreksi Audited Perolehan Lainnya merupakan transaksi yang muncul atas koreksi kurang catat obat-obatan yang sebelumnya sudah diakui sebagai beban saat distribusi ke klinik, namun hasil opname fisik saat pemeriksaan obat-obatan tersebut masih tersedia sebesar Rp110.140.981,00. Koreksi dilakukan dengan menu perolehan lainnya karena obat-obatan tersebut sebelumnya dicatat dengan satuan terbesar dan sudah dilakukan pengnihilan, sehingga pencatatan koreksi kurang catat dilakukan dengan menu perolehan lainnya;

e. Koreksi Audited Hasil Opname Fisik sebesar Rp36.733.000,00 merupakan transaksi yang muncul atas koreksi kurang catat ATK, yang terdapat selisih saldo hasil opname fisik saat pemeriksaan. Koreksi dilakukan dengan menu opname fisik;
f. Koreksi Audited Rupiah Bertambah sebesar Rp60.000,00 merupakan transaksi yang muncul atas koreksi kurang catat ATK berupa Double Tape 3M, yang terdapat selisih saldo hasil opname fisik saat pemeriksaan. Koreksi dilakukan dengan menu koreksi nilai bertambah karena sudah ada transaksi lanjutan atas persediaan tersebut di Tahun 2026;
g. Pemakaian sebesar Rp972.858.885,00 merupakan pencatatan awal pemakaian persediaan;
h. Koreksi Audited Rupiah Berkurang sebesar Rp267.000,00 merupakan koreksi atas lebih catat ATK, yang terdapat selisih saldo hasil opname fisik saat pemeriksaan. Koreksi dilakukan dengan menu koreksi nilai berkurang karena sudah ada transaksi lanjutan atas persediaan tersebut di Tahun 2026;
i. Koreksi Audited Hasil Opname Fisik sebesar Rp23.517.100,00 merupakan transaksi yang muncul atas koreksi lebih catat ATK, yang terdapat selisih saldo hasil opname fisik saat pemeriksaan. Koreksi dilakukan dengan menu opname fisik.

Aset Tetap
Rp41.991.886.433,00

C.2. ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah, dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal. Aset ini disajikan berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajarnya.

Aset tetap Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 34
Perbandingan Aset Tetap
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam satuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Peralatan dan Mesin	47.577.329.916,00	0,00	47.577.329.916,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6.196.555.757,00)	0,00	(6.196.555.757,00)	0,00
Jumlah	**41.380.774.159,00**	**0,00**	**41.380.774.159,00**	**0,00**

Peralatan dan Mesin
Rp47.577.329.916,00

C.2.1. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin adalah salah satu klasifikasi Aset Tetap berwujud yang digunakan dalam operasional pemerintahan, memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, dan memenuhi batas minimal kapitalisasi. Komponen ini mencakup berbagai alat, mesin, dan inventaris yang dimiliki dan dikuasai oleh kementerian/lembaga mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Rincian peralatan dan mesin Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, adalah sebagai berikut:

Tabel 35
Rincian Peralatan dan Mesin Berdasarkan Jenis BMN
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(dalam satuan rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Alat Angkutan Bermotor	925.667.999,00
2	Mesin Peralatan Khusus TIK	23.461.229.430,00
3	Mesin Peralatan Non TIK	23.190.432.487,00
TOTAL		**47.577.329.916,00**

Penjelasan atas tabel rincian peralatan dan mesin diatas, adalah sebagai berikut:

1. Alat angkutan bermotor terdiri dari:
   - 1 Unit Pick Up Isuzu Traga;
   - 1 Unit Pick Up Isuzu Traga Box;
   - 6 Unit Sepeda Motor Yamaha Nmax Turbo 2025;
   - 4 Unit Sepeda Motor Vario 125 CBS ISS 2025.

2. Mesin Peralatan Khusus TIK terdiri dari:
   - 5 Unit External/Portable Hardisk;
   - 1 Unit Firewall;
   - 320 Unit Laptop;
   - 3 Unit Monitor;
   - 4 Unit PC;
   - 70 Unit Personal Komputer Lainnya;
   - 97 Unit Printer;
   - 1 Unit Rak Server;
   - 1 Unit Router;
   - 29 Unit Scanner;

- 1 Unit Server;
- 1 Unit Storage Modul Disk.

3. Mesin Peralatan Non TIK terdiri dari, antara lain:
   - 36 Unit Air Cleaner;
   - 11 Unit Alat Hiasan;
   - 42 Unit Alat Penghancur Kertas;
   - 89 Unit Alat Rumah Tangga Lainnya;
   - 23 Unit Sofa;
   - 1 Unit Audio Mixing Console;
   - 1 Unit Bed Pasien;
   - 28 Unit Bracket Standing Peralatan;
   - 3 Unit Brankas;
   - 3 Unit Camera Adaptor;
   - 37 Unit Camera Conference;
   - 8 Unit Camera Digital;
   - 2 Unit Camera Electronic;
   - 2 Unit Camera Video;
   - 43 Unit CCTV;
   - 16 Unit Chairman/Audio Conference;
   - 11 Unit Coffee Maker;
   - 9 Unit Dispenser;
   - 4 Unit Drone;
   - 2 Unit EKG;
   - 3 Unit Electronic Stethoscope;
   - 10 Unit Exhause Fan;
   - 2 Unit Filling Cabinet Kayu;
   - 22 Unit Gambar Presiden/Wakil Presiden;
   - 1 Unit Gimbal Tripod;
   - 8 Unit Hand Metal Detector;
   - 20 Unit Handy Talky;
   - 14 Unit Karpet;
   - Dan lain-lain.

Laporan Daftar BMN untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 terdapat pada Lampiran.

Rincian mutasi peralatan dan mesin pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, adalah sebagai berikut:

Tabel 36
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(dalam satuan rupiah)

Uraian	Jumlah
Mutasi Tambah	
Saldo Awal	0,00
Pembelian	46.632.007.856,00
Pembelian Peralatan dan Mesin yang belum terbayarkan per 31 Desember 2025	947.151.900,00
Transfer Masuk	665.438.100,00
Koreksi Audited Bertambah	53.900.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	**48.298.497.856,00**
Mutasi Kurang	
Koreksi Audited Berkurang	(721.167.940,00)
Jumlah Mutasi Kurang	**(721.167.940,00)**
TOTAL	**47.577.329.916,00**

Penjelasan tabel mutasi peralatan dan mesin diatas adalah sebagai berikut:

a. Saldo awal senilai Rp0,00 adalah saldo awal per 1 Januari 2025;
b. Pembelian sebesar Rp46.632.007.856,00 adalah nilai realisasi belanja modal peralatan dan mesin sampai dengan 31 Desember 2025;
c. Pembelian Peralatan dan Mesin yang belum terbayarkan per 31 Desember 2025 sebesar Rp947.151.900,00 adalah pembelian Meja Kerja, Kursi Kerja, Sofa, Meja Tamu, Meja Serbaguna STRAMM yang tidak terbayarkan/ditolak karena telah melewati batas waktu penyampaian SPM dan tidak mendapatkan persetujuan dispensasi sesuai dengan surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-671/PB-2/2025 tanggal 30 Desember 2025 hal Penolakan Pengajuan SPM di Luar Batas Waktu;
d. Transfer Masuk sebesar Rp665.438.100,00 adalah transfer masuk 4 Unit PC, 10 Laptop, 10 Printer, 6 Scanner dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum;
e. Koreksi Audited Bertambah sebesar Rp53.900.000,00 merupakan koreksi pencatatan Firewall yang direalisasikan menggunakan akun belanja keperluan perkantoran;
f. Koreksi Audited Berkurang sebesar Rp721.167.940,00 terdiri dari:
   - Koreksi Aset menjadi barang persediaan dan aset ekstrakomtabel berupa alat Accu Check dan strip gula

darah, strip kolesterol dan strip asam urat dengan total sebesar Rp15.815.000,00;

- Koreksi Aset yang sebelumnya tercatat sebagai satu paket, dipecah sesuai item barang dan terdapat item aset ekstrakomtabel sebesar Rp914.750,00 berupa Router Wifi;
- Koreksi Aset Podcast yang sebelumnya tercatat sebagai satu paket dan di dalamnya terdapat komponen pelatihan dan pendampingan sebesar Rp255.300.000,00 yang belum dilaksanakan kegiatannya sampai dengan 31 Desember 2025 dicatat sebagai Belanja Dibayar Dimuka;
- Koreksi Aset Podcast yang sebelumnya tercatat sebagai satu paket dan di dalamnya terdapat komponen pembuatan ruang podcast sebesar Rp425.144.430,00 dicatat menjadi beban pemeliharaan gedung dan bangunan;
- Koreksi Aset Difusser yang sebelumnya tercatat sebagai satu paket sebesar Rp12.210.000,00 dicatat menjadi beban persediaan bahan untuk pemeliharaan;
- Koreksi Aset Alat-Alat Kesehatan yang sebelumnya tercatat sebagai satu paket sebesar Rp10.296.360,00 namun saat dipecah per item barang semua membentuk aset ekstrakomtabel;
- Koreksi Aset Walker yang sebelumnya tercatat sebagai satu paket sebesar Rp1.487.400,00 namun saat dipecah per item barang semua membentuk aset ekstrakomtabel.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Rp6.196.555.757,00)

C.2.2. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin adalah total seluruh biaya penyusutan (depresiasi) yang telah dicatat untuk peralatan dan mesin sejak pertama kali digunakan hingga periode berjalan. Akun ini merupakan akun kontra aset di neraca yang mengurangi nilai perolehan awal aset guna menunjukkan nilai buku bersih yang sebenarnya.

Rincian akumulasi penyusutan peralatan dan mesin Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, adalah sebagai berikut:

Tabel 37
Rincian Penyusutan Peralatan dan Mesin Berdasarkan Jenis BMN
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(dalam satuan rupiah)

No	Uraian	Penyusutan
1	Alat Angkutan Bermotor	(66.119.145,00)
2	Mesin Peralatan Khusus TIK	(3.167.849.449,00)

3	Mesin Peralatan Non TIK	(2.962.587.163,00)
TOTAL		**(6.196.555.757,00)**

Laporan Daftar Penyusutan BMN untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 terdapat pada Lampiran.

Aset Lainnya Rp961.212.802,00

C.3. ASET LAINNYA

Aset lainnya adalah kelompok aset non-lancar yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap, investasi jangka panjang, atau aset tak berwujud, namun memiliki manfaat ekonomi jangka panjang. Aset ini mencakup item seperti aset tidak berwujud, kemitraan pihak ketiga, piutang jangka panjang, dan aset lain-lain yang tidak material.

Aset lainnya Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 38
Perbandingan Aset Lainnya
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam satuan rupiah)

Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Aset Tak Berwujud	1.011.802.950,00	0,00	1.011.802.950,00	0,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(50.590.148,00)	0,00	(50.590.148,00)	0,00
Jumlah	**961.212.802,00**	**0,00**	**961.212.802,00**	**0,00**

Aset Tak Berwujud Rp1.011.802.950,00

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang tidak memiliki wujud fisik namun dapat diidentifikasi, dimiliki perusahaan untuk menghasilkan barang/jasa, serta memberikan manfaat ekonomi jangka panjang. Aset ini dicatat dalam laporan posisi keuangan (neraca) sebagai aset tidak lancar, seperti hak paten, merek dagang, dan lisensi.

Rincian aset tak berwujud Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, adalah sebagai berikut:

Tabel 39
Rincian Aset Tak Berwujud
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(dalam satuan rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Lisensi Microsoft Office Home 2024	579.802.950,00
2	Lisensi Zimbra Collaboratio n Suite - Professional Edition	432.000.000,00
TOTAL		**1.011.802.950,00**

Rincian mutasi aset tak berwujud pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, adalah sebagai berikut:

Tabel 40
Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(dalam satuan rupiah)

Uraian	Jumlah
Mutasi Tambah	
Saldo Awal	0
Pembelian	579.802.950,00
Koreksi Audited Bertambah	432.000.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	**1.011.802.950,00**
Mutasi Kurang	
Koreksi Audited Berkurang	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	**0,00**
TOTAL	**1.011.802.950,00**

Penjelasan tabel mutasi aset tak berwujud diatas adalah sebagai berikut:

a. Saldo awal senilai Rp0,00 adalah saldo awal per 1 Januari 2025;
b. Pembelian sebesar Rp579.802.950,00 adalah nilai realisasi belanja modal lainnya sampai dengan 31 Desember 2025;
c. Koreksi Audited Bertambah adalah koreksi yang sebelumnya tercatat sebagai satu paket pengadaan email kedinasan, setelah dipecah per item komponen, terdapat item komponen lisesni Zimbra yang dikoreksi menjadi aset tak berwujud lisensi sebesar Rp432.000.000,00.

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya (Rp50.590.148,00)

C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya adalah total beban penyusutan dan amortisasi yang diakui dari waktu ke waktu atas aset tidak berwujud atau aset jangka panjang non-tetap. Akun ini bersifat kontra-aset, mengurangi nilai tercatat kotor aset

tersebut di neraca untuk mencerminkan nilai buku bersih yang sebenarnya.

Rincian akumulasi penyusutan/amortisasi aset lainnya Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, adalah sebagai berikut:

Tabel 41
Rincian Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(dalam satuan rupiah)

No	Uraian	Penyusutan
1	Lisensi Microsoft Office Home 2024	28.990.148,00
2	Lisensi Zimbra Collaboratio n Suite - Professional Edition	21.600.000,00
TOTAL		**50.590.148,00**

Kewajiban Jangka Pendek Rp947.151.900,00

C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek ini terdiri dari Utang Kepada Pihak Ketiga, Hibah Yang Belum Disahkan, Pendapatan Diterima Dimuka, Uang Muka dari KPPN, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban jangka pendek Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 42
Perbandingan Kewajiban Jangka Pendek
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam satuan rupiah)

Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Utang Kepada Pihak Ketiga	947.151.900,00	0,00	947.151.900,00	0,00
Jumlah	**947.151.900,00**	**0,00**	947.151.900,00	**0,00**

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp947.151.900,00

C.4.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang sudah terbit SPP/SPM tetapi belum terbit SP2D sampai dengan tanggal

31 Desember 2025.

Utang kepada pihak ketiga Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 43
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(dalam satuan rupiah)

No	Uraian	Penyusutan
1	Belanja Modal Yang Masih Harus Dibayar	947.151.900,00
TOTAL		**947.151.900,00**

Penjelasan tabel utang kepada pihak ketiga diatas adalah sebagai berikut:

a. Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp947.151.900,00 merupakan transaksi Belanja Modal Yang Masih Harus Dibayar atas pembelian aset peralatan dan mesin yang tidak terbayarkan/ditolak karena telah melewati batas waktu penyampaian SPM dan tidak mendapatkan persetujuan dispensasi sesuai dengan surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-671/PB-2/2025 tanggal 30 Desember 2025 hal Penolakan Pengajuan SPM di Luar Batas Waktu;
b. Rincian barang-barang senilai Rp947.151.900,00 dimaksud adalah sebagai berikut:
   - 8 Unit STRAMM Kursi Kerja Paredes senilai Rp135.420.000,00;
   - 4 Unit STRAMM Kursi Armchair senilai Rp31.168.800,00;
   - 8 Unit STRAMM Meja Kerja Spink senilai Rp119.880.000,00;
   - 8 Unit STRAMM Meja Serbaguna/Console Gian senilai Rp46.442.400,00;
   - 1 Unti STRAMM Meja Kerja senilai Rp42.457.500,00;
   - 16 Unit STRAMM Meja Tamu/Sudut senilai Rp61.272.000,00;
   - 16 Unit STRAMM Sofa Carmel 1 seat senilai Rp114.019.200,00;
   - 8 Unit STRAMM Sofa Carmel 3 seat senilai Rp105.672.000,00;
   - 24 Unit STRAMM Kursi Armchair Ramona senilai Rp99.367.200,00;

- 8 Unit STRAMM Meja Tamu Forgo senilai Rp69.708.000,00;
- 2 Unit STRAMM Kursi Kerja Lopez senilai Rp34.188.000,00;
- 4 Unit STRAMM Kursi Kerja King Classic III GAR senilai Rp51.726.000,00;
- 1 Unit STRAMM Meja Kerja Camaro LN senilai Rp35.830.800,00.

Atas utang kepada pihak ketiga tersebut telah dilakukan revisi anggaran di awal Tahun Anggaran 2026 dan telah dilakukan pembayaran melalui SPM No. 00124A tanggal 12 Maret 2026.

Ekuitas Rp42.763.020.594,00

C.5. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Ekuitas Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 44
Perbandingan Ekuitas
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam satuan rupiah)

Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Ekuitas	42.763.020.594,00	0,00	42.763.020.594,00	0,00
Jumlah	**42.763.020.594,00**	**0,00**	42.763.020.594,00	**0,00**

Rincian Ekuitas Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 45
Rincian Ekuitas
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(dalam satuan rupiah)

Uraian	Jumlah
Aset Lancar	**1.368.185.533,00**
Aset Tetap	41.380.774.159,00
Aset Lainnya	961.212.802,00
Jumlah Aset	**43.710.172.494,00**
Kewajiban	947.151.900,00
Jumlah Kewajiban	947.151.900,00
Ekuitas (Aset – Kewajiban)	**42.763.020.594,00**



CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN

PENJELASAN ATAS
POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP

Rp12.212.279,00

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Basis akrual akuntansi Pendapatan-LO mengakui pengaruh transaksi penghasil pendapatan atau peristiwa lain penghasil pendapatan pada saat transaksi atau peristiwa penyebab timbulnya hak atas pendapatan terjadi, tanpa memperhatikan saat pendapatan tersebut diterima dalam bentuk tunai atau bentuk penerimaan lain.

Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 46
Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO
Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam satuan rupiah)

Akun	Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024	Kenaikan / Penurunan	%
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	1.223.468,00	0,00	1.223.468,00	0,00
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	488.811,00	0,00	488.811,00	0,00
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00
Total		**12.212.279,00**	**0,00**	**12.212.279,00**	**0,00**

Perbandingan Pendapatan PNBP-LO dan PNBP-LRA dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 47
Perbandingan Pendapatan PNBP-LO dan PNBP-LRA
Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

(dalam satuan rupiah)

Pendapatan PNBP-LO	Pendapatan PNBP-LRA	Selisih
12.212.279,00	12.212.279,00	0,00

Berdasarkan tabel diatas, tidak terdapat perbedaan antara

Pendapatan PNBP-LO dan PNBP-LRA.

Penjelasan atas realisasi pendapatan PNBP-LO di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi sebesar Rp1.223.468,00 merupakan pendapatan yang berasal dari kesalahan atau ketidaksesuaian ADK e-SKPP (Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran) beberapa pegawai yang beralih ke Kementerian Koordinator, dimana pegawai-pegawai tersebut mempunyai potongan sewa rumah dinas di satker asal, namun data potongan sewa tersebut tidak dihapus saat menerbitkan ADK e-SKPP, sehingga saat ADK tersebut diterima dan diproses pembayaran Gaji di Kementerian Koordinator masih terproses potongan sewa rumah dinas secara otomatis pada SPM Gaji.

Data Pegawai dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 48
Rincian Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(dalam satuan rupiah)

No	No. SPM	Uraian	Nilai Potongan Rumah Dinas	Rincian Potongan	Nama Pegawai
1	00023A	Potongan Gaji Susulan Mei 2025	354.620,00	66.282,00	Robiana Suryajatmika
				127.958,00	Muhammad Arifin
				160.380,00	Muslim Nasution
2	00033A	Potongan Gaji Induk Juni 2025	354.620,00	66.282,00	Robiana Suryajatmika
				127.958,00	Muhammad Arifin
				160.380,00	Muslim Nasution
3	00096A	Potongan Gaji Susulan Juni 2025	159.994,00	159.994,00	Muhammad Irfan Mulki
4	00119A	Potongan Gaji Induk Juli 2025	354.234,00	66.282,00	Robiana Suryajatmika
				127.958,00	Muhammad Arifin
				159.994,00	Muhammad Irfan Mulki
			1.223.468,00	**1.223.468,00**	

b. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp488.811,00 merupakan pendapatan denda keterlambatan pengadaan pakaian dinas pegawai Kementerian Koordinator Tahun Anggaran 2025. Denda keterlambatan tersebut diproses melalui pemotongan SPM pembayaran No.02133A tanggal 22 Desember 2025.

c. Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar Rp10.500.000,00 merupakan pendapatan yang berasal dari kesalahan setor masyarakat/pihak ketiga ke Kementerian Koordinator yang sedianya mengajukan layanan ke instansi lain. Terdapat tiga nama masyarakat/pihak ketiga yang melakukan salah setor namun baru satu nama masyarakat yang melaporkan atas kesalahan tersebut (a.n Herlina) dan mengajukan permohonan pengembalian PNBP, sedangkan dua nama masyarakat/pihak ketiga lainnya belum melakukan pelaporan dan pengajuan permohonan pengembalian PNBP.

Rincian pendapatan anggaran lain-lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 49
Rincian Pendapatan Anggaran Lain-lain
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(dalam satuan rupiah)

No	Nama Penyetor	31 Desember 2025			
		Tanggal Setor	NTB	NTPN	Nilai
1	Rachel Luwih Budi	22-04-2025	851294661877	FBFE92G502S8IB6S 820250421243100	4.500.000,00
2	Herlina	06-03-2025	002074643870	857190NA0DK2JFLB 820250306789035	2.000.000,00
3	PT Alia Kreasi Mandiri inter.	06-02-2025	000088073887	D9E0C0NA0DH38FJL 820250206813813	4.000.000,00
Jumlah Pendapatan					**10.500.000,00**

Beban Pegawai Rp38.275.757.017,00

D.2. BEBAN PEGAWAI

Beban Pegawai-LO adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negara Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Pegawai-LO Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 50
Perbandingan Beban Pegawai-LO
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam satuan rupiah)

31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / Penurunan	%
38.275.757.017,00	0,00	38.275.757.017,00	0,00

Perbandingan Beban Pegawai-LO dan Belanja Pegawai -LRA dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 51
Perbandingan Beban Pegawai-LO dan Belanja Pegawai-LRA
Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

(dalam satuan rupiah)

Beban-LO	Belanja-LRA	Selisih
38.275.757.017,00	38.275.757.017,00	0,00

Berdasarkan tabel diatas, tidak terdapat perbedaan antara beban pegawai-LO dan belanja pegawai-LRA.

Rincian beban pegawai-LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, adalah sebagai berikut:

Tabel 52
Rincian Beban Pegawai-LO
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(dalam satuan rupiah)

Kode	Uraian	Nilai Beban
511111	Beban Gaji Pokok PNS	7.350.554.333,00
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	102.405,00
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	413.819.750,00
511122	Beban Tunj. Anak PNS	95.443.470,00
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	1.176.360.000,00
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	669.837.000,00
511125	Beban Tunj. PPh PNS	135.579.382,00
511126	Beban Tunj. Beras	309.523.080,00
511129	Beban Uang Makan PNS	1.089.302.450,00
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	98.935.000,00
511512	Beban Tunjangan Pegawai Non PNS	333.000.780,00
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	47.095.400,00
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	64,00
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	4.709.540,00
511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	1.883.816,00
511623	Beban Tunjangan Struktural PPPK	48.125.000,00
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	3.186.480,00

511628	Beban Uang Makan PPPK	5.822.000,00
512211	Beban Uang Lembur	2.529.560.000,00
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan/Kinerja)	23.659.564.567,00
512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	303.352.500,00
Jumlah		**38.275.757.017,00**

Nilai beban pegawai diatas belum menggambarkan nilai beban pegawai dalam satu tahun (untuk 252 pegawai), karena hal-hal sebagai berikut:

a. Anggaran belanja pegawai efektif baru direalisasikan mulai bulan Mei tahun 2025, setelah anggaran biaya tambahan disahkan di akhir bulan April tahun 2025;
b. Pengalihan pegawai masuk ke Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dilakukan secara bertahap/tidak dalam satu waktu;
c. Pengalihan pegawai ke Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan tidak langsung disertai dengan pengalihan pembayaran hak keuangannya (penerbitan e-SKPP dari Satker asal), sehingga banyak pegawai yang sudah beralih, namun hak keuangan masih dibayarkan oleh satuan kerja asal.

Beban Persediaan Rp647.320.004,00

D.3. BEBAN PERSEDIAAN

Beban Persediaan-LO merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban Persediaan-LO Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 53
Perbandingan Beban Persediaan-LO
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam satuan rupiah)

31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / Penurunan	%
647.320.004,00	0,00	647.320.004,00	0,00

Perbandingan Beban Persediaan-LO dan Belanja Pegawai -LRA dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 54
Perbandingan
Beban Persediaan-LO dengan Belanja Persediaan-LRA
Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

(dalam satuan rupiah)

Beban-LO	Belanja-LRA	Selisih
647.320.004,00	1.357.327.930,00	(710.007.926,00)

Berdasarkan tabel diatas, terdapat perbedaan antara beban persediaan-LO dan belanja persediaan-LRA sebesar (Rp710.007.926,00).

Penjelasan selisih antara Beban Persediaan-LO dengan Belanja Persediaan-LRA sebesar (Rp710.007.926,00) adalah sebagai berikut:

Tabel 55
Penjelasan Selisih
Beban Persediaan-LO dengan Belanja Persediaan-LRA
Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

(dalam satuan rupiah)

No	Keterangan	Selisih
1	Saldo neraca persediaan barang konsumsi sebesar Rp457.699.926,00 yang tidak membentuk beban karena belum terpakai	(457.699.926,00)
2	Saldo neraca persediaan bahan untuk pemeliharaan sebesar Rp62.269.000,00 yang tidak membentuk beban karena belum terpakai	(62.269.000,00)
3	Beban atas pemakaian persediaan bahan untuk pemeliharaan sebesar Rp214.392.000,00 yang tidak membentuk beban persediaan melainkan beban pemeliharaan	(214.392.000,00)
4	Koreksi tambah beban pemeliharaan atas pemakaian barang persediaan bahan untuk pemeliharaan, namun bukan berasal dari belanja persediaan. koreksi atas pencatatan diffuser yang sebelumnya direalisasikan menggunakan belanja modal dan dicatat sebagai aset, dikoreksi menjadi persediaan bahan untuk pemeliharaan dan dihabispakaikan	12.210.000,00
5	Koreksi tambah saldo persediaan bahan untuk pemeliharaan, namun bukan berasal dari belanja persediaan. koreksi atas pencatatan strip control alat accu check yang sebelumnya direalisasikan menggunakan belanja modal dan dicatat sebagai aset, dikoreksi menjadi persediaan bahan untuk pemeliharaan	12.350.000,00
6	Koreksi kurang saldo persediaan barang konsumsi pada neraca atas lebih catat barang persediaan ATK, namun tidak membentuk beban persediaan, melainkan	(267.000,00)

	beban penyesuaian nilai persediaan karena sudah ada transaksi lanjutan di tahun 2026	
7	Koreksi tambah saldo persediaan barang konsumsi pada neraca atas kurang catat barang persediaan ATK, namun tidak mengoreksi beban persediaan, melainkan pendapatan penyesuaian nilai persediaan karena sudah ada transaksi lanjutan di tahun 2026	60.000,00
	Total	**(710.007.926,00)**

Beban persediaan diatas menggambarkan beban pemakaian barang persediaan konsumsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sepanjang tahun 2025.

Beban Barang dan Jasa Rp39.083.825.011,00

D.4. BEBAN BARANG DAN JASA

Beban Barang dan Jasa adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, berupa konsumsi aset (barang) atau penggunaan jasa untuk penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintahan. Berbeda dengan belanja LRA, beban diakui saat timbulnya kewajiban atau konsumsi.

Beban Barang dan Jasa-LO Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 56
Perbandingan Beban Barang dan Jasa-LO
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam satuan rupiah)

31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / Penurunan	%
39.083.825.011,00	0,00	39.083.825.011,00	0,00

Perbandingan Beban Barang dan Jasa-LO dan Belanja Barang dan Jasa-LRA dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 57
Perbandingan
Beban Barang dan Jasa-LO dengan Belanja Barang dan Jasa-LRA
Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

(dalam satuan rupiah)

Beban-LO	Belanja-LRA	Selisih
39.083.825.011,00	40.084.614.834,00	(1.000.789.823,00)

Berdasarkan tabel diatas, terdapat perbedaan antara beban barang dan jasa-LO dan belanja barang dan jasa-LRA sebesar (Rp1.000.789.823,00).

Rincian selisih Beban Barang dan Jasa-LO dengan Belanja Barang dan Jasa-LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 58
Perbandingan
Beban Barang dan Jasa-LO dengan Belanja Barang dan Jasa-LRA
Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

(dalam satuan rupiah)

Kode	Uraian	Beban-LO	Belanja-LRA	Selisih
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	3.198.517.014,00	3.900.470.347,00	(701.953.333,00)
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	148.230.000,00	148.230.000,00	0,00
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	7.200.000.000,00	7.200.000.000,00	0,00
521211	Belanja Bahan	3.444.542.999,00	3.444.542.999,00	0,00
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	18.432.000,00	18.432.000,00	0,00
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	851.368.200,00	851.368.200,00	0,00
521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	16.163.510,00	0,00	16.163.510,00
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	782.763.000,00	782.763.000,00	0,00
522131	Belanja Jasa Konsultan	443.633.500,00	443.633.500,00	0,00
522141	Belanja Sewa	9.873.850.200,00	10.188.850.200,00	(315.000.000,00)
522151	Belanja Jasa Profesi	2.791.050.000,00	2.791.050.000,00	0,00
522172	Belanja Jasa Pelayanan Perbendaharaan	17.500,00	17.500,00	0,00
522191	Belanja Jasa Lainnya	10.315.257.088,00	10.315.257.088,00	0,00
Jumlah		**39.083.825.011,00**	**40.084.614.834,00**	**(1.000.789.823,00)**

Penjelasan selisih Beban Barang dan Jasa-LO dengan Belanja dan Jasa-LRA adalah sebagai berikut:

a. Selisih beban keperluan perkantoran sebesar (Rp701.953.333,00) adalah atas:
   - pengakuan belanja dibayar dimuka atas langganan aplikasi sebesar (Rp166.658.333,00);
   - belanja dibayar dimuka atas pekerjaan jasa analisis dan media monitoring sebesar (Rp49.395.000,00);
   - koreksi atas firewall sebesar (Rp53.900.000,00) yang sebelumnya tercatat sebagai beban, dikoreksi menjadi aset, sehingga mengurangi beban keperluan perkantoran; dan

- koreksi atas lisensi Zimbra sebesar (Rp432.000.000,00) yang sebelumnya tercatat sebagai beban, dikoreksi menjadi aset, sehinggga mengurangi beban keperluan perkantoran.

b. Selisih Beban Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel sebesar Rp16.163.510,00 adalah koreksi atas belanja keperluan perkantoran yang sebelumnya tercatat sebagai beban, dikoreksi menjadi aset ekstrakomtabel, dan memunculkan beban peralatan dan mesin-ekstrakomtabel, terdiri dari:
   - Alat Accu Check dengan harga satuan dibawah nilai kapitalisasi, senilai total Rp3.465.000,00;
   - Router Wifi senilai Rp914.750,00;
   - Alat-alat kesehatan dengan harga satuan dibawah nilai kapitalisasi, senilai total Rp10.296.360,00;
   - Walker tanpa roda dengan harga satuan dibawah nilai kapitalisasi, senilai total Rp1.487.400,00.

c. Selisih Beban Sewa sebesar (Rp315.000.000,00) adalah pengakuan belanja dibayar dimuka atas sewa rumah dinas Patraland.

Kesimpulan dari selisih antara beban barang dan jasa-LO dengan belanja barang dan jasa-LRA diatas adalah karena ada pencatatan belanja dibayar dimuka atas realisasi belanja barang dan jasa yang belum sepenuhnya terealisasi kegiatannya/pekerjaannya per 31 Desember 2025 dan atas realisasi belanja barang dan jasa yang membentuk aset ekstrakomtabel.

Beban Pemeliharaan Rp1.444.405.774,00

D.5. BEBAN PEMELIHARAAN

Beban pemeliharaan pada Laporan Operasional adalah biaya yang diakui untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya dalam kondisi normal agar tetap berfungsi sesuai kapasitasnya. Beban ini dicatat berdasarkan prinsip akrual, di mana pemeliharaan diakui saat jasa diterima, bukan saat kas dibayarkan.

Beban Pemeliharaan-LO Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 59
Perbandingan Beban Pemeliharaan-LO
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam satuan rupiah)

31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1.444.405.774,00	0,00	1.444.405.774,00	0,00

Perbandingan Beban Pemeliharaan-LO dan Belanja Pemeliharaan dan Jasa-LRA dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 60
Perbandingan
Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA
Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

(dalam satuan rupiah)

Beban-LO	Belanja-LRA	Selisih
1.444.405.774,00	866.732.618,00	577.673.156,00

Berdasarkan tabel diatas, terdapat perbedaan antara beban pemeliharaan-LO dan belanja pemeliharaan-LRA sebesar (Rp577.673.156,00).

Rincian selisih Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 61
Perbandingan
Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA
Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

(dalam satuan rupiah)

Kode	Uraian	Beban-LO	Belanja-LRA	Selisih
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	425.144.430,00	0,00	425.144.430,00
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	804.869.344,00	866.732.618,00	(61.863.274,00)
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	214.392.000,00	0,00	214.392.000,00
Jumlah		**1.444.405.774,00**	**866.732.618,00**	**577.673.156,00**

Penjelasan selisih Beban Barang dan Jasa-LO dengan Belanja dan Jasa-LRA adalah sebagai berikut:

a. Selisih beban pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp425.144.430,00 adalah koreksi atas pekerjaan pengadaan podcast yang direalisasikan dengan belanja modal dimana sebelumnya tercatat sebagai satu paket. Didalam paket tersebut terdapat komponen pekerjaan pembuatan ruang podcast sebesar Rp425.144.430,00 yang dikoreksi menjadi beban pemeliharaan gedung dan bangunan karena tidak memenuhi karakteristik sebagai aset peralatan dan mesin;

b. Selisih beban pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar (Rp61.863.274,00) terdiri atas:
   - Pencatatan belanja dibayar dimuka atas sisa saldo RFID Pertamina yang belum digunakan per 31 Desember 2025 sebesar (Rp11.863.274,00);
   - Pencatatan belanja dibayar dimuka atas voucher bensin hasil konversi sisa saldo RFID Pertamina yang belum digunakan

per 31 Desember 2025 sebesar (Rp50.000.000,00).

c. Selisih beban persediaan bahan untuk pemeliharaan sebesar Rp214.392.000,00 adalah beban yang terbentuk dari pemakaian barang persediaan bahan untuk pemeliharaan (pembelian dari akun belanja barang persediaan), namun karena karakteristik barang persediaannya adalah untuk pemeliharaan, maka atas pemakaian barang persediaan bahan untuk pemeliharaan membentuk beban pemeliharaan.

Kesimpulan selisih antara beban pemeliharaan-LO dan belanja pemeliharaan-LRA diatas adalah karena adanya beban pemeliharaan yang terbentuk dari pekerjaan pemeliharaan ruang podcast yang berasal dari realisasi belanja modal, pengakuan belanja dibayar dimuka, dan beban pemeliharaan yang terbentuk dari pemakaian barang persediaan bahan untuk pemeliharaan.

Beban Perjalanan Dinas Rp44.119.289.396,00

D.6. BEBAN PERJALANAN DINAS

Beban Perjalanan Dinas-LO adalah beban atas biaya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah atau perusahaan untuk membiayai perjalanan keluar tempat kedudukan, baik perseorangan maupun bersama, dalam dan keluar wilayah Republik Indonesia guna kepentingan negara atau perusahaan. Biaya ini mencakup uang harian, transpor, penginapan, dan uang representasi.

Beban Perjalanan Dinas-LO Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 62
Perbandingan Beban Perjalanan Dinas-LO
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam satuan rupiah)

31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / Penurunan	%
44.119.289.396,00	0,00	44.119.289.396,00	0,00

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas-LO dan Belanja Perjalanan Dinas -LRA dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 63
Perbandingan Beban Perjalanan Dinas-LO dengan Belanja Perjalanan Dinas LRA
Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

(dalam satuan rupiah)

Beban Perjalanan Dinas-LO	Belanja Perjalanan Dinas-LRA	Selisih
44.119.289.396,00	44.119.289.396,00	0,00

Berdasarkan tabel diatas, tidak terdapat perbedaan antara beban perjalanan dinas-LO dan belanja perjalanan dinas-LRA.

Rincian beban pegawai-LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, adalah sebagai berikut:

Tabel 64
Rincian Selisih
Beban Perjalanan Dinas-LO dengan Belanja Perjalanan Dinas LRA
Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

(dalam satuan rupiah)

Kode	Uraian	Beban-LO
524111	Beban Perjalanan Biasa	20.449.155.088,00
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	400.790.000,00
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	12.849.905.201,00
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7.043.135.308,00
524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	3.376.303.799,00
Total		**44.119.289.396,00**

Penjelasan atas tabel realisasi belanja perjalanan dalam negeri adalah sebagai berikut:

a. Belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp20.449.155.088,00 merupakan belanja perjalanan dinas luar kota (biaya tiket, hotel, uang harian, taksi) dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi ke daerah seperti ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Pemerintah Daerah maupun ke kantor instansi lainnya;
b. Belanja perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp400.790.000,00 dalam kota merupakan biaya transport lokal dalam rangka koordinasi maupun menghadiri undangan kegiatan instansi lain;
c. Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota sebesar Rp12.849.905.201,00 merupakan belanja atas pelaksanaan kegiatan paket meeting dalam kota seperti FGD, seminar, rapat koordinasi dan lain-lain;
d. Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota sebesar Rp7.043.135.308,00 merupakan belanja atas pelaksanaan paket meeting luar kota seperti FGD, rapat koordinasi dengan instansi daerah dan lain-lain.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp6.001.762.955,00

D.7. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban penyusutan dan amortisasi adalah beban yang diakui akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa aset tetap dan aset

tak berwujud selama masa manfaatnya. Ini merupakan komponen beban non-kas yang dicatat pada akhir periode dalam LO, dihitung menggunakan metode garis lurus untuk mengalokasikan nilai perolehan aset.

Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 65
Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam satuan rupiah)

31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / Penurunan	%
6.001.762.955,00	0,00	6.001.762.955,00	0,00

Perbandingan beban penyusutan dan amortisasi-LO dan kenaikan/penurunan penyusutan dan amortisasi pada Neraca dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 66
Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO
Dengan Kenaikan/Penurunan Penyusutan dan Amortisasi Neraca
Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

(dalam satuan rupiah)

Beban-LO	Kenaikan/Penurunan pada Neraca	Selisih
6.001.762.955,00	(6.247.145.905,00)	(245.382.950,00)

Selisih beban penyusutan sebesar (Rp245.382.950,00) merupakan selisih atas beban penyusutan aset transfer masuk senilai Rp665.438.100,00 berupa 4 Unit PC, 10 Laptop, 10 Printer, 6 Scanner dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum. Selama aset belum dilakukan proses transfer pada aplikasi SAKTI, maka penyusutan dan beban penyusutan tercatat pada satuan kerja asal, dan pada saat perekaman transfer masuk di satker penerima, yang terekam hanya nilai aset dan penyusutannya saja, tidak dengan bebannya karena beban penyusutan sudah tercatat di satker asal.

D.8. KEGIATAN NON OPERASIONAL

D.8.1 Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp60.000,00

Kelompok pendapatan yang masuk dalam kategori Pendapatan Non operasional Lainnya-LO adalah pendapatan yang tidak membentuk pendapatan operasional tahun berjalan karena bukan merupakan pendapatan operasional dari menjalankan tugas dan

fungsi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan seperti pendapatan dari Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara, Tuntutan Perbendaharaan, Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu, Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi, Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs, Pendapatan Perolehan Aset Lainnya dan Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan lain-lain.

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 67
Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -LO
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam satuan rupiah)

31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / Penurunan	%
60.000,00	0,00	60.000,00	0,00

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -LO sebesar Rp60.000,00 adalah atas akun Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan.

Pendapatan ini muncul atas transaksi koreksi kurang catat persediaan ATK yang sudah ada transaksi lanjutan di Tahun 2026, sehingga pencatatan koreksi kurang catat ATK tersebut tidak mengoreksi beban persediaan, melainkan memunculkan akun Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan.

Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp267.000,00

D.8.2 Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari kegiatan non operasional lainnya adalah biaya atau pengeluaran perusahaan/entitas yang tidak terkait langsung dengan aktivitas operasional inti sehari-hari. Beban ini bersifat tidak rutin, tidak teratur, dan dicatat terpisah di laporan keuangan. Contoh: Defisit/kerugian dari penjualan aset non-lancar, kerugian akibat persediaan yang rusak atau usang dan lain-lain.

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 68
Perbandingan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -LO
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam satuan rupiah)

31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / Penurunan	%
267.000,00	0,00	267.000,00	0,00

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -LO sebesar Rp267.000,00 adalah atas akun Beban Penyesuaian Nilai Persediaan.

Pendapatan ini muncul atas transaksi koreksi lebih catat persediaan ATK yang sudah ada transaksi lanjutan di Tahun 2026, sehingga pencatatan koreksi lebih catat ATK tersebut tidak mengoreksi beban persediaan, melainkan memunculkan akun Beban Penyesuaian Nilai Persediaan.



CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN

PENJELASAN ATAS
POS-POS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp0,00

E.1. EKUITAS AWAL

Ekuitas awal adalah nilai kekayaan bersih yang menjadi saldo awal pada awal periode pelaporan. Nilai ini merupakan hasil akumulasi dari surplus atau defisit tahun-tahun sebelumnya dan diperoleh dari saldo akhir ekuitas pada neraca periode pelaporan sebelumnya.

Nilai ekuitas awal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00.

Defisit LO (Rp129.560.354.878,00)

E.2. SURPLUS (DEFISIT) LO

Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Nilai ini mencerminkan kinerja dan kekayaan bersih entitas yang bertambah atau berkurang. Surplus terjadi jika pendapatan lebih besar daripada beban, sedangkan Defisit terjadi jika beban lebih besar daripada pendapatan.

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan karena bukan Kementerian yang berorientasi pendapatan, maka beban lebih besar daripada pendapatan, sehingga posisi Defisit LO.

Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah defisit sebesar (Rp129.560.354.878,00) dan Rp0,00.

Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Rp0,00

E.3. KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas adalah pembetulan kesalahan pencatatan akuntansi pada periode pelaporan sebelumnya yang nilainya dimasukkan langsung ke saldo awal Ekuitas, tanpa melalui pos Surplus/Defisit Laporan Operasional (LO) periode berjalan.

Penyebab umum koreksi, antara lain:

1. **Kesalahan Beban Periode Lalu**: Koreksi kesalahan atas beban (belanja) yang terjadi pada periode sebelumnya yang memengaruhi nilai aset bersih/ekuitas.
2. **Penerimaan Kembali Belanja**: Adanya koreksi kesalahan pengeluaran belanja yang mengakibatkan penerimaan kembali belanja yang tidak berulang dari periode sebelumnya.

3. **Penyesuaian Nilai Aset/Persediaan**: Penyesuaian nilai buku aset, seperti koreksi nilai persediaan atau kapitalisasi aset tetap yang baru ditemukan/dicatat nilainya.
4. **Koreksi Pendapatan**: Kesalahan pencatatan pendapatan di masa lalu yang baru dikoreksi pada tahun berjalan.

Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Transaksi Antar Entitas Rp172.323.375.472,00

E.4. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi antar entitas adalah transaksi keuangan antara dua entitas akuntansi atau pelaporan yang masih berada dalam satu lingkup pemerintahan yang sama.

Nilai transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp172.323.375.472,00 dan Rp0,00.

Rincian transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 69
Rincian Transaksi Antar Entitas
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(dalam satuan rupiah)

Uraian	Jumlah
Ditagihkan ke Entitas Lain	171.915.532.601,00
Diterima dari Entitas Lain	(12.212.279,00)
Transfer Masuk	420.055.150,00
Total	**172.323.375.472,00**

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/ Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).
Pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, DDEL sebesar (Rp12.212.279,00) yang berasal dari transaksi realisasi pendapatan sedangkan DKEL sebesar Rp171.915.532.601,00 yang berasal dari transaksi realisasi belanja.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan

aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.

Rincian transfer masuk untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, adalah sebagai berikut:

Tabel 70
Rincian Transaksi Transfer Masuk
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(dalam satuan rupiah)

Jenis	Uraian	Kuantitas	Entitas Asal	Nilai Aset	Nilai Penyusutan	Nilai Netto
Peralatan dan Mesin	PC Unit	4	Ditjen AHU	148.207.200,00	(37.051.800,00)	111.155.400,00
	Laptop	10	Ditjen AHU	399.933.000,00	(99.983.250,00)	299.949.750,00
	Printer	10	Ditjen AHU	89.370.000,00	(80.420.000,00)	8.950.000,00
	Scanner	6	Ditjen AHU	27.927.900,00	(27.927.900,00)	0,00
Total				**665.438.100,00**	**(245.382.950,00)**	**420.055.150,00**

Ekuitas Akhir Rp42.763.020.594,00

E.5. EKUITAS AKHIR

Nilai ekuitas akhir untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp42.763.020.594,00 dan Rp0,00.

Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan saldo awal ekuitas, surplus/defisit LO, penyesuaian/koreksi nilai tahun berjalan dan transaksi antar entitas.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan penyesuaian terhadap penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip, dasar, aturan, dan praktek spesifik dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan ditetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor SES-PR.01.02-73 Tahun 2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Kebijakan ini menjadi acuan sejak penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025.

F.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

A. Pergantian PPSPM

Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor SES.4-KU.02.03-271 Tahun 2025 tanggal 19 September 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, terhitung per 1 Oktober 2025 telah dilakukan pergantian Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) sebagai berikut:

- Semula: Rudi Hartono (pensiun per 1 Oktober 2025)
- Menjadi: Agung Adi Putro

B. Daftar BMN tidak masuk kedalam Neraca

Terdapat BMN dengan status pinjam pakai (belum dilakukan proses transfer) dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Barang-barang tersebut diterima oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan pada saat masa transisi di Tahun 2024, dalam rangka membantu operasional sehari-hari Kementerian

Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan di Tahun 2024. Sampai dengan periode pelaporan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, status barang-barang tersebut masih pinjam pakai/belum dilakukan proses transfer. Keputusan atas status barang-barang BMN tersebut masih akan diputuskan di kemudian hari.

Daftar barang BMN dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 71
Daftar BMN Tidak Masuk Neraca
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

No	Nama Barang	Jumlah	Instansi Asal
1	Lemari Kayu	1	Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum
2	Lemari Display	3	
3	Pintu Elektrik (pakai akses)	1	
4	Meja Kerja Kayu	5	
5	Kursi Besi/Metal	8	
6	Sice	9	
7	Meja Rapat	2	
8	Meja Makan Kayu	1	
9	Nakas	2	
10	Televisi	1	
11	PC Unit	1	
12	Laptop	2	
13	Meja Kerja Kayu (Menko)	1	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
14	Meja Rapat (Menko)	1	
15	Meja Rapat (Wamneko)	1	
16	Kasur (Menko)	1	
17	Kasur (Wamenko)	1	
18	Camera Digital	1	
19	Handy Talky	18	
20	Sice Model 211	6	
21	Meja Kerja Kayu	6	
22	Mimbar/Podium	2	
23	Kursi Besi/Metal (Staf Khusus & Eselon II0	6	
24	Sice Model 3311	1	
25	Kursi Besi/Metal (Deputi)	3	
26	Meja Kerja Kayu (Deputi)	3	
27	Sice Model 321	3	
28	Kursi Besi/Metal (Seskemenko)	1	

29	Meja Kerja Kayu (Seskemenko)	1	
30	Meja Kerja Kayu (Staf Ahli)	3	
31	Kursi Besi/Metal (Staf Ahli)	3	
32	Sice Model 321	3	

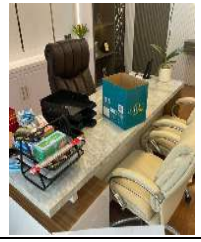
Rincian lengkap daftar BMN diatas terdapat pada Lampiran.

LAMPIRAN

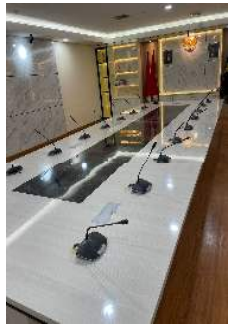
DAFTAR BARANG BELUM DITENTUKAN STATUS PENGGUNAANNYA DARI ITJEN KEMENKUM

Daftar BMN Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum yang digunakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

No	KODE BARANG	NAMA BARANG	NUP	TAHUN PEROLEHAN	MERK / TYPE	HARGA BARANG	FOTO
1	3050104002	Lemari Kayu	31	2015	LEMARI PAKAIAN INFORMA PLUTO STRIPE	12.188.000	
2	3050104020	Lemari Display	1	2023	Lemari Display Ruang Rapat Irjen	18.500.000	
3	3050104020	Lemari Display	2	2023	Lemari Display Ruang Rapat Irjen	18.500.000	
4	3050104020	Lemari Display	3	2023	Lemari Display Ruang Rapat Irjen	18.500.000	
5	3050105057	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	1	2024	Pintu Akses Ruang Irjen	13.030.000	

No	KODE BARANG	NAMA BARANG	NUP	TAHUN PEROLEHAN	MERK / TYPE	HARGA BARANG	FOTO
6	3050201002	Meja Kerja Kayu	35	2015	END TABLE	4.686.000	
7	3050201002	Meja Kerja Kayu	150	2015	END TABLE	4.686.000	
8	3050201002	Meja Kerja Kayu	174	2015	END TABLE	4.686.000	
9	3050201002	Meja Kerja Kayu	43	2024	Meja Kerja Irjen	17.500.000	
10	3050201002	Meja Kerja Kayu	154	2024	Meja Ruang Irjen	8.000.000	
11	3050201003	Kursi Besi/Metal	158	2023	Kursi Tamu Irjen	5.419.370	
12	3050201003	Kursi Besi/Metal	164	2023	Kursi Tamu Irjen	6.991.501	
13	3050201003	Kursi Besi/Metal	208	2023	Kursi Tamu Irjen	14.165.509	
14	3050201003	Kursi Besi/Metal	213	2023	Kursi Tamu Irjen	14.165.509	
15	3050201003	Kursi Besi/Metal	222	2023	Kursi Tamu Irjen	6.991.501	
16	3050201003	Kursi Besi/Metal	338	2023	Kursi Tamu Irjen	5.419.370	
17	3050201003	Kursi Besi/Metal	386	2023	Kursi Tamu Irjen	5.419.370	
18	3050201003	Kursi Besi/Metal	396	2023	Kursi Tamu Irjen	5.419.370	

No	KODE BARANG	NAMA BARANG	NUP	TAHUN PEROLEHAN	MERK / TYPE	HARGA BARANG	FOTO
19	3050201005	Sice	12	2021	Sofa Irjen	12.500.000	
24	3050201005	Sice	34	2021	Sofa Irjen	12.500.000	
20	3050201005	Sice	13	2015	SOFA 3 SEATER	12.100.000	
21	3050201005	Sice	15	2015	SOFA 1 SEATER	3.740.000	
22	3050201005	Sice	16	2015	SOFA 3 SEATER	12.100.000	
23	3050201005	Sice	21	2015	SOFA 1 SEATER	3.740.000	
24	3050201005	Sice	38	2015	SOFA 1 SEATER	3.740.000	
25	3050201005	Sice	53	2015	SOFA 1 SEATER	3.740.000	
26	3050201005	Sice	57	2015	SOFA 1 SEATER	3.740.000	

No	KODE BARANG	NAMA BARANG	NUP	TAHUN PEROLEHAN	MERK / TYPE	HARGA BARANG	FOTO
27	3050201008	Meja Rapat	38	2024	Meja Meeting Custom	75.000.000	
28	3050201008	Meja Rapat	65	2024	Meja Rapat Irjen	12.750.000	
29	3050201019	Meja Makan Kayu	10	2015	MEJA MAKAN IRJEN INFORMA	13.970.000	

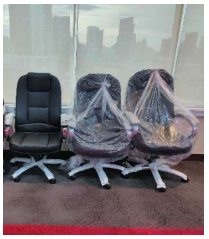
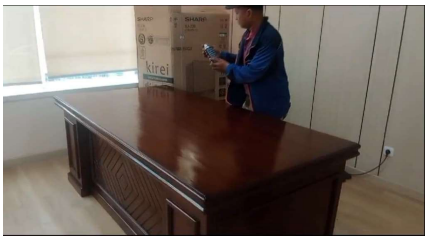
No	KODE BARANG	NAMA BARANG	NUP	TAHUN PEROLEHAN	MERK / TYPE	HARGA BARANG	FOTO
30	3050201026	Nakas	1	2015	INFORMA	899.800	
31	3050201026	Nakas	5	2015	INFORMA	899.800	
32	3050206002	Televisi	7	2021	SAMSUNG PM49	35.000.000	
33	3100102001	P.C Unit	101	2023	Acer Veriton Z4 AIO	35.330.000	
34	3100102002	Lap Top	150	2023	Acer Travelmate P214	19.980.000	
35	3100102002	Lap Top	155	2021	HP Inc Probook 430 G8	14.751.000	

LAMPIRAN

DAFTAR BARANG BELUM DITENTUKAN STATUS PENGGUNAANNYA DARI DITJENPAS KEMENIMIPAS

DATA BARANG

No.	KODE BMN	NAMA BMN	JML	NILAI PEROLEHAN	TOTAL NILAI	KETERANGAN	GAMBAR BARANG
1	3050201002	Meja Kerja Kayu	1	47.685.000	47.685.000	Meja Kerja Menko	
2	3050201008	Meja Rapat	1	16.000.000	16.000.000	Meja Rapat Menko	
3	3050201008	Meja Rapat	1	14.600.000	14.600.000	Meja Rapat Wamenko	
4	3050201016	Kasur/Spring Bed	1	18.900.000	18.900.000	Kasur Menko	
5	3050201016	Kasur/Spring Bed	1	9.670.000	9.670.000	Kasur Wamenko	
6	3060102128	Camera Digital	1	66.844.200	66.844.200	Sony	
7	3060201006	Handy Talky (HT)	18	5.716.500	102.897.000	Hytera	
8	3050201005	Sice	6	11.100.000	66.600.000	Sice Model 211 (Sofa+Meja)	
9	3050201002	Meja Kerja Kayu	6	11.100.000	66.600.000	Meja Kerja Staf Khusus & Eselon II	
10	3050206037	Mimbar/Podium	2	7.014.090	14.028.180	Podium Model Lipat	
11	3050201003	Kursi Besi/Metal	6	4.995.000	29.970.000	Kursi Kerja Staf Khusus & Eselon II	
12	3050201005	Sice	1	21.645.000	21.645.000	Sice (Sofa+Meja) Model 3311	

13	3050201003	Kursi Besi/Metal	3	7.215.000	21.645.000	Kursi Kerja Deputi	
14	3050201002	Meja Kerja Kayu	3	14.430.000	43.290.000	Meja Kerja Deputi	
15	3050201005	Sice	3	17.760.000	53.280.000	Sice (Sofa+Meja) Model 321	
16	3020201003	Kursi Besi/Metal	1	24.975.000	24.975.000	Kursi Kerja Sesmenko	
17	3050201002	Meja Kerja Kayu	1	18.315.000	18.315.000	Meja Kerja Sesmenko	
18	3050201002	Meja Kerja Kayu	3	12.210.000	36.630.000	Meja Kerja Staf Ahli	
19	3050201003	Kursi Besi/Metal	3	5.550.000	16.650.000	Kursi Kerja Staf Ahli	
20	3050201005	Sice	3	12.210.000	36.630.000	Sice (Sofa+Meja) Model 321	   
	Total		**65**		**726.854.380**		

LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA
TAHUN 2025

LAPORAN KINERJA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA





2025

RAPAT TINGKAT MENTERI PENYELESAIAN KASUS NAVAYO - 20 MARET 2025





TRANSFER OF PRISONER MARY JANE KE FILIPINA- 02 JANUARI 2025





TRANSFER OF PRISONER SERGE ARESKI KE PERANCIS - 04 FEBRUARI 2025





TRANSFER OF PRISONER LINDSAY DAN SHAHAB KE INGGRIS - 6 NOVEMBER 2025





TRANSFER OF PRISONER SIEGFRIED DAN ALI KE BELANDA - 8 DESEMBER 2025





PERESMIAN MEMORIAL LIVING PARK RUMOH GEUDONG DI PIDIE - 10 JULI 2025





AKSI PENANGANAN KERUSUHAN DI BULAN AGUSTUS - 9 SEPTEMBER 2025





RAPAT TINGKAT MENTERI RUU PEMINDAHAN NARAPIDANA - 19 AGUSTUS 2025






RAPAT TINGKAT MENTERI PINJAMAN ONLINE ILEGAL - 21 JANUARI 2025





AUDIENSI MENKO DENGAN KOALISI MASYARAKAT SIPIL TERKAIT KODIFIKASI RUU PEMILU - 16 SEPTEMBER 2025





KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk perwujudan pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dokumen ini menyajikan capaian kinerja, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil yang telah dicapai dalam tahun anggaran 2025, serta kendala yang dihadapi.

Kami menyadari bahwa keberhasilan program-program yang telah terlaksana dalam laporan ini tidak lepas dari dukungan dan kerjasama yang baik dari kementerian teknis di dalam koordinasi kami. Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang transparan mengenai kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja pada tahun yang akan datang.

Jakarta, Februari 2026
Menteri Koordinator Bidang Hukum,
Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M. Sc.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR iii
DAFTAR TABEL iv
PERNYATAAN TELAH DIREVIU v
RINGKASAN EKSEKUTIVE vi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2
C. Maksud dan Tujuan 7
D. Aspek Strategis 7
E. Isu Strategis 8
F. Sistematika Laporan 9
BAB II PERENCANAAN KINERJA 12
A. Rencana Strategis 12
B. Perjanjian Kinerja 16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 19
A. Capaian Kinerja Organisasi 19
B. Capaian Kinerja Anggaran 32
C. Capaian Kinerja Lainnya 37
BAB IV PENUTUP 42
A. Kesimpulan 42
B. Saran 45
LAMPIRAN 45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan	vii
Gambar 2	Realisasi Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Tahun 2025	viii
Gambar 3	Kegiatan Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasayrakatan	ix
Gambar 1.1	Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyakatan	4
Gambar 2.1	Perjanjian Kinerja Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarkatan Tahun 2025	17

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Capaian Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025	vii
Tabel 2.1	Matriks Priotitas Nasional Tahun 2025	13
Tabel 2.2	Matrik Rencana Kerja Tahun 2025	13
Tabel 3.1	Capaian Rincian Output Prioritas Nasional K/L dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan	20
Tabel 3.2	Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2025 Sasaran Strategis 1	22
Tabel 3.3	Progran/kegiatan menunjang keberhasilan	24
Tabel 3.4	Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2025 Sasaran Strategis 2	27
Tabel 3.5	Realisasi Anggaran Tahun 2025	32
Tabel 3.6	Akuntabilitas Keuangan Tahun 2025	33
Tabel 3.7	Hubungan Capaian Kinerja Dengan Anggaran	33
Tabel 3.8	Hubungan Capaian Kinerja Dengan Realisasi Anggaran	34
Tabel 3.9	Penilaian IKPA Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarkatan	35
Tabel 3.10	Kinerja Pelaksanaan Anggaran	37
Tabel 3.11	Kinerja Perencanaan Anggaran	37
Tabel 3.12	Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	37
Tabel 3.13	Identifikasi isu	38
Tabel 4.1	Target Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarkatan Tahun 2026	43

PERYATAAN TELAH DIREVIU

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk tahun 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara Akurat, Andal dan Valid.

Berdasarkan reviu kami tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 23 Februari 2026

Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan

R. Natanegara K.P.

RINGKASAN EKSEKUTIVE

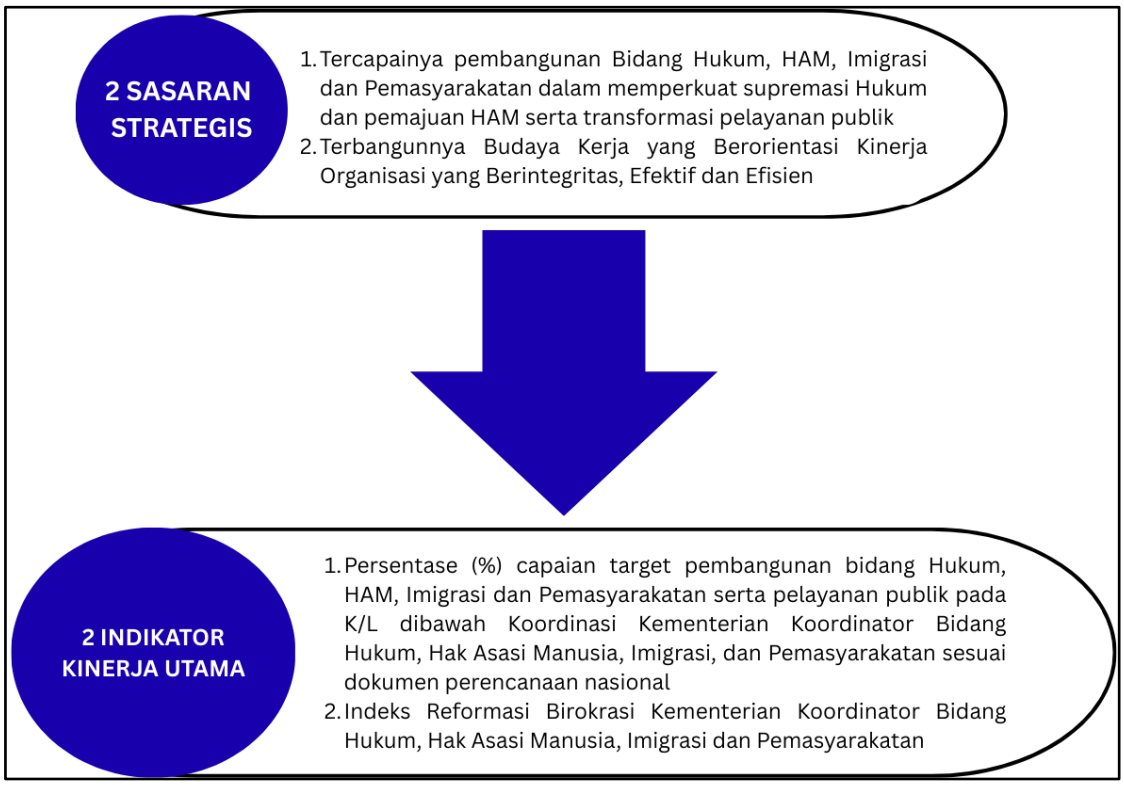
Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Laporan ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung oleh penggunaan sumber daya secara optimal, transparan, dan akuntabel. Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan didefinisikan sebagai perwujudan nyata atas efektivitas fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di 4 (empat) Bidang strategis yaitu Bidang Hukum, Bidang Hak Asasi Manusia (HAM), Bidang Keimigrasian, dan Bidang Pemasyarakatan. Capaian ini bukan sekadar kumpulan angka statistik sektoral, melainkan sebuah ukuran sejauh mana integrasi kebijakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, penghormatan HAM, kedaulatan wilayah melalui fungsi imigrasi, serta keberhasilan reintegrasi sosial dalam sistem pemasyarakatan.

Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025. Seluruh sasaran strategis (gambar 1) yang dituangkan dalam PK Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan merupakan kinerja tahun pertama sejak dibentuk oleh presiden melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Gambar 1 Sasaran Strategis Kementerian Koordinator

Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan



Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang baik. Capaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Capaian Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Tahun 2025

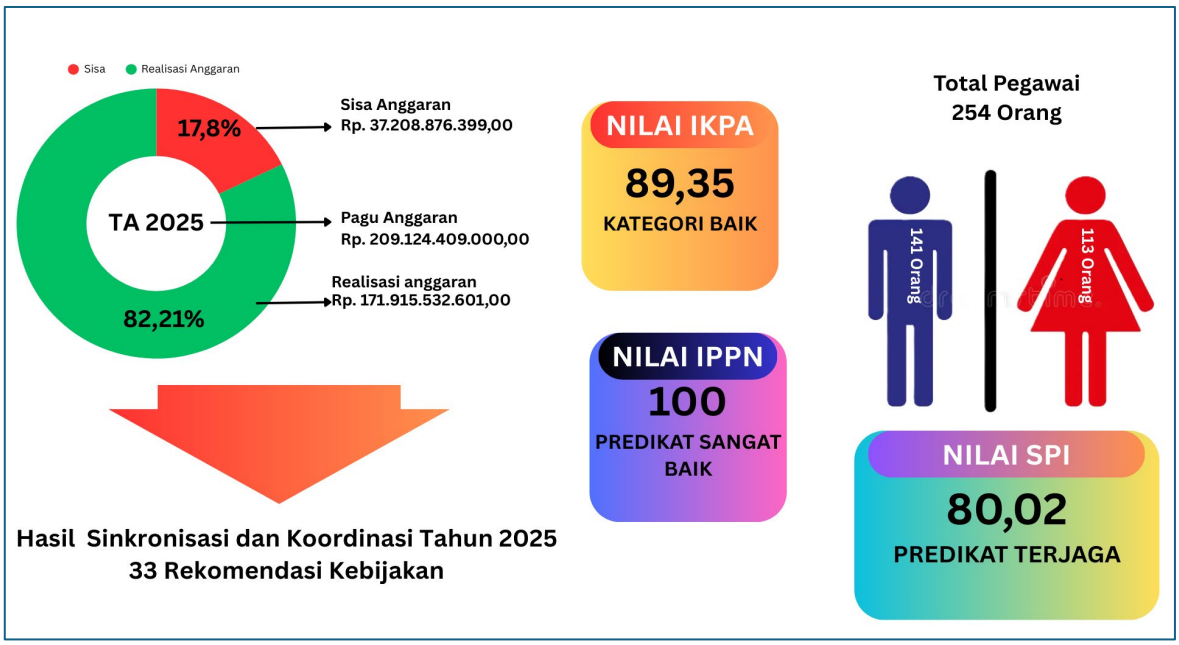
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)
1	Tercapainya pembangunan Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memperkuat supremasi Hukum dan pemajuan HAM serta transformasi pelayanan publik	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan serta pelayanan publik pada K/L dibawah Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sesuai dokumen perencanaan nasional	85	Persentase	91,30	107,41%
2	Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang	85	Indeks	-	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)
	Berintegritas, Efektif dan Efisien	Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan				

Penetapan Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2025 NOMOR: SP DIPA-130.01-0/2025. Pada tahun 2025 Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan mendapat pagu anggaran sebesar Rp.209.124.409.000,00 (dua ratus sembilan miliar seratus dua puluh empat juta empat ratus sembilan ribu rupiah). Per tanggal 31 Desember 2025 Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan berhasil merealisasikan anggaran tersebut sebesar Rp.171.915.532.601,00 (seratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu enam ratus satu rupiah) atau sebesar 82,21%.

Capaian - capaian kinerja anggaran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan tergambarkan pada gambar berikut

Gambar 2 Realisasi Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Tahun 2025



Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dengan sebesar **89,35 (kategori baik)**, nilai tersebut didapat melalui aplikasi OMSPAN Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dengan nilai **100 (predikat sangat baik)** nilai tersebut disampaikan oleh Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas). Hasil pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi, dan Pemasyarakatan dengan nilai **80,02 (predikat terjaga)**.

Hasil sinkronisasi dan koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarkatan Tahun 2025 menghasilkan sebanyak 33 rekomendasi kebijakan disusun melalui proses sinkronisasi dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dengan penelaahan terhadap isu-isu strategis di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan. Rekomendasi tersebut mencakup antara lain transparansi beneficial ownership, interoperabilitas data, pembaruan regulasi, keadilan restoratif, pemajuan HAM, perlindungan pekerja migran, serta penguatan layanan keimigrasian dan pemasyarakatan.

Capaian - capaian tersebut diatas merupakan kinerja Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang didukung oleh sumber daya manusia sejumlah 254 orang, terdiri 141 orang pria dan 113 orang wanita.

Gambar 3 Kegiatan Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyakatan



KEMENKO
KUMHAM
IMIPAS

Laporan Kinerja 2025

BAB I

Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 diterbitkan pada pada 10 Februari 2025. RPJNM 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan menjadi langkah awal untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Pada periode ini, Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian prioritas serta penanganan secara sistematis.

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan berawal dari pengumuman Kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto tanggal 20 Oktober 2024 dan pelantikan Menteri dan Wakil Menteri pada tanggal 21 Oktober 2025. Dasar hukum pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan hadir untuk merespons tantangan yang ada melalui sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan. Hasil dari sinkronisasi dan koordinasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan diwujudkan dalam perumusan kebijakan-kebijakan strategis yang responsif, terintegrasi, dan solutif sebagai jawaban atas berbagai isu strategis yang memerlukan penanganan komprehensif dan lintas sektor.

Pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian tahun 2025 berpedoman kepada delapan prioritas nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 supaya fokus pada isu strategi nasional sehingga pelaksanaan tugas tetap berada dalam koridor arah pembangunan yang ditetapkan pemerintah, menjamin keselasaran kebijakan, serta meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas. Prioritas nasional merupakan implementasi langsung dari Asta Cita Presiden yang selaras dengan agenda

transformasi RPJPN tahun 2025-2045 sehingga seluruh kebijakan pemerintah berjalan terarah dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi, dan Pemasyarakatan tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi, dan Pemasyarakatan atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan selama tahun 2025. Dengan menyusun Laporan Kinerja, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan mewujudkan prinsip transparan dan akuntabilitas yang diamanahkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sebagai lembaga publik kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan tahun 2025 merupakan penjabaran atas capaian kinerja selama tahun 2025 yang menjelaskan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan baik dalam perencanaan nasional maupun yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja. Laporan Kinerja disusun setiap tahun sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja juga digunakan sebagai dasar upaya perbaikan perencanaan kinerja dan pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan ke depannya.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan memiliki tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, menyelenggarakan fungsi:

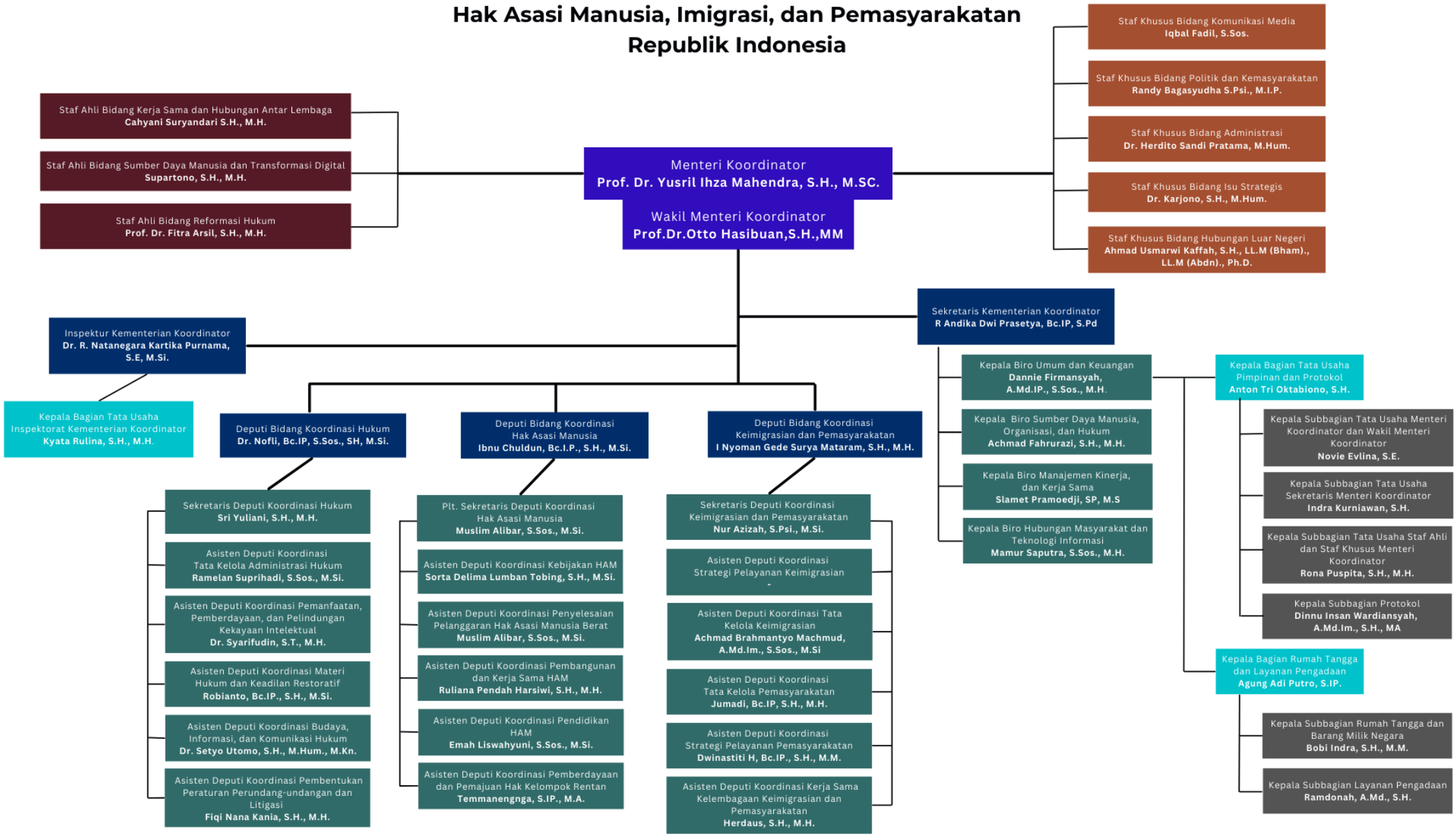
a. Sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan;
b. Perumusan dan penetapan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan;
c. Pengelolaan dan penanganan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan;
d. Koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator;
e. Pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam sidang kabinet;
f. Penyelesaian permasalahan di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan;
h. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator;
i. Pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator; dan
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Menteri dan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dibantu oleh:

a. Sekretaris Kementerian Koordinator;
b. Deputi Bidang Koordinasi Hukum;
c. Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia;
d. Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan;
e. Staf Ahli Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga;
f. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Transformasi Digital; dan
g. Staf Ahli Bidang Reformasi Hukum.

Struktur Organisasi

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia



1. **Sekretariat Kementerian Koordinator**

Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

a. Koordinasi kegiatan Kementerian Koordinator;
b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Koordinator;
c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Koordinator;
d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan advokasi hukum;
f. Koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
g. Pengelolaan data dan informasi; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

2. **Deputi Bidang Koordinasi Hukum**

Deputi Bidang Koordinasi Hukum mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang hukum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Deputi Bidang Koordinasi Hukum menyelenggarakan fungsi:

a. Sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang hukum;
b. Perumusan dan penetapan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang hukum;
c. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hukum;
d. Pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Koordinasi Hukum; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

3. Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia

Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang hak asasi manusia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

a. Sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang hak asasi manusia;
b. Perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang hak asasi manusia;
c. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hak asasi manusia;
d. Pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

4. Deputi Bidang Koordinasi Imigrasi dan Pemasyarkatan

Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

a. Sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan;
b. Perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan;
c. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan;
d. Pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator

C. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Laporan Kinerja adalah adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosur*e) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Penyusunan laporan kinerja ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip"*good governance*".

Adapun tujuan pelaporan kinerja adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
3. Sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan perencanaan, dengan fokus pada perencanaan jangka pendek dan jangka menengah;
4. Mendorong penguatan akuntabilitas instansi pemerintah agar dapat menjalankan fungsi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

D. Aspek Strategis

Berdasarkan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Adapun aspek strategis sebagai berikut:

1. Harmonisasi dan Reformasi Regulasi Nasional
   Mewujudkan sistem regulasi yang harmonis, tidak tumpang tindih, dan mendukung iklim investasi serta kepastian hukum melalui penguatan fungsi koordinasi harmonisasi regulasi lintas Kementerian/Lembaga, digitalisasi sistem legislasi nasional, dan deregulasi dan simplifikasi regulasi strategis.
2. Peningkatan Indeks Pembangunan Hukum (IPH)
   Meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Hukum (IPH) melalui standarisasi indikator Indeks Pembangunan Hukum (IPH) nasional dan daerah, integrasi Indeks Pembangunan Hukum dalam sistem perencanaan daerah, dan penguatan kapasitas aparatur penegak hukum.
3. Penguatan Koordinasi Penegakan Hukum dan Anti-Korupsi

Mewujudkan sistem penegakan hukum yang adil, transparan, dan bebas intervensi melalui penguatan forum koordinasi lintas aparat penegak hukum, sistem monitoring penanganan perkara strategis nasional, digitalisasi pelaporan dan pengawasan penegakan hukum, dan perlindungan saksi dan korban.

4. Penguatan Sistem Perlindungan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia
   Menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM secara sistemik melalui *mainstreaming* HAM dalam kebijakan nasional dan daerah, penyelesaian pelanggaran HAM berat secara berkeadilan, penguatan mekanisme pengaduan HAM digital, dan perlindungan kelompok rentan.
5. Transformasi Sistem Keimigrasian Modern
   Mewujudkan sistem keimigrasian yang selektif, adaptif, dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui digitalisasi layanan imigrasi, sistem border control berbasis AI dan biometrik, penguatan pengawasan Warga Negara Asing berbasis risiko dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
6. Reformasi Sistem Pemasyarakatan
   Mewujudkan sistem pemasyarakatan yang humanis, rehabilitatif, dan produktif melalui pengurangan *overcapacity* Lapas melalui kebijakan alternatif pemidanaan seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penguatan pembinaan berbasis vokasi, dan revitalisasi sarana prasarana Lapas.
7. Transformasi Digital Tata Kelola Hukum
   Mewujudkan ekosistem hukum digital terintegrasi nasional melalui integrasi sistem informasi hukum nasional dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi.
8. Penguatan Budaya Hukum dan Akses Keadilan
   Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan akses terhadap bantuan hukum melalui edukasi hukum berbasis digital dan kurikulum nasional, penguatan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, program desa sadar hukum, serta mediasi dan *restorative justice*.

E. Isu Strategis

Isu strategis di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, sebagai berikut:

1. Isu Tata Kelola Royalti Lagu dan/atau Musik;
2. Tata Kelola Pengungkapan *Beneficial Ownerships* (BO) di Indonesia menuju Transparansi Korporasi dan Kepatuhan terhadap Standar *Financial Action Task Force* (FATF);

3. Penguatan Substansi Hukum Pidana yang Mengedepankan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)
4. Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Migran Indonesia di daerah;
5. Sinkronisasi dan Koordinasi Sosialisasi Pembaharuan Hukum Pidana Melalui Kegiatan *Training of Facilitator* (ToF) Implementasi Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP;
6. Data korban Pelanggaran HAM yang Berat yang akan dipulihkan perlu dilakukan sinkronisasi atas data yang berasal dari Komnas HAM dan LPSK;
7. Belum optimalnya regulasi/kebijakan yang inklusif anak sesuai perkembangan zaman;
8. Sinergitas Pengawasan Keamanan & Kedaulatan Batas Wilayah dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN);
9. Penyelesaian Penanganan *Overstaying* Tahanan di Rutan dan Lapas;
10. Persiapan Implementasi Undang - Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
11. Terbatasnya akses keimigrasian bagi masyarakat dan rendahnya efektivitas pengawasan serta kualitas pelayanan di sejumlah daerah; dan
12. Terbatasnya jangkauan layanan balai pemasyarakatan di sejumlah daerah sehingga menghambat implementasi KUHP baru dan pelaksanaan pidana kerja sosial.

F. Sistematika Laporan

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor SES-29.PR.03 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR : Menyajikan pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas mengenai laporan kinerja yang disahkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

RINGKASAN EKSEKUTIF : Menyajikan ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.

BAB I : **PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara singkat latar belakang, tugas, fungsi dan struktur organisasi, maksud dan tujuan, aspek strategis, isu strategis, sistematika laporan.

BAB II : **PERENCANAAN KINERJA**

Menjelaskan Rencana Strategis yang berisi ringkasan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Sasaran Strategis, Target Kinerja, dan Perjanjian Kinerja yang berisi lembar/dokumen penugasan untuk melaksanakan program/kegiatan.

BAB III : **AKUNTABILITAS KINERJA**

Menguraikan capaian kinerja organisasi, analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan upaya yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dalam mencapai Target Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja. Selain memberikan penjelasan dan analisis capaian kinerja, setiap indikator kinerja juga dilakukan analisis sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

BAB IV : **PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan dan saran menyeluruh Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan pada tahun 2025 serta upaya/strategi dalam meningkatkan capaian kinerja tahun 2026.

LAMPIRAN : Berisi data-data lainnya yang diperlukan

KEMENKO
KUMHAM
IMIPAS

Laporan Kinerja 2025

BAB II

Perencanaan Kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Pada pelaksanaan anggaran tahun 2025 Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Nomor : SP DIPA-130.01-0/2025 Tahun Anggaran 2025 serta berdasarkan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025 yang tertuang dalam aplikasi KRISNA Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dengan mencakup Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.

Visi dan Misi Tahun 2025

Visi:

"Terwujudnya stabilitas hukum dan perlindungan HAM dalam mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"

Guna mewujudkan visi tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menetapkan misi yang diharapkan menjadi arah pelaksanaan kegiatan yaitu:

1) **Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk menyelaraskan Pembangunan hukum berkualitas dan Implementasi Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia;**
2) **Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.**

Tujuan Tahun 2025

Tujuan yang akan dicapai dalam koordinasi kebijakan bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan :

1) Terwujudnya pembangunan hukum berkelanjutan dan Implementasi Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia;
2) Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sasaran Strategis Tahun 2025

1) Tercapainya pembangunan Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memperkuat supremasi Hukum dan pemajuan HAM serta transformasi pelayanan publik;
2) Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien.

Prioritas Nasional Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, mencanangkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN), dan di antara 8 (delapan) PN tersebut Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,Imigrasi dan Pemasyarakatan diberikan peran pencapaian output dalam menyukseskan 1 (satu) PN, yaitu:

- PN 7 → Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan;

Tabel 2.1 Matriks Priotitas Nasional Tahun 2025

No	NOMENKLATUR	TARGET
PROGRAM PRIORITAS: PENGUATAN KELEMBAGAAN, PELAYANAN DAN PENEGAKAN HUKUM		
KEGIATAN PRIORITAS: PENERAPAN DAN PENEGAKAN HUKUM		
PROYEK PRIORITAS: PENERAPAN DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERPADU DENGAN DUKUNGAN TI DAN BERPERSPEKTIF RESTORATIF		
1	Rekomendasi Kebijakan Penguatan Substansi Hukum Pidana yang Mengedapankan Keadilan Restoratif	1 Rekomendasi Kebijakan

Rencana Kerja Tahun 2025

Berikut Rencana Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 2.2 Matrik Rencana Kerja Tahun 2025

NO	RENCANA KERJA
Program: Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	
Koordinasi Bidang Hukum	
1	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Tata Kelola Administrasi Hukum
2	Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan, Pemberdayaan, dan Pelindungan

NO	RENCANA KERJA
	Kekayaan Intelektual
3	Rekomendasi Kebijakan Materi Hukum dan Keadilan Restoratif
4	Rekomendasi Kebijakan Budaya, Informasi, dan Komunikasi Hukum
5	Rekomendasi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundangundangan dan Litigasi
6	(PN) Rekomendasi Kebijakan Penguatan Substansi Hukum Pidana yang Mengedepankan Keadilan Restoratif
Koordinasi Bidang Hak Asasi Manusia	
1	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Kebijakan HAM
2	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat
3	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Pembangunan dan Kerja Sama HAM
4	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan
5	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Pendidikan HAM
Koordinasi Bidang Imigrasi dan Pemasyarkatan	
1	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian
2	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian
3	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Tata Kelola Pemasyarakatan
4	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Strategi Pelayanan Pemasyarakatan
5	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Kerjasama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasyarakatan
Dukungan Manajemen Sekretariat Kementeriaan Koordinator	
1	Layanan BMN
2	Layanan Protokoler
3	Layanan Umum
4	Layanan Perkantoran
5	Layanan Sarana dan Prasarana Internal
6	Layanan Manajemen Keuangan
7	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan

NO	RENCANA KERJA
8	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
9	Layanan Data dan Informasi
10	Layanan Pengelolaan Komunikasi dan Peliputan
11	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
12	Layanan Manajemen SDM
13	Layanan Manajemen Kinerja
14	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Kementerian
15	Layanan Kerja Sama
16	Penyusunan Informasi Kinerja dan Rencana Strategis Kementerian
17	Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian
18	Layanan Reformasi Kinerja
19	Layanan Audit Internal
20	Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi D.K.I. Jakarta

Rencana Strategis Tahun 2026 - 2029

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan menyusun dan menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025 - 2029 mencakup Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis yang pelaksanaannya dimulai pada Tahun 2026.

Visi dan Misi Tahun 2026 - 2029

Visi:

"Terwujudnya Sinergi Pembangunan Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berkeadilan dan inklusif dalam mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"

Misi:

1) Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan bidang Hukum, Hak Asasi manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan
2) Melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mewujudkan tata Kelola pemerintah yang bersih

Tujuan Tahun 2026 - 2029

1) Terwujudnya keselarasan strategis pelaksanaan pembangunan bidang Hukum, Hak Asasi manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan
2) Meningkatnya profesionalisme dan akuntabilitas Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan

Sasaran Strategis Tahun 2026 - 2029

1) Tercapainya pembangunan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memperkuat supremasi Hukum dan pemajuan HAM serta transformasi pelayanan publik
2) Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Menteri Koordinator Bidang Kumham Imipas tahun 2025 disusun berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Sp-Dipa) Induk Nomor: SP DIPA-130.01-0/2025 Tahun Anggaran 2025. Penetapan indikator kinerja dan target kinerja berdasarkan target kinerja yang terdapat pada dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L). Sehingga pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarkatan Tahun 2025

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yusril Ihza Mahendra

Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyakatan

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Mei 2025

Menteri Koordinator Bidang Hukum,
Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyakatan,

Yusril Ihza Mahendra

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tercapainya Pembangunan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyakatan dalam memperkuat supremasi Hukum dan pemajuan HAM serta transformasi pelayanan publik	Persentase capaian target pembangunan bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan serta pelayanan publik pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai dokumen perencanaan nasional	85%
2.	Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan	85 Indeks

No.	Program	Anggaran
1.	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	Rp. 45.420.393.000,-
2.	Dukungan Manajemen	Rp. 163.704.016.000,-
Total Anggaran		**Rp. 209.124.409.000,-**

Jakarta, 1 Mei 2025

Menteri Koordinator Bidang Hukum,
Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyakatan,

Yusril Ihza Mahendra

KEMENKO
KUMHAM
IMIPAS

Laporan Kinerja 2025

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan didefinisikan sebagai perwujudan nyata atas efektivitas fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di 4 (empat) Bidang strategis yaitu Bidang Hukum, Bidang Hak Asasi Manusia (HAM), Bidang Keimigrasian, dan Bidang Pemasyarakatan. Capaian ini bukan sekadar kumpulan angka statistik sektoral, melainkan sebuah ukuran sejauh mana integrasi kebijakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, penghormatan HAM, kedaulatan wilayah melalui fungsi imigrasi, serta keberhasilan reintegrasi sosial dalam sistem pemasyarakatan.

Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan merupakan kinerja tahun pertama sejak dibentuk oleh presiden melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029; dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Perjanjian Kinerja Menteri Koordinator Bidang Kumham Imipas tahun 2025 disusun berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Sp-Dipa) Induk Nomor : SP DIPA-130.01-0/2025 Tahun Anggaran 2025. Penetapan indikator kinerja dan target kinerja berdasarkan target kinerja yang terdapat pada dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L). Sehingga pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Tercapainya pembangunan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memperkuat supremasi Hukum dan pemajuan HAM serta transformasi pelayanan publik

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1: Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan serta pelayanan publik pada K/L

dibawah Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sesuai dokumen perencanaan nasional.

Target Kinerja Sasaran Strategis 1: 85 %

Persentase capaian target pembangunan bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan pada K/L di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sesuai dengan Dokumen Perencanaan Nasional adalah persentase rekomendasi yang dihasilkan dalam rangka mendukung pembangunan bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai dengan Capaian Target Rencana Kerja Pemerintah Prioritas Nasional (RKP PN) Tahun 2025. Persetase tersebut terbentuk berdasarkan capaian RKP PN K/L dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan:

Tabel 3.1 Capaian Rincian Output Prioritas Nasional
K/L dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

NO	RINCIAN OUTPUT PRIORITAS NASIONAL	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
KEMENTERIAN HUKUM				
1	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	6263 orang	9193 orang	146,78% Tarcapai
2	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	839 Kelompok Masyarakat	3784 Kelompok Masyarakat	451,01% Tercapai
3	Sistem Informasi Tata Kelola Regulasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	100% Tercapai
4	Pelatihan Fungsional Analis Hukum Pusat dan Daerah	120 Orang	120 Orang	100% Tercapai
5	Penghitungan Indeks Reformasi Hukum (IRH)	1 Dokumen	1 Dokumen	100% Tercapai
6	RPP Pelaksanaan UU KUHP	3 RPP	3 RPP	100% Tercapai
7	*Training of Facilitator* (ToF) Implementasi KUHP	342 Orang	342 Orang	100% Tercapai
8	Naskah Urgensi Dasar Hukum Pengesahan (Aksesi) HCCH 1965 *Service Convention*	1 Rekomendasi Kebijkan	1 Rekomendasi Kebijkan	100% Tercapai
9	Penyusunan Kebijakan Pengembangan Badan Usaha	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi	100% Tercapai

NO	RINCIAN OUTPUT PRIORITAS NASIONAL	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	LLP		Kebijakan	
10	Penyusunan Naskah Konsepsi Rancangan Peraturan Presiden mengenai Roadmap Pengembangan KI di Indonesia	1 NSPK	1 NSPK	100% Tercapai
11	RUU KUH Acara Perdata	1 RUU	1 RUU	100% Tercapai
12	RUU Kepailitan	1 RUU	Progress 58%	58% Tidak Tercapai
13	RUU Jaminan Benda Bergerak	1 RUU	1 RUU	100% Tercapai
14	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	1 RUU	1 RUU	100% Tercapai
KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA				
15	Rekomendasi Analisis Peraturan Perundang-Undangan dari Perspektif HAM - Pusat	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100% Tercapai
16	Penyusunan Profil Pembangunan HAM - Pusat	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	100% Tercapai
17	Indeks HAM Indonesia - Pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	100% Tercapai
18	Pedoman dan Penguatan PUU Pengarustamaan HAM	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100% Tercapai
19	Pendidikan HAM bagi K/L/D - Pusat	259 Lembaga	243 Lembaga	93,82% Tidak Tercapai
20	Pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM - Pusat	350 Lembaga	487 Lembaga	139,14% Tercapai
21	Strategi Nasional Bisnis dan HAM	54 Lembaga	59 Lembaga	109,26% Tercapai

NO	RINCIAN OUTPUT PRIORITAS NASIONAL	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN				
22	Layanan Pemanfaatan Data SPPT-TI Bidang Permasyarakatan	1 Data	1 Data	100% Tercapai
23	Penyelenggaraan Program Kewirausahaan Unit Usaha dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100% Tercapai

1. **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025**

   Berkenaan dengan dapat disimpulkan bahwa capaian dari 23 RO PN, 21 RO PN tercapai dengan Realisasi Kinerja 91,30%, sehingga dapat dilakukan perhitungan capaian berdasarkan Rumus:

$$Realisasi\ Kinerja: \frac{Jumlah\ RO\ yang\ tercapai}{Jumlah\ seluruh\ RO}\ x\ 100\%$$

$$Realisasi\ Kinerja: \frac{21}{23}\ x\ 100\% = 91{,}30\%$$

   Sehingga berdasarkan Realisasi Kinerja dapat dihitung Persentase Pencapaian Target sebagai berikut:

$$Persentase\ Pencapaian\ Target: \frac{Realisasi}{Rencana}\ x\ 100\%$$

$$Persentase\ Pencapaian\ Target: \frac{91{,}30\ \%}{85\%}\ x\ 100\% = 107{,}41\%$$

Tabel 3.2 Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2025

Sasaran Strategis 1

INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI / KETERANGAN
Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan serta pelayanan publik pada K/L dibawah Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sesuai dokumen perencanaan nasional	85	Persentase	91,30	107,41%	Tercapai

2. **Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

   Realisasi kinerja tidak dapat dibandingkan karena pada Tahun 2024 Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarkatan baru berdiri.

3. **Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

   Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025 - 2029, Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis Tahun 2025 berbeda dengan Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis Tahun 2026 - 2029, sehingga realisasi kinerja tidak dapat dibandingkan.

4. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional (jika ada)**

   Realisasi tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional.

5. **Analisis penyebab keberhasilan**

   Penyebab keberhasilan pencapaian target, sebagai berikut:

   a. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan;
   b. Pengelolaan dan penanganan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan;
   c. Dalam mengatasi isu-isu Strategis di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan telah menyampaikan Rekomendasi Kebijakan yang mendukung pencapaian target pembangunan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan;

6. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

   Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan instansi pemerintah. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan tingkat pencapaian

kinerja terhadap penggunaan sumber daya, baik anggaran, sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun waktu pelaksanaan.

Berdasarkan pencapaian target indikator kinerja dimaksud, realisasi anggaran sebesar Rp.136.366.715.409,00 (83,30%) dari total pagu anggaran sebesar Rp.163.704.016.000,00. Sementara itu, realisasi target kinerja sebesar 91,30% dari target 85% sehingga persentase capaian kinerja menjadi 107,41%. Hal ini menunjukkan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan mampu mencapai target kinerja dengan penggunaan anggaran yang relatif lebih rendah, sehingga mencerminkan tingkat efisiensi yang baik.

Dari aspek sumber daya manusia, pelaksanaan program didukung oleh 254 pegawai dengan tingkat produktivitas yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Optimalisasi pembagian tugas, peningkatan kompetensi melalui pelatihan, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan efisiensi kerja pegawai.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Untuk menunjang keberhasilan target pada indikator sasaran strategis dimaksud Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan telah melaksanakan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Kedeputian untuk mendukung dan memastikan pencapaian target pada RKP PN Tahun 2025 bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.3 progran/kegiatan menunjang keberhasilan

BIDANG HUKUM	BIDANG HAK ASASI MANUSIA	BIDANG IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
● Penyelarasan sistem hukum nasional dengan standar OECD (*Organisation for Economic Cooperation and Development*); ● Reformasi kebijakan investasi dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha	● Koordinasi pelaporan berbagai instrumen HAM internasional dan membentuk Kelompok Kerja Pelaporan HAM dan Mekanisme HAM Internasional; ● Implementasi Asta Cita dalam pengarusutamaan	● Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); ● Pengawasan Perlintasan Batas Negara dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN);

BIDANG HUKUM	BIDANG HAK ASASI MANUSIA	BIDANG IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
(termasuk rekomendasi revisi UU Arbitrase & APS dan Tata Kelola *Beneficial Ownership*); ● Pemrakarsa Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara; ● Koordinator utama rekomendasi kebijakan hukum pidana berbasis keadilan restoratif; ● Penerima usulan revisi RUU Pemilu; ● Pembahasan tata kelola royalti musik dan/atau lagu Indonesia; ● Tindak lanjut arahan Presiden RI terkait pinjaman online ilegal; ● Pengawalan sengketa hukum internasional dengan Navayo International AG; ● Rekomendasi penguatan kelembagaan pelaksanaan jaminan produk halal dan pembentukan Country Halal Manager di luar negeri; ● Menyusun Peraturan Pemerintah yang mengatur teknis	HAM menuju Indonesia Emas 2045; ● Penyesuaian regulasi terkait peran K/L dalam rangka Pengarusutamaan HAM dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ● Peningkatan kompetensi materi muatan HAM berkelanjutan bagi Pejabat Manajerial dan Non manajerial ● Mendorong kepastian proses penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM berat yang berkasnya telah lengkap melalui mekanisme yudisial, khususnya yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM ● Mendorong terbentuknya regulasi/kebijakan khusus ● perempuan/gender dan anak di tingkat Pusat. ● Mendorong integrasi program pelindungan perempuan dan anak ke dalam rencana	● Penanganan *Persons of Filipino Descent* (PFDs) di Indonesia dan Penegasan Status Kewarganegaraan R.I. ● Tata Kelola Hak Kesehatan dan Akses Pelayanan Kesehatan bagi Tahanan, Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Narapidana, dan Anak Binaan ● Penyelesaian Penanganan *Overstaying* Tahanan di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan ● *Transfer of Sentenced Person* (TSP) ● Persiapan Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana ● Peningkatan Program Pembinaan Narapidana dan Asimilasi Kerja Ketahanan Pangan ● Penguatan Kerja Sama Kelembagaan

BIDANG HUKUM	BIDANG HAK ASASI MANUSIA	BIDANG IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana, mulai dari penerapan mediasi penal pada setiap tahapan pemeriksaan perkara, keadilan restoratif melalui putusan, hingga pelaksanaan keadilan restoratif pada tahap eksekusi ● Penguatan Tata Kelola Pengungkapan Beneficial Ownerships (BO) di Indonesia menuju Transparansi Korporasi dan Kepatuhan terhadap Standar Financial Action Task Force (FATF) ● Pengawalan Tindak Lanjut Penyusunan Peta Jalan Kekayaan Intelektual Nasional	pembangunan lintas sektor. ● Mendorong pembentukan sistem monitoring dan evaluasi penguatan HAM secara online dan terintegrasi serta penyediaan database Penguatan/ Pendidikan HAM nasional.	dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Peningkatan Status Unit Kerja dan Pembentukan Satuan Kerja Keimigrasian ● Mendorong penyusunan RUU Keamanan Laut.

Sasaran Strategis 2: Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien

Indikator Sasaran Strategis 2: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan

Target Kinerja: 85 Indeks

Indeks RB Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan merupakan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dinilai dengan parameter penilaian yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) nomor nomor 9 tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Dalam mewujudkan pelaksanaan RB yang optimal, maka perlu disusun roadmap reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan berdasarkan Permen PANRB nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) nomor nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan Permen PANRB nomor 3 tahun 2023 difokuskan pada Reformasi Birokrasi General (tata Kelola dan budaya organisasi/ASN) dan Reformasi Birokrasi Tematik dengan 4 (empat) pilihan tema, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintah, serta penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) yang akan dinilai berdasarkan Permen PANRB nomor 9 tahun 2023, dengan formula:

Nilai RB = Nilai RB General (100) + Nilai RB Tematik (10)

1. **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025**

   Pelaksanaan penilaian nilai indeks reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Assasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi, namun nilai indeks reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Assasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan belum disampaikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun sampai dengan Laporan Kinerja ini selesai disusun, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarkaatan belum mendapatkan nilai indeks reformasi birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka capaain pada Indikator Kinerja dimaksud belum dapat dibandingkan dengan target tahun 2025

Tabel 3.4 Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2025

Sasaran Strategis 2

INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI/ KETERANGAN
Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan	85	Indeks	-	-	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyaraktan, belum disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Apratus Negara dan Reformasi Birokrasi

2. **Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

   Realisasi kinerja tidak dapat dibandingkan karena pada Tahun 2024 Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarkatan baru berdiri.

3. **Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

   Realisasi kinerja tidak dapat dibandingkan karena Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyaraktan, belum disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Apratus Negara dan Reformasi Birokrasi

4. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional (jika ada)**

   Realisasi kinerja tidak dapat dibandingkan karena Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyaraktan, belum disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Apratus Negara dan Reformasi Birokrasi

5. **Analisis penyebab keberhasilan**

   Penyebab keberhasilan pencapaian target, sebagai berikut:

   - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menyelenggarakan kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

(WBBM). Acara ini juga menjadi momen penting dengan peluncuran website resmi kementerian, yang diadakan pada Jumat (10/01/2025);

- Telah dilaksanakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yaitu:
  1) Melakukan Revisi Pagu Anggaran Kementerian Koordiantor Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemsayarakatan;
  2) Telah ditetapkan Surat Edaran Nomor SES-15.OT.02.02 Tanggal 11 Februari Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Pola Kerja Pegawai Dalam Rangka Efisiensi Anggaran di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
- Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarkatan, melakukan Pemanggilan ASN di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berasal dari Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 10 Februari 2025;
- Ditetapkannya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarkatan Nomor MKH-261.PR.01.01 Tahun 2025 Penyusunan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja dan Evaluasi Mandiri Atas Capaian Kinerja Secara Berkala di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Ham, Imigrasi dan Pemasyarakatan;
- Ditetapkannya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025 – 2029;
- Telah dilaksanakan kegiatan Sosialiasasi Kerja Sama di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi MAnusi, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
- Hasil pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan nilai 80,02 (predikat terjaga);
- Terlaksanakannya Perencanaan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan;

- Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
- Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
- Pengelolaan pemberitaan baik di website internal dan media massa;
- Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan;
- Pembangunan sistem pusat kontak dan pengaduan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan instansi pemerintah. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan tingkat pencapaian kinerja terhadap penggunaan sumber daya, baik anggaran, sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun waktu pelaksanaan.

Berdasarkan pencapaian target indikator kinerja dimaksud, realisasi anggaran sebesar Rp. 35.548.817.192,00 (78,21%) dari total pagu anggaran sebesar Rp. 45.420.393.000,00. Sementara itu, persentase capaian target kinerja pada indikator dimaksud belum dapat dihitung karena penilaian masih dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan melaksanakan berbagai kegiatan dalam menunjang pencapaian target kinerja dimaksud.

Dari aspek sumber daya manusia, pelaksanaan program didukung oleh 254 pegawai, dengan tingkat produktivitas yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Optimalisasi pembagian tugas, peningkatan kompetensi melalui pelatihan, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan efisiensi kerja pegawai.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dalam mendukung pencapaian target Kementerian Koordinator telah melaksanakan program/kegiatan sebagai berikut:

- Layanan BMN
- Layanan Protokoler
- Layanan Umum

- Layanan Perkantoran
- Layanan Sarana dan Prasarana Internal
- Layanan Manajemen Keuangan
- Layanan Penyelenggaraan Kearsipan
- Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
- Layanan Data dan Informasi
- Layanan Pengelolaan Komunikasi dan Peliputan
- Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
- Layanan Manajemen SDM
- Layanan Manajemen Kinerja
- Layanan Perencanaan dan Penganggaran Kementerian
- Layanan Kerja Sama
- Penyusunan Informasi Kinerja dan Rencana Strategis Kementerian
- Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian
- Layanan Reformasi Kinerja
- Layanan Audit Internal
- Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi D.K.I. Jakarta

B. Capaian Kinerja Anggaran

1. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2025 Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan mendapat sejumlah Rp.9.029.527.000,00 (sembilan miliar dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu) yang merupakan pergeseran anggaran Kementerian Koordinator Bidang Poliltik dan Keamanan. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Direktur Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Nomor S-168/AG/AG.5/2025 tanggal 14 April 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan TA 2025, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan mendapat tambahan anggaran sebesar Rp.200.094.882.000,00 (dua ratus miliar sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu), sehingga pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menjadi Rp.209.124.409.000,00 (dua ratus sembilan miliar seratus dua puluh empat juta empat ratus sembilan ribu).

Per tanggal 31 Desember 2025 Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan berhasil direalisasikan sebesar Rp.171.915.532.601,00 (Seratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu enam ratus satu) atau sebesar 82,21% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Tahun 2025

NO	PROGRAM /KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE(%)
1	Dukungan Manajemen Sekretariat Kementerian Koordinator	163.704.016.000,00	136.366.715.409,00	83,30%
2	Koordinasi Bidang Hukum	15.430.643.000,00	11.980.420.770,00	77,64%
3	Koordinasi Bidang Hak Asasi Manusia	14.984.439.000,00	12.040.709.032,00	80,35%
4	Koordinasi Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan	15.005.311.000,00	11.527.687.390,00	76,82%
	TOTAL	**209.124.409.000,00**	**171.915.532.601,00**	**82,21%**

Tabel 3.6 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2025

NO	PROGRAM /KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	PERKEMBANGAN REALISASI (DAYA SERAP ANGGARAN) (Rp.)				REALISASI (Rp.)	PERSENTASE(%)
			TRIWULAN 1	TRIWULAN 2	TRIWULAN 3	TRIWULAN 4		
1	Dukungan Manajemen Sekretariat Kementerian Koordinator	163.704.016.000,00	997.358.230,00	19.603.553.014,00	53.258.986.193,00	62.506.817.972,00	136.366.715.409,00	83,30%
2	Koordinasi Bidang Hukum	15.430.643.000,00	5.910.000,00	679.327.991,00	3.618.830.255,00	7.676.352.524,00	11.980.420.770,00	77,64%
3	Koordinasi Bidang Hak Asasi Manusia	14.984.439.000,00	2.940.000,00	346.516.106,00	3.541.428.834,00	8.149.824.092,00	12.040.709.032,00	80,35%
4	Koordinasi Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan	15.005.311.000,00	550.000,00	1.034.341.059,00	3.281.480.329,00	7.211.316.002,00	11.527.687.390,00	76,82%
	TOTAL	**209.124.409.000,00**	**1.006.758.230,00**	**21.663.738.170,00**	**63.700.725.611,00**	**85.544.310.590,00**	**171.915.532.601,00**	**82,21%**

2. Keterkaitan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja

Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dalam mencapai target melalui 2 Program, 2 Sasaran Strategis dan 2 Indikator Kinerja Utama. Berikut tabel hubungan capaian kinerja dengan anggaran.

Tabel 3.7 Hubungan Capaian Kinerja Dengan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran	Realisasi
Program: Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan								
1	Tercapainya pembangunan Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memperkuat supremasi Hukum dan pemajuan HAM serta transformasi pelayanan publik	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan serta pelayanan publik pada K/L dibawah Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sesuai dokumen perencanaan nasional	85	Persentase	91,30	107,41 %	Rp. 45.420.393.000,00	Rp. 35.548.817.192,00 (78,21%)
Program: Dukungan Manajemen								
2	Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan	85	Indeks	-	-	Rp.163.704.016.000,00	Rp.136.366.715.409,00 (83,30%)

3. Analisis efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran

a. Analisis Efektivitas

Pelaksanaan anggaran dilingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarkatan **sangat efektif.** Hal tersebut dapat dilihat dari capaian kinerja Sasaran Strategis 1 dengan capaian melebih 100% (107,41%)

Sehubungan dengan capaian kinerja Sasaran Strategis 2 belum dapat diukur karena Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum menyampaikan hasil penilaian atas Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Namun Sekretariat Kementerian Koordinator telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam mendukung pencapaian Target Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarkatan.

b. Analisis Efisiensi

Pelaksanaan anggaran dilingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarkatan **sangat efisien.** Hal tersebut dapat dilihat dari capaian kinerja Sasaran Strategis 1 dengan capaian melebih 100% (107,41%) yang dibandingkan dengan realisasi anggaran pada Program Koordinasi pelaskanaan kebijakan dengan Persentase Realisasi Anggaran sebesar 78.21%.

Tabel 3.8 Hubungan Capaian Kinerja Dengan Realisasi Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Realisasi
Program: Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan				
1	Tercapainya pembangunan Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memperkuat supremasi Hukum dan pemajuan HAM serta transformasi pelayanan publik	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan serta pelayanan publik pada K/L dibawah Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sesuai dokumen perencanaan nasional	107,41%	Rp. 35.548.817.192,00 (78,21%)
Program: Dukungan Manajemen				
2	Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang	-	Rp.136.366.715.409,00 (83,30%)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Realisasi
		Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan		

4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah alat ukur yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk menilai kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L). IKPA digunakan untuk mengevaluasi aspek perencanaan, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan anggaran.

Nilai IKPA dipantau secara periodik melalui aplikasi OM SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) untuk mengetahui kinerja satuan kerja. Berikut hasil penilaian IKPA Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan:

Tabel 3.9 Penilaian IKPA Kementerian Koordinator
Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarkatan

No	Indikator Penilaian	Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Penjelasan
1	Revisi DIPA	100,00	10	10,00	-
2	Deviasi Halaman III DIPA	74,69	15	11,20	Realisasi Anggaran tidak sesuai dengan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA yang sudah ditetapkan.
3	Penyerapan Anggaran	74,24	20	14,85	Penyerapan anggaran belum mencapai target yang ditetapkan Kementerian Keuangan
4	Belanja Kontraktual	92,67	10	9,27	Penyelesaian kontrak yang tidak sesuai dengan jadwal (melewati batas waktu)

No	Indikator Penilaian	Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Penjelasan
5	Penyelesaian Tagihan	98,26	10	9,83	Terdapat penyelesaian tagihan yang tidak terbayarkan di TA 2025 sejumlah 1 tagihan
6	Pengelolaan UP dan TUP	99,81	10	9,98	Terdapat persentase Revolving UP yang persentasenya rendah di akhir tahun
7	Capaian Output	99,90	25	24,97	Terdapat Belanja yang tidak mencapai target, yaitu Belanja Modal. Target Belanja Modal sejumlah 1.798 unit, sedangkan realisasi sejumlah 1.698 unit
8	Dispensasi SPM (Pengurang Nilai IKPA)			(0,75)	Terdapat 1 SPM yang melebihi batas waktu karena penolakan dari KPPN.

Nilai Akhir IKPA Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarkatan adalah **89,35 berkategori baik.**

5. Nilai Kinerja Anggaran

Nilai kinerja anggaran adalah skor atau ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L). Instrumen utamanya, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), mengukur efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan APBN untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 107 Tahun 2024 untuk menilai kualitas perencanaan anggaran, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran disusun dari dua dimensi utama yaitu efektvitas dan efisiensi yaitu efektivitas sebesar 75% dari capaian Realisasi Output (RO) dan 25% Efisiensdi dengan membandingkan realisasi biaya per output terhadap Standar Biaya Keluaran (SBK). Berikut Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025:

Tabel 3.10 Kinerja Pelaksanaan Anggaran

No.	Periode	Kode ES1	Nama ES1	Kualitas Perencanaan Anggaran	Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
1	Desember	13001	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	87.35	91.24	99.9	90,10	100%	0.75	**89.35**

Tabel 3.11 Kinerja Perencanaan Anggaran

No	Kode UEI	UEI	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				IKP	CRO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	1	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	**96.17**	94.12	99.85	80	100

Tabel 3.12 Nilai Kinerja Anggaran (NKA)

No	Kode Unit	Unit Eselon I	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	130.01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	96,17	89,35	**92,76**

Nilai Kinerja Anggaran diatas sebesar 92,76 menunjukkan kinerja anggaran **Sangat Baik**.

C. Capaian Kinerja Lainnya

Capaian kinerja lainnya termasuk Prioritas Nasional adalah capaian kinerja yang berasal dari pelaksanaan kegiatan atau penugasan yang mendukung agenda Prioritas Nasional namun tidak seluruhnya tercantum dalam indikator kinerja utama atau Perjanjian Kinerja serta penugasan tambahan yang merupakan fungsi sinkronisasi dan koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

1. Prioritas Nasional

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan mengampu 1 Rincian Output (RO) yaitu: Rekomendasi Kebijakan Penguatan Substansi Hukum Pidana yang Mengedepankan Keadilan Restoratif.

Dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan dimaksud, dilaksanakan kegiatan identifikasi isu terkait Subtansi Hukum Pidana yang mengedepankan Keadlilan Restoratif, engan hasil sebagi berikut:

Tabel 3.13 identifikasi isu

No.	Identifikasi Isu	Analisis
1	Batasan pengertian mengenai keadilan restoratif dalam regulasi nasional belum ditentukan secara tegas	Definisi "Keadilan Restoratif" masih diatur dalam tingkat peraturan sektoral dengan formulasi norma yang beragam sehingga diperlukan perumusan definisi "Keadilan Restoratif" secara tegas dalam tingkat peraturan yang lebih tinggi untuk memastikan bahwa penerapan keadilan restoratif tidak menyimpang dari definisinya
2	Problematika regulasi sektoral terkait Keadilan Restoratif	Keberadaan regulasi sektoral tersebut berpotensi menimbulkan disharmonisasi dan pertentangan kewenangan antar lembaga, karena pada dasarnya disusun berdasarkan diskresi institusional dan bukan atas dasar atribusi maupun delegasi kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menegaskan urgensi dilakukannya unifikasi hukum yang secara komprehensif mengatur prinsip dan praktik keadilan restoratif, sehingga penerapannya memiliki dasar hukum yang kuat, seragam, dan konsisten dalam sistem peradilan pidana.
3	Penerapan Keadilan Restoratif dirasa masih belum menjamin keadilan dan kepastian hukum	Pentingya peran guardian of due process agar kesepakatan yang dicapai tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil, setara, dan terbebas dari relasi kuasa yang timpang
4	Belum optimalnya koordinasi antar Lembaga Penegak Hukum dalam melaksanakan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana	Belum optimalnya koordinasi antar Lembaga Penegak Hukum dalam melaksanakan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana yang disebabkan karena masing-masing lembaga berpegang pada aturan sektoral yang dimilikinya tanpa adanya kerangka koordinasi yang terpadu sebagai acuan bersama
5	Tidak adanya *check and balances* antar Lembaga Penegak Hukum	Ketiadaan check and balances antar Lembaga Penegak Hukum menimbulkan kerentanan terhadap praktik penyalahgunaan kewenangan, karena setiap lembaga dapat melaksanakan penghentian proses hukum. Langkah penting yang dapat ditempuh adalah adanya kewajiban pemberitahuan antar lembaga penegak hukum apabila terjadi penghentian penyidikan atau penuntutan akibat dilaksanakannya mekanisme keadilan restoratif.

Berdasarkan dapat identifikasi isu ditetapkan rekomendasi kebijakan yaitu ***"Menyusun Peraturan Pemerintah yang mengatur teknis pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana, mulai dari penerapan mediasi penal pada setiap tahapan pemeriksaan perkara, keadilan restoratif melalui putusan, hingga pelaksanaan keadilan restoratif pada tahap eksekusi"***. rekomendasi kebijakan tersebut akan dilaksanakan oleh 4 (empat) instansi terkait yaitu: (1) Kementerian Hukum, (2) Mahkamah Agung, (3) Kejaksaan Agung, dan (4) Kepolisian Republik Indonesia.

2. Koordinasi KebijakanTransfer of Sentenced Persons (TSP)

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan berperan sentral dalam mengoordinasikan kebijakan Transfer of Sentenced Persons (TSP) atau pemindahan narapidana antarnegara, termasuk memproses RUU TSP untuk melindungi WNI di luar negeri dan warga asing di Indonesia. Kebijakan ini, yang sering kali didasarkan pada prinsip kemanusiaan dan kesehatan, bertujuan memperbaiki perilaku narapidana melalui rehabilitasi di negara asal. Poin-Poin Penting TSP di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan:

- Koordinasi Lintas Sektoral: Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan mengoordinasikan kebijakan TSP dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Kementerian

Hukum), Direktorat Jenderal Pemasyarkatan (Kementerian Imigrasi dan Pemasyarkatan), Kementerian Luar Negeri, dan lembaga terkait lainnya;

- Penguatan Dasar Hukum: Pemerintah tengah mendorong Rancangan Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara sebagai tindak lanjut Pasal 45 Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
- Tujuan Kemanusiaan: TSP sering dilakukan untuk narapidana asing yang mengalami penurunan kondisi kesehatan dan membutuhkan perawatan di negara asal;
- Implementasi: Contoh nyata adalah penandatanganan *Practical Arrangement* antara Indonesia dan Inggris untuk pemindahan narapidana

3. **Penanganan Sengketa Hukum Internasional dengan Navayo International AG**

   Penanganan kasus sengketa hukum Internasional Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menyusun rencana strategis dalam penangangan kasus dimaksud serta berkerja sama dengan Kementerian Pertahanan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Keuangan serta instansi terkait yang dianggap perlu.

4. **Tindak Lanjut Pasca Aksi Masyarakat Agustus 2025**

   Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, memastikan penanganan hukum pasca demonstrasi Agustus 2025 di Jakarta. Berikut adalah poin-poin penanganan pasca demonstrasi Agustus 2025:

   - Pemantauan HAM dan Transparansi;
   - Penanganan Tersangka;
   - Pendekatan Humanis;
   - Tindak Lanjut Laporan;
   - Reaksi Pihak Terkait

5. **Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)**

   Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarkatan ditunjuk sebagai ketua Komite TPPU yang beranggotakan Kementerian/Lembaga terkait dalam pelaksanaan pencegahan TPPU.

   Sebagai ketua Komite TPPU yang pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT). Pada tahun pertama telah berhasil

memimpin pelaksanaan pilot survei 2025 sebagai persiapan Mutual Evaluation Review (MER) FATF 2029. Hasil survei dimaksud instrumen pengukuran kinerja APUPPT pada Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT 2025 dengan skor 6,42 (kategori "cukup").

6. **Penanganan Pinjaman Online**

   Menindaklanjuti arahan Presiden RI terkait penanganan pinjaman online illegal Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan membentuk Kelompok Kerja Khusus di bawah pimpinan Wamenkum Eddy Hiariej untuk menindak tegas Pinjaman Online ilegal. Langkah ini merupakan tindak lanjut Putusan MA (putusan 1206 K/Pdt/2024) untuk melindungi data pribadi dan masyarakat dari ancaman serta teror *debt collector.*

   Berikut rincian penanganan pinjaman online (pinjol) ilegal oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dan instansi terkait:

   - Pembentukan Tim Pokja (Kelompok Kerja);
   - Tindakan Hukum Tegas;
   - Supervisi dan Regulasi;
   - Pemblokiran dan Pelaporan;
   - Sanksi Pidana;

7. **Komite Reformasi Polisi Republik Indonesia**

   Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan bergabung dalam Komite Reformasi Polisi Republik Indonesia yang dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia.

8. **Penanganan Judi Online**

   Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menetapkan strategi utama penanangan judi online sabagai berikut:

   - Pendekatan TPPU: penindakan pidana umum (3-10 tahun penjara) tidak efektif tanpa melacak aliran dana. TPPU digunakan untuk mengejar jaringan bandar dan menyita aset mereka.
   - Perampasan Aset Cepat: Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010, perampasan hasil kejahatan judi online oleh negara dapat diproses cepat hanya dalam 7 hari.
   - Sinergi Komite TPPU: Sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan memastikan kolaborasi

maksimal untuk memberantas judol, baik domestik maupun luar negeri yang berdampak ke Indonesia.

- Efek Jera & Nilai Moral: Tindakan tegas ini menargetkan bandar dan pemain untuk menghentikan peredaran uang judi, sekaligus menegaskan judol bertentangan dengan norma agama dan sosial.

KEMENKO
KUMHAM
IMIPAS

Laporan Kinerja 2025

BAB IV
Penutup

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi, dan Pemasyarakatan tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi, dan Pemasyarakatan atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi, dan Pemasyarakatan selama tahun 2025. Dengan menyusun Laporan Kinerja, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi, dan Pemasyarakatan mewujudkan prinsip transparan dan akuntabilitas yang diamanahkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi, dan Pemasyarakatan sebagai lembaga publik kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2025 merupakan penjabaran atas capaian kinerja selama tahun 2025 yang menjelaskan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan baik dalam perencanaan nasional maupun yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja. Laporan Kinerja disusun setiap tahun sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja juga digunakan sebagai dasar upaya perbaikan perencanaan kinerja dan pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan ke depannya.

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan berawal dari pengumuman Kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto tanggal 20 Oktober 2024 dan pelantikan Menteri dan Wakil Menteri pada tanggal 21 Oktober 2025. Dasar hukum pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No, 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan hadir untuk merespons tantangan yang ada melalui sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan. Hasil dari sinkronisasi dan koordinasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan diwujudkan dalam perumusan kebijakan-kebijakan strategis yang responsif, terintegrasi, dan solutif sebagai jawaban atas berbagai isu strategis yang memerlukan penanganan komprehensif dan lintas sektor.

Capaian Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan didefinisikan sebagai perwujudan nyata atas efektivitas fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di 4 (empat) Bidang strategis yaitu Bidang Hukum, Bidang Hak Asasi Manusia (HAM), Bidang Keimigrasian, dan Bidang Pemasyarakatan. Capaian ini bukan sekadar kumpulan angka statistik sektoral, melainkan sebuah ukuran sejauh mana integrasi kebijakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, penghormatan HAM, kedaulatan wilayah melalui fungsi imigrasi, serta keberhasilan reintegrasi sosial dalam sistem pemasyarakatan.

Tahun 2025 Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarkatan memiliki 2 Sasaran Strategis dan 2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang capaiannya melebihi target yaitu: *Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan serta pelayanan publik pada K/L dibawah Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sesuai dokumen perencanaan nasional* dengan target 85 %, realisasi target 91,30% sehingga persentase capaian kinerja menjadi 107,41%. Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu *Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan* dimana indikator tersebut belum dapat dilakukan perhitungan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyaraktan, belum disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Apratus Negara dan Reformasi Birokrasi.

Untuk tahun 2026 kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarkatan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025 – 2029 dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Target kinerja tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Target Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarkatan Tahun 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan
Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan				
1	Terwujudnya sinergi Pembangunan Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan	Indeks Pembangunan Hukum (indikator RPJMN)	0,70	Indeks
		Indeks sinergitas Pembangunan Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan	0,80	Indeks
Program: Dukungan Manajemen				
2	Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan	72,83	Indeks

B. Saran

Dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja pada tahun berikutnya, perlu dilakukan tindak lanjut terhadap beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan;
2. Untuk memperkuat fungsi sinkronisasi dan koordinasi perlu dilakukan penyusunan terhadap pola sinkronisasi dan koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigasi, dan Pemasyarakatan;
3. Dalam rangka peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perlu disusun pedoman Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan;
4. Melakukan pengembangan aplikasi pengukuran kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarkatan; dan
5. Menetapkan kebijakan terkait Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

KEMENKO
KUMHAM
IMIPAS

Laporan Kinerja 2025

Lampiran

LAMPIRAN

Rencana Strategis

LAMPIRAN 1. MATRIKS KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

NO.	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KRO/RO	LOKASI	TARGET					SAT	KERANGKA PENDANAAN (DALAM JUTAAN)					PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
A. TAHUN 2025														
CL Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan									45.420					
SS 1	Tercapainya pembangunan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memperkuat supremasi Hukum dan pemajuan HAM serta transformasi pelayanan publik													Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan
IKSS 1.1	Persentase capaian target pembangunan bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan serta pelayanan publik pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai dokumen perencanaan nasional		85					Persen						
SP 1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yang Efektif													
IKP 1.1	Persentase capaian target pembangunan bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan pada K/L di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai dengan dokumen perencanaan nasional		85					Persen						
7151 Koordinasi Bidang Hukum									15.431					
SK 1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Hukum yang Efektif													

NO.	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KRO/RO	LOKASI	TARGET					SAT	KERANGKA PENDANAAN (DALAM JUTAAN)					PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 1.1	Persentase rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan Bidang Koordinasi Hukum dalam dokumen perencanaan nasional		85					Persen						
ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM													
ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Tata Kelola Administrasi Hukum		1					Rekomendasi Kebijakan	2.978.579					
ABD.002	Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Kekayaan Intelektual		1					Rekomendasi Kebijakan	2.975.443					
ABD.003	Rekomendasi Kebijakan Materi Hukum dan Keadilan Restoratif		1					Rekomendasi Kebijakan	3.005.335					
ABD.004	Rekomendasi Kebijakan Budaya, Informasi, dan Komunikasi Hukum		1					Rekomendasi Kebijakan	2.993.803					
ABD.005	Rekomendasi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundangundangan dan Litigasi		1					Rekomendasi Kebijakan	2.977.483					
PDB	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM													
PDB.001	Rekomendasi Kebijakan Penguatan Substansi Hukum Pidana yang Mengedepankan Keadilan Restoratif		1					Rekomendasi Kebijakan	500.000					
7152 Koordinasi Bidang Hak Asasi Manusia									14.984					
SK 1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Hak Asasi Manusia yang Efektif													
IKK 1.1	Persentase rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia dalam dokumen perencanaan nasional		85					Persen						

NO.	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KRO/RO	LOKASI	TARGET					SAT	KERANGKA PENDANAAN (DALAM JUTAAN)					PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM													
ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Kebijakan HAM		1					Rekomendasi Kebijakan	3.007.867					
ABD.002	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat		1					Rekomendasi Kebijakan	2.994.143					
ABD.003	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Pembangunan dan Kerja Sama HAM		1					Rekomendasi Kebijakan	2.994.143					
ABD.004	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan		1					Rekomendasi Kebijakan	2.994.143					
ABD.005	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Pendidikan HAM		1					Rekomendasi Kebijakan	2.994.143					
7153 Koordinasi Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan									15.005					
SK 1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan Yang Efektif													
IKK 1.1	Persentase rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan dalam dokumen perencanaan nasional		85					Persen						
ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM													
ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian		1					Rekomendasi Kebijakan	2.994.143					
ABD.002	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian		1					Rekomendasi Kebijakan	3.005.675					
ABD.003	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Tata Kelola Pemasyarakatan		1					Rekomendasi Kebijakan	2.994.143					

NO.	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KRO/RO	LOKASI	TARGET					SAT	KERANGKA PENDANAAN (DALAM JUTAAN)					PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
ABD.004	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Strategi Pelayanan Pemasyarakatan		1					Rekomendasi Kebijakan	3.005.675					
ABD.005	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Kerjasama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasyarakatan		1					Rekomendasi Kebijakan	3.005.675					
CL Program Dukungan Manajemen									163.704					
SS 2	Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien													Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan
IKSS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan		85					Indeks						
SP 1	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan													
IKP 1.1	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan		85					Indeks						
7150 Dukungan Manajemen Sekretariat Kementerian Koordinator									163.704					
SK 1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan													
IKK 1.1	Persentase Rekomendasi RB yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi yang Diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian		85					Persen						
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													

NO.	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KRO/RO	LOKASI	TARGET					SAT	KERANGKA PENDANAAN (DALAM JUTAAN)					PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
EBA.001	Layanan Pengelolaan Komunikasi dan Peliputan		1					Laporan	1.124.599					
EBA.956	Layanan BMN		12					Layanan	272.560					
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		1					Layanan	391.374					
EBA.959	Layanan Protokoler		12					Layanan	2.193.611					
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		1					Layanan	342.916					
EBA.962	Layanan Umum		12					Layanan	14.195.158					
EBA.963	Layanan Data dan Informasi		2					Layanan	162.610					
EBA.994	Layanan Perkantoran		1					Layanan	92.277.264					
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
EBB.951	Layanan Sarana Internal		1496					Unit	49.257.412					
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal													
EBC.954	Layanan Manajemen SDM		100					Orang	283.538					
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal													
EBD.001	Layanan manajemen kinerja		1					Dokumen	115.885					
EBD.002	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Kementerian		1					Dokumen	102.057					
EBD.003	Layanan Kerja Sama		2					Layanan	1.011.470					
EBD.004	Penyusunan Informasi Kinerja dan Rencana Strategis Kementerian		1					Dokumen	721.292					
EBD.005	Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi D.K.I. Jakarta		1					Dokumen	2.700					

NO.	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KRO/RO	LOKASI	TARGET					SAT	KERANGKA PENDANAAN (DALAM JUTAAN)					PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
EBD.006	Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian		1					Laporan	299.357					
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		2					Dokumen	205.716					
EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja		3					Dokumen	202.103					
EBD.965	Layanan Audit Internal		4					Laporan	429.069					
EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		1					Laporan	113.325					

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yusril Ihza Mahendra

Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyakatan

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Mei 2025

Menteri Koordinator Bidang Hukum,
Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyakatan,

Yusril Ihza Mahendra

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tercapainya Pembangunan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyakatan dalam memperkuat supremasi Hukum dan pemajuan HAM serta transformasi pelayanan publik	Persentase capaian target pembangunan bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan serta pelayanan publik pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai dokumen perencanaan nasional	85%
2.	Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan	85 Indeks

No.	Program	Anggaran
1.	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	Rp. 45.420.393.000,-
2.	Dukungan Manajemen	Rp. 163.704.016.000,-
Total Anggaran		**Rp. 209.124.409.000,-**

Jakarta, 1 Mei 2025

Menteri Koordinator Bidang Hukum,
Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyakatan,



Yusril Ihza Mahendra

DESKRIPSI PERJANJIAN KERJA MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

Sasaran Strategis 1: Tercapainya Pembangunan Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memperkuat supremasi Hukum dan pemajuan HAM serta transformasi pelayanan public	
Indikator Kinerja	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan serta pelayanan publik pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai dokumen perencanaan nasional
Target	85%
Definisi	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan serta pelayanan publik pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai dokumen perencanaan nasional adalah persentase capaian target pembangunan dalam rangka mendukung pembangunan di bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyakarkatan, Capaian Kinerja yang dihasilkan sesuai dengan dokumen perencanaan nasional yang akan di Koordinasi, Sinkronisasi serta dilakukan Pengendalian adalah sebagai berikut: 1. RUU KUH Acara Perdata 2. RUU Kepailitan 3. RUU Jaminan Benda Bergerak 4. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 5. RPP Pelaksanaan UU KUHP 6. Naskah Urgensi Dasar Hukum Pengesahan (Aksesi) HCCH 1965 Service Convention 7. Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi 8. Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi 9. Sistem Informasi Tata Kelola Regulasi 10. Penghitungan Indeks Reformasi Hukum (IRH) 11. Penyusunan Kebijakan Pengembangan Badan Usaha LLP 12. Pelatihan Fungsional Analis Hukum Pusat dan Daerah 13. Training of Facilitator (ToF) Implementasi KUHP 14. Pedoman dan Penguatan PUU Pengarustamaan HAM

	15. Rekomendasi Analisis Peraturan Perundang-Undangan dari Perspektif HAM – Pusat 16. Pendidikan HAM bagi K/L/D 17. Pendidikan HAM bagi K/L/D – Pusat 18. Indeks HAM Indonesia 19. Indeks HAM Indonesia – Pusat 20. Pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM 21. Pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM – Pusat 22. Strategi Nasional Bisnis dan HAM 23. Penyusunan Profil Pembangunan HAM – Pusat 24. Penyelenggaraan Program Kewirausahaan Unit Usaha dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat 25. Layanan Pemanfaatan Data SPPT-TI Bidang Permasyarakatan
Sumber Data	Capaian target pembangunan bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan serta pelayanan publik pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai dokumen perencanaan nasional
Cara Menghitung	$\sum = \frac{\substack{jumlah\ capaian\ target\ pembangunan\ bidang\ KUMHAMIMIPAS \\ dalam\ dokumen\ perencanaan\ nasioanl}}{\substack{target\ pembangunan\ bidang\ KUMHAMIMIPAS \\ dalam\ dokumen\ pembangunan\ nasional}} \times 100\%$
Sasaran Strategis 2: Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien	
Indikator Kinerja 1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan
Target	85 indeks
Definisi	Indeks RB Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan merupakan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM dinilai dengan parameter penilaian yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) nomor nomor 9 tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Dalam mewujudkan pelaksanaan RB yang optimal, maka perlu disusun roadmap reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan berdasarkan Permen PANRB nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan

	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) nomor nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan Permen PANRB nomor 3 tahun 2023 difokuskan pada Reformasi Birokrasi General (tata Kelola dan budaya organisasi/ASN) dan Reformasi Birokrasi Tematik dengan 4 (empat) pilihan tema, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintah, serta penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) yang akan dinilai berdasarkan Permen PANRB nomor 9 tahun 2023, dengan formula **Nilai RB = Nilai RB General (100) + Nilai RB Tematik (10)** Evaluasi pada RB General lebih memotret kemajuan reformasi birokrasi kementerian/lembaga/ pemerintah daerah berdasarkan pada upaya memperbaiki masalah hulu atau masalah-masalah umum yang terjadi di internal birokrasi dan terkadang dampaknya bersifat jangka menengah sampai panjang. Adapun Evaluasi RB Tematik lebih menekankan pada upaya yang bersifat terobosan atau inovasi dalam mengatasi berbagai masalah tata kelola yang terjadi pada tema-tema prioritas pembangunan. Selain itu, Evaluasi RB Tematik juga mengukur capaian indikator dampak dari tema terkait. Secara lebih rinci, di bawah ini adalah gambar yang menunjukkan komponen-komponen pada setiap dimensi.
Sumber Data	Kemenpan RB
Cara Menghitung	**Nilai RB = Nilai RB General (100) + Nilai RB Tematik (10)** Dimana, • **Nilai RB General** Mengikuti cara perhitungan yang dilakukan oleh Kementerian PANRB dengan nilai maksimal 100. • **ilai RB Tematik** + Nilai Aspek Reform (30%) Mengikuti cara perhitungan yang dilakukan oleh Kementerian PANRB dengan nilai maksimal 100

SEKRETARIS KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : R. Andika Dwi Prasetya
   Jabatan : Sekretaris Kementerian Koordinator
   Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : Yusril Ihza Mahendra
   Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyakatan
   Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Mei 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Yusril Ihza Mahendra	**R. Andika Dwi Prasetya**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyakatan	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyakatan	85 Indeks
2.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan	Persentase Rekomendasi RB yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi yang Diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian	100%
3.	Terwujudnya tata kelola manajemen kinerja yang profesional, transparan, dan akuntabel, guna memastikan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian secara menyeluruh	Persentase layanan dukungan manajemen yang dimanfaatkan oleh seluruh unit kerja	100 %
		Nilai SAKIP Kementerian	77

PROGRAM	Anggaran
Dukungan Manajemen	**Rp. 163.704.016.000,-**

Jakarta, 1 Mei 2025

Sekretaris Kementerian Koordinator

R. Andika Dwi Prasetya

DEPUTI BIDANG KOORDINASI HUKUM

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Nofli
   Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Hukum
   Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : Yusril Ihza Mahendra
   Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyakatan
   Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Mei 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Yusril Ihza Mahendra	**Nofli**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG KOORDINASI BIDANG HUKUM

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Hukum yang Efektif	Presentase rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan Bidang Koordinasi Hukum dalam dokumen perencanaan nasional	85%
		Jumlah rekomendasi kebijakan bidang koordinasi hukum yang dihasilkan	5 Rekomendasi
		Jumlah rekomendasi kebijakan bidang koordinasi hukum yang mendukung Prioritas Nasional (PN)	1 Rekomendasi
2.	Terwujudnya tata Kelola dukungan manajemen lingkup Deputi Bidang Koordinasi Hukum yang efektif	Presentase layanan Dukungan manajemen yang dimanfaatkan oleh unit kerja dilingkungan Deputi Bidang Koordinasi Hukum	100%

No.	Program	Anggaran
1.	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Koordinasi Hukum	Rp. 15.430.643.000,-
	Total	**Rp. 15.430.643.000,-**

Jakarta, 1 Mei 2025
Deputi Bidang Koordinasi Hukum,

Nofli

DEPUTI BIDANG KOORDINASI HAK ASASI MANUSIA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ibnu Chuldun
   Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia
   Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : Yusril Ihza Mahendra
   Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyakatan
   Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Mei 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Yusril Ihza Mahendra	**Ibnu Chuldun**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DEPUTI BIDANG KOORDINASI HAK ASASI MANUSIA

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Hak Asasi Manusia yang Efektif	Persentase rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia dalam dokumen perencanaan nasional	85%
		Jumlah rekomendasi kebijakan bidang koordinasi Hak Asasi Manusia yang dihasilkan	5 Rekomendasi
2.	Terwujudnya tata Kelola dukungan manajemen lingkup Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia yang efektif	Presentase layanan Dukungan manajemen yang dimanfaatkan oleh unit kerja dilingkungan Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia	100%

No.	Program	Anggaran
1.	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia	Rp. 14.984.439.000,-
Total		**Rp. 14.984.439.000,-**

Jakarta, 1 Mei 2025

Deputi Bidang Koordinasi
Hak Asasi Manusia,

Ibnu Chuldun

DEPUTI BIDANG KOORDINASI IMIGRASI DAN PEMASYARKATAN

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : I Nyoman Gede Surya Mataram
   Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan
   Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : Yusril Ihza Mahendra
   Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyakatan
   Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Mei 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Yusril Ihza Mahendra	**I Nyoman Gede Surya Mataram**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

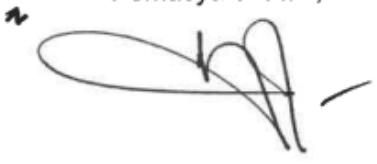
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEIMIGRASIAN DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Efektif	Persentase capaian target pembangunan bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan pada K/L di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kumham Imipas sesuai dengan dokumen perencanaan nasional	85%
		Jumlah rekomendasi kebijakan bidang koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang dihasilkan	5 Rekomendasi
2.	Terwujudnya tata Kelola dukungan manajemen lingkup Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang efektif	Presentase layanan Dukungan manajemen yang dimanfaatkan oleh unit kerja dilingkungan Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang efektif	100%

No.	Program	Anggaran
1.	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan	Rp. 15.005.311.000,-
Total		**Rp. 15.005.311.000,-**

Jakarta, 1 Mei 2025

Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan,



I Nyoman Gede Surya Mataram

RENCANA KERJA TAHUNAN TA 2025

REKAP 1: K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

2. VISI : Terwujudnya stabilitas hukum dan perlindungan HAM dalam mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045

3. MISI :
1. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk menyelaraskan Pembangunan hukum berkualitas dan Implementasi P5 HAM
2. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik bidang Hukum dan HAM

4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL	ALOKASI 2025 (RIBU)
Total		0,0

5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Tercapainya pembangunan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memperkuat supremasi Hukum dan pemajuan HAM serta transformasi pelayanan publik		6.552.224,0
01.01	Persentase capaian target pembangunan bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan serta pelayanan publik pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai dokumen perencanaan nasional	85	
02	Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien		2.477.303,0
02.01	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan	85	

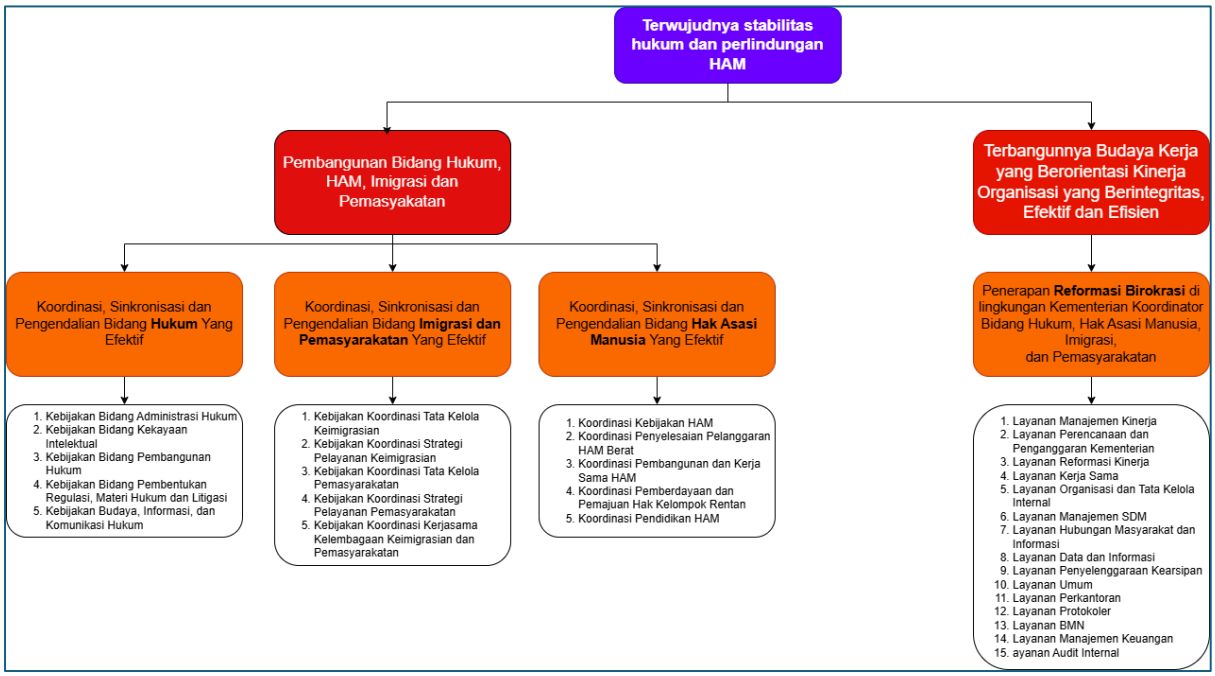
KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
Total			9.029.527,0

6. PROGRAM DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2026	2027	2028
130.CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	6.552.224,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.552.224,0	6.854.825,0	7.157.000,0	7.465.000,0
130.WA	Program Dukungan Manajemen	2.477.303,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.477.303,0	2.581.000,0	2.693.000,0	2.810.000,0
Total		9.029.527,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.029.527,0	9.435.825,0	9.850.000,0	10.275.000,0

Jakarta, 11 Agustus 2025

POHON KINERJA TAHUN 2025



SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR NOMOR SES-30.PR.03 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

Yth. 1. Para Pimpinan Tinggi Madya
2. Para Pimpinan Tinggi Pratama
di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

SURAT EDARAN
NOMOR SES-29.PR.03 TAHUN 2026

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja (LKj) disusun untuk memberikan informasi yang terukur dan akuntabel mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis dan sasaran kinerja tahunan serta menjamin keselarasan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas). Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menyajikan informasi kinerja yang akurat, transparan, dan akuntabel, serta menjamin keseragaman, keterpaduan, dan kualitas Laporan Kinerja (LKj) Kemenko Kumham Imipas, di perlukan Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyaraktan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029.

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dalam menyusun LKj secara sistematis, terukur, dan akuntabel.

Sedangkan tujuan Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Menjamin keseragaman format dan substansi LKj;
2. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja yang berbasis hasil (*outcome*);
3. Mendukung peningkatan nilai dan kualitas penerapan SAKIP di lingkungan Kemenko KUMHAM IMIPAS.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, meliputi:

1. Ketentuan Pelaksanaan;
2. Prinsip umum penyusunan LKj;
3. Struktur dan sistematika LKj;
4. Metodologi pengukuran dan analisis kinerja;
5. Mekanisme penyusunan, reviu internal, dan penyampaian LKj.

E. Ketentuan Pelaksanaan

1. Setiap unit kerja wajib menyusun LKj sesuai dengan petunjuk teknis yang tercantum dalam Surat Edaran ini;
2. Penyusunan LKj harus mengacu pada dokumen perencanaan kinerja yang telah ditetapkan (Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja);

3. Sekretariat Kementerian Koordinator melalui Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama melakukan koordinasi, asistensi, serta reviu internal atas LKj unit kerja;
4. LKj disampaikan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan menjadi bagian dari pertanggungjawaban kinerja Kementerian Koordinator.

D. Prinsip Umum Penyusunan LKj

Prinsip Umum Penyusunan LKj harus disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan. Penyusunan LKj dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

1. Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan substantif,.
2. Terukur, menggunakan indikator kinerja yang jelas dan dapat diverifikasi;
3. Relevan, selaras dengan tugas dan fungsi unit kerja;
4. Konsisten, selaras dengan Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja;
5. Berorientasi hasil, menekankan capaian *outcome* dibandingkan sekadar *output*;
6. Transparan, menyajikan data dan analisis secara terbuka dan objektif.

E. Lampiran Surat Edaran

Terlampir dalam Surat Edaran ini Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Agar menjadi acuan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja serta mendukung peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

F. PENUTUP

Dengan ditetapkannya Surat Edaran ini, diharapkan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dapat menyusun Laporan Kinerja secara tertib, tepat waktu, dan berkualitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari diperlukan penyempurnaan, akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2026
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

R. ANDIKA DWI PRASETYA

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia;
2. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.

LAMPIRAN
Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator
Nomor : SES-29.PR.03
Tanggal : 13 Januari 2026

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN

A. Pengertian Laporan Kinerja (LKj)
1. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.
2. Penyusunan laporan kinerja didasarkan pada perencanaan kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun sebelumnya.
3. Laporan Kinerja membandingkan antara perencanaan (target dalam PK) dengan hasil yang dicapai (realisasi kinerja).
4. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Laporan Kinerja
1. Informasi yang cepat, tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan/pimpinan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi aktual serta penentuan kebijakan yang relevan
2. Memberikan informasi kinerja yang tepat, akurat dan terukur kepada pemberi mandat (pemangku kepentingan/pimpinan) atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
3. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan/dari unit yang lebih rendah ke unit kerja yang lebih tinggi
4. Menginformasikan capaian kinerja yang telah dihasilkan unit kerja sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja;
5. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kementerian Koordinator untuk meningkatkan kinerjanya.

C. Sistematika Laporan Kinerja (LKj)
Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang:
1. Uraian singkat organisasi;
2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK);
3. Pengukuran kinerja;
4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Berikut Format Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan:

KATA PENGANTAR
Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan laporan kinerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab organisasi.

IKHTISAR EKSEKUTIF
Ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
   Sub Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
   Sub Bab ini menyajikan tugas, fungsi dan struktur organisasi secara lengkap.
C. Maksud dan Tujuan
   Sub Bab ini menyajikan maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja.
D. Aspek Strategis
   Sub Bab ini menguraikan aspek yang menjadikan pentingnya keberadaan organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
E. Isu Strategis
   Sub Bab ini menguraikan isu strategis organisasi yang dapat menghambat pencapaian kinerja (misal: Struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang belum ideal) atau masalah besar apa yang sedang ditangani (misal: penguatan hukum/HAM).
F. Sistematika Laporan
   Sub Bab ini menyajikan urutan dalam penyusunan laporan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis
   Sub Bab ini menguraikan rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja, Sub Bab ini meliputi:
   1) Ringkasan Renstra dan Renja yang relevan;
   2) Sasaran strategis dan sasaran kinerja;
   3) Indikator kinerja utama (IKU) dan target kinerja.

B. Perjanjian Kinerja
   Sub Bab ini menyajikan perjanjian kinerja (PK) yaitu lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada Pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indicator kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada Sub Bab ini menguraikan capaian kinerja Kementerian Koordinator, setiap indikator kinerja yang tercantum pada perjanjian kinerja disertai dengan penjelasan dan analisis capaian kinerja yang telah dihasilkan dengan formulasi penghitungan capaian kinerja. Berikut matrik capaian kinerja:

Matrik Capaian Kinerja (Kementerian/Unit Eselon I/II/III/IV)

No	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target (PK)	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Kategori/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.							

Keterangan:
(1) Nomor urut
(2) Diisi sesuai dengan :
   a. Sasaran Strategis untuk Kementerian/capaian Menko;
   b. Sasaran Program untuk Deputi/capaian Deputi/Sekretaris Kemenko dan Staf Ahli (Sasaran Kegiatan Staf Ahli);
   c. Sasaran Kegiatan untuk Asisten Deputi dan Kepala Biro;
   d. Sasaran untuk Eselon III/IV

(3) Indikator Kinerja sesuai dalam PK;
(4) Target sesuai dalam PK;
(5) Satuan sesuai dalam PK;
(6) Diisi dengan **angka atau data aktual yang benar-benar tercapai di lapangan** pada akhir periode pelaporan;
(7) Capaian (%) pada kolam 7 diisi dengan perhitungan menggunakan rumus berikut:

a. Rumus A
Apabila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin baik pencapaian kinerja atau sebaliknya makin rendah realisasi menunjukan pencapaian kinerja semakin rendah;

$$Persentase\ Pencapaian\ Target = \frac{Realisasi}{Rencana} x\ 100\%$$

b. Rumus B:
Apabila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian kinerja atau sebaliknya makin rendah realisasi menunjukan pencapaian kinerja semakin baik;

$$Persentase\ Pencapaian\ Target = \frac{Rencana - (Realisasi - Rencana)}{Rencana} x\ 100\%$$

(8) Kategori/Keterangan diisi dengan berhasil/gagal berikut penjelasan faktor penyebabnya

Selanjutnya melakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Capaian Kinerja Anggaran

Sub Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja serta membandingkannya dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya.
Pada sub ini menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
1. Ringkasan realisasi anggaran;
2. Keterkaitan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja;
3. Analisis efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Realisasi anggaran digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja. Penggunaan anggaran diarahkan pada kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi, pelaksanaan anggaran menunjukkan keterkaitan yang memadai dengan capaian kinerja, di mana sebagian besar indikator kinerja utama tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran telah digunakan secara efektif dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi. Berikut penjelasan Pada bagian ini berisi realisasi.

1. Ringkasan realisasi anggaran;
   a) Gambaran Umum Pagu dan Realisasi Anggaran;
      Menerangkan pagu alokasi anggaran tahun 2025 berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) sebesar Rp (Total Anggaran). Pagu Alokasi Anggaran Perubahan Rp (Total Anggaran), Sampai dengan 31 Desember 2025, realisasi anggaran mencapai Rp (Total Anggaran) atau sebesar (Persentase)%.

   b) Tabel Realisasi per Program/Kegiatan Unit Kerja tergambar dalam tabel berikut:

Tabel. Realisasi Anggaran

NO	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

2. Keterkaitan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja;
   Menjelaskan **"Sejauh mana setiap rupiah yang dibelanjakan berkontribusi pada pencapaian target."** Keterkaitan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja adalah inti dari konsep *Value for Money* (Ekonomis, Efisien, dan Efektif) dalam sistem SAKIP. Anggaran dipandang sebagai ***Input*** yang dikelola untuk menghasilkan ***Output***, yang pada akhirnya diharapkan mencapai ***Outcome*** (Sasaran Strategis).

3. Analisis efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
   a) **Analisis Efektivitas:** Dikatakan efektif jika realisasi anggaran mampu menghasilkan output yang sesuai dengan target kinerja yang dijanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK).
   b) **Analisis Efisiensi:** Membandingkan persentase capaian kinerja dengan persentase penyerapan anggaran.

Akuntabilitas keuangan menyajikan perkembangan daya serap anggaran program/kegiatan menurut periode tertentu, seperti bulanan, triwulanan, semester atau periode lainnya dan membandingkan antara pagu anggaran dengan realisasi. Akuntabilitas keuangan digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel. Akuntabilitas Keuangan

NO	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Perkembangan Realisasi (Daya Serap Anggaran)				Realisasi Anggaran
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

C. Capaian Kinerja Lainnya

Capaian kinerja lainnya termasuk Prioritas Nasional adalah capaian kinerja yang berasal dari pelaksanaan kegiatan atau penugasan yang mendukung agenda Prioritas

Nasional namun tidak seluruhnya tercantum dalam indikator kinerja utama atau Perjanjian Kinerja. Capaian ini disajikan secara terukur dan didukung data yang dapat diverifikasi, serta menjelaskan kontribusinya terhadap sasaran strategis organisasi dan Prioritas Nasional sebagai informasi pendukung dalam evaluasi kinerja dan penerapan SAKIP.

Prinsip Penyajian Capaian Kinerja Lainnya adalah sebagai berikut:

a) Relevan dengan tugas dan fungsi unit kerja;
b) Memiliki kontribusi terhadap sasaran strategis organisasi;
c) Didukung data dan bukti pendukung yang sah;
d) Disajikan secara ringkas, jelas, dan objektif;
e) Tidak menggantikan atau mengaburkan capaian IKU.

Contoh Keberhasilan Prioritas Nasional & Arahan Presiden:
Ini mencakup tugas-tugas khusus yang didelegasikan langsung oleh Presiden Kepada Menko Kumham Imipas atau program prioritas nasional yang relevan dengan bidang koordinasi hukum, antara lain:

a) Ketua Komite Nasional TPPU: Capaian dalam mengoordinasikan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) lintas sektor.
b) Penyelarasan Sistem Hukum: Koordinasi harmonisasi regulasi agar selaras dengan standar internasional (seperti OECD) untuk mendukung perlindungan usaha dan investasi.

Tabel. Capaian Kinerja Lainya

NO	Uraian Kegiatan / Penugasan	Bentuk Capaian (Output/Outcome)	Periode Pelaksanaan	Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dukungan kebijakan nasional bersifat ad hoc	Nota dinas dan bahan kebijakan	Sepanjang tahun 2025	Mendukung pencapaian sasaran strategis terkait sinkronisasi kebijakan	Di luar PK
2.	Partisipasi dalam tim lintas sektor nasional	Keikutsertaan aktif dalam tim dan rapat koordinasi	Tahun 2025	Memperkuat peran koordinatif Kemenko	Tugas tambahan

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Sub Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi.

B. Saran

Sub Bab ini menguraikan strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Lampiran - lampiran:

- Rencana Strategis (RENSTRA);
- Perjanjian kinerja;
- Rencana Kerja Tahunan;
- Matrik *Cascading* Kinerja; dan
- Lain-lain yang dianggap perlu.

D. Waktu dan Mekanisme Penyampaian Laporan Kinerja

Seluruh pejabat struktural (Eselon I, Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV) dilingkungan Kementerian Koordinator wajib menyusun laporan kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan perjanjian kinerja (PK) yang telah disepakati sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Pejabat Struktural merupakan Laporan Kinerja atas capaian kinerja pada masing-masing unit kerjanya yang disusun secara berjenjang:
2. Laporan Kinerja Unit Eselon II menjadi bahan penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon I dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Eselon I paling lambat tanggal 15 Januari 2026;
3. Laporan Kinerja Unit Eselon I disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Sekretariat Kementerian Koordinator c.q. Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama paling lambat tanggal 30 Januari 2026;
4. Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025 disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) paling lambat tanggal 28 Februari 2026, dengan tembusan kepada:
   a. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas);
   b. Kementerian Keuangan (Kemenkeu);
   c. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
5. Tabel Jadwal Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Koordintor Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

No	Kegiatan	Bulan Januari/per-Minggu				Bulan Februari/per-Minggu				Ket
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1.	Penyusunan LKj Tingkat Eselon II									Keg Internal
2.	Penyusunan LKj Tingkat Eselon I									Keg Internal
3.	Penyusunan LKj Kementerian Koordinator									Keg. Luar kantor
4.	Reviuw APIP atas LKj Unit Eselon I									Keg. Luar kantor
5.	Reviuw APIP atas LKj Kementerian Koordinator									Keg. Luar kantor
6.	Penyampaian LKj Kementerian Koordinator									Kemenpan & RB, Kemenkeu, BAPPENAS, BPK

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2026
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

R. ANDIKA DWI PRASETYA

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR NOMOR SES-30.PR.03 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI
MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN

NOMOR SES-30.PR.03 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA,
IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN

Menimbang :

a. bahwa sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, perlu disusun Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;

b. bahwa untuk menjamin kualitas, ketepatan waktu, dan kesesuaian penyusunan Laporan Kinerja dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2024 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesianomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR --- TAHUN 2025 TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Tim Penyusun Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Menghimpun dan mengolah data kinerja dari seluruh unit kerja;
2. Menyusun Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Melakukan konsolidasi, verifikasi, dan analisis capaian kinerja;

4. Menyusun narasi evaluatif atas capaian sasaran strategis, indikator kinerja, dan program kegiatan;
5. Menyiapkan bahan reviu internal dan menindaklanjuti hasil evaluasi;
6. Menyampaikan Laporan Kinerja secara tepat waktu kepada pihak yang berwenang.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Laporan Kinerja bertanggung jawab kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2026.

KESEPULUH

Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2026
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

R. ANDIKA DWI PRASETYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR
NOMOR : SES-30.PR.03 TAHUN 2026
TANGGAL : 13 Januari 2026

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN

1. Penanggung jawab
   Nama/Jabatan : R. Andika Dwi Prasetya / Sekretaris Kemenko
   Tugas :
   a. Memberikan arahan dan kebijakan umum penyusunan Laporan Kinerja;
   b. Menyetujui dan menetapkan Laporan Kinerja sebelum disampaikan kepada Menteri Koordinator dan instansi terkait
2. Ketua Tim
   Nama/Jabatan : Slamet Pramoedji / Kepala Biro MKKS
   Tugas :
   a. Menjamin keterpaduan Laporan Kinerja dengan perencanaan strategis dan manajemen kinerja kementerian;
   b. Melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja;
   c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja kepada Penanggung Jawab.
3. Sekretaris
   Nama/Jabatan : Agung Adi Putro / Kepala Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan
   Tugas
   a. Mengkoordinasikan seluruh rangkaian kegiatan penyusunan Laporan Kinerja;
   b. Memastikan kesesuaian substansi Laporan Kinerja dengan ketentuan yang berlaku;
   c. Mengkoordinasikan penyusunan analisis capaian kinerja, permasalahan, dan upaya perbaikan;
   d. Memastikan ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja.
   e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja kepada Ketua Tim.

Anggota Tim Sekretariat
Nama/Jabatan :
a. Robiana Surya Jatmika Analis / Kebijakan Ahli Madya Biro MKKS
b. Eda Elfiaty / Perencana Ahli Madya Sekretariat Deputi HAM
c. Nurman Kahar / Perencana Ahli Madya Sekretariat Deputi HAM

d. Widi Sutresna / Perencana Ahli Muda Biro MKKS
e. Henrik Bernat Samosir / Perencana Ahli Muda Biro MKKS
f. Deny Kurniawan / Analis Anggaran Ahli Muda Biro MKKS
g. Lenny Apriyani / Arsiparis Ahli Muda Sekretariat Deputi Hukum
h. Aman Agung Kurniawan / Arsiparis Muda Inspektorat Kementerian Koordinator
i. Juanda M U Nasution / Arsiparis Muda pada Inspektorat Kementerian Koordinator
j. Muhammad Wardani / Perencana Ahli Pertama Biro MKKS
k. I Gusti Ayu Cynthia Chandra Dewi Analis SDM Aparatur Ahli / Pertama Biro MKKS
l. Risma Nur Majida / Analis Anggaran Ahli Pertama Biro MKKS
m. Muh. Khomsin Nurul Hidayah / Analis Anggaran Ahli Pertama Biro MKKS
n. Dwi Brata Satrio Aji / Analis Perencanaan, Penggunaan dan Penghapusan Barang Milik Negara Biro MKKS
o. Dinda Balqis / Analis Hukum Pertama Biro SDM, Organisasi, dan Hukum
p. M. Agus Mulyadi / Analis Anggaran Ahli Pertama pada Biro Umum dan Keuangan
q. Wisnu Firmansyah / Analis Keimigrasian Ahli Pertama pada Biro HUMAS & TI
r. Fransisca Puspitaning Ari / Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama
s. Alfian Nurul Sya'ban / Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan Deputi Hukum
t. Rias Kumalasari Devi / Pelaksana Sekretariat Deputi Imigrasi dan Pemasyarakatan
u. Retika Najmamulat Asih Pelaksana pada Sekretariat Deputi Imigrasi dan Pemasyarakatan /
v. Ari Wibowo / Pelaksana pada Sekretariat Deputi Imigrasi dan Pemasyarakatan
w. Narwati Salissa / Pelaksana pada Biro SDM, Organisasi dan Hukum

Tugas : a. Menyusun rencana kerja, jadwal, dan pembagian tugas Tim Penyusun;
b. Melaksanakan konsolidasi data dan informasi kinerja dari seluruh unit kerja;
c. Menyiapkan administrasi, dokumentasi, dan bahan pendukung penyusunan Laporan Kinerja;
d. Menyiapkan bahan rapat, notulen, dan laporan kemajuan penyusunan Laporan Kinerja;

e. Menyusun kerangka, sistematika, dan draft awal Laporan Kinerja;
f. Menghimpun, merekapitulasi, dan mengelola data kinerja dari unit kerja;
g. Memastikan kesesuaian substansi Laporan Kinerja dengan Akuntabilitas Kinerja Anggaran
h. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan draft berdasarkan masukan Tim dan hasil reviu;

4. Anggota Tim Unsur Unit Kerja

Nama/Jabatan :
a. Hepiliana Dameria Dongoran/ Perencana Ahli Madya
b. Angga Kurniawan/ Analis SDMA Ahli Madya
c. Gina Maulani / Analis Hukum Ahli Pertama
d. Dorma Elvrianty Sirait / Analis Hukum Ahli Pertama
e. Adrie Aryasa / Analis Kebijakan Ahli Pertama
f. Dinta Fayuma / Pelaksana Kedeputian Hukum
g. Vina Adi Yustina Wati / Pelaksana pada Kedeputian Hukum
h. Deden Firmansyah / Pelaksana pada Kedeputian HAM
i. Yustika Kusumasari / Pelaksana pada Kedeputian HAM
j. Pelaksana pada Kedeputian HAM/ Dewi Kusumawati
k. Pelaksana pada Kedeputian Imigrasi dan Pemasyarakatan/ Deden Yanyan Hermawan
l. Pelaksana pada Kedeputian Imigrasi dan Pemasyarakatan/ Reni Yunita Mulyaningsih
m. Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama pada Kedeputian Imigrasi dan Pemasyarakatan/ Ahmad Taufiq Hidayat
n. Pelaksana pada Kedeputian Imigrasi dan Pemasyarakatan/ Aghnia Yuniarto Putri
o. Pelaksana pada Kedeputian Imigrasi dan Pemasyarakatan/ Riki Triyansyah

Tugas :
a. Menyediakan data dan informasi kinerja unit kerja secara lengkap, akurat, dan tepat waktu;
b. Menyusun narasi capaian kinerja unit kerja sesuai indikator yang ditetapkan;
c. Menyusun Infografis yang di butuhkan dalam Laporan Kinerja
d. Memberikan klarifikasi dan penjelasan atas data kinerja yang disampaikan;
e. Mendukung proses konsolidasi dan verifikasi data kinerja;\
f. Menindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan terkait kinerja unit kerja.

4. Anggota Tim Unsur APIP (Inspektur Kementerian)

Nama/Jabatan :
a. Auditor Madya pada Inspektorat Kementerian Koordinator/

Anton Parasian

b. Auditor Madya pada Inspektorat Kementerian Koordinator/ Maya Nuraini
c. Auditor Muda pada Inspektorat Kementerian Koordinator/ Kurniawan

Tugas : a. Melakukan reviu atas penyusunan Laporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
b. Memberikan masukan terhadap kualitas data, analisis, dan kesesuaian indikator kinerja;
c. Mengidentifikasi risiko, kelemahan, dan area perbaikan dalam penyusunan Laporan Kinerja;
d. Menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Tim Penyusun;
e. Memantau tindak lanjut atas hasil reviu Laporan Kinerja;
f. Melaporkan hasil pelaksanaan reviu atas Laporan Kinerja kepada Ketua Tim.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2026
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

R. ANDIKA DWI PRASETYA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

kumham.imipas

kumham.imipas

kumham_imipas

Kemenko Kumhamimipas

Kemenko Kumham Imipas RI

www.kumham-imipas.go.id

humas@kumham-imipas.go.id

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8,
Kuningan, Jakarta Selatan 12940

LAMPIRAN

PRINTOUT SAKTI:
NERACA

NERACA

TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (130) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

Tgl Data 14/05/26 7:23 AM
Tgl Cetak 19/05/26 10:43 AM

lap_neraca_kl_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	848,216,607	0	848,216,607	0.00
Persediaan	519,968,926	0	519,968,926	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	**1,368,185,533**	**0**	**1,368,185,533**	
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	47,577,329,916	0	47,577,329,916	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(6,196,555,757)	0	(6,196,555,757)	0.00
JUMLAH ASET TETAP	**41,380,774,159**	**0**	**41,380,774,159**	
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	1,011,802,950	0	1,011,802,950	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(50,590,148)	0	(50,590,148)	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	**961,212,802**	**0**	**961,212,802**	
JUMLAH ASET	**43,710,172,494**	**0**	**43,710,172,494**	
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	947,151,900	0	947,151,900	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**947,151,900**	**0**	**947,151,900**	
JUMLAH KEWAJIBAN	**947,151,900**	**0**	**947,151,900**	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	42,763,020,594	0	42,763,020,594	0.00
JUMLAH EKUITAS	**42,763,020,594**	**0**	**42,763,020,594**	
JUMLAH EKUITAS	**42,763,020,594**	**0**	**42,763,020,594**	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**43,710,172,494**	**0**	**43,710,172,494**	

Keterangan :

FINAL

LAMPIRAN

PRINTOUT SAKTI:
NERACA PERCOBAAN KAS

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (130) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

Tgl Data : 14/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 19/05/26 10:44 AM

lap_neraca_percobaan_kas_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	171,915,532,601
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	12,212,279	0
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai	0	1,223,468
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	488,811
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	10,500,000
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	8,662,367
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	7,359,216,700	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	102,405	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	413,819,750	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	95,443,470	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1,176,360,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	669,837,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	135,579,382	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	309,523,080	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	1,089,512,000	0
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	209,550
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	99,970,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	1,035,000
3.0	511512	Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	333,000,780	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	47,095,400	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	64	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	4,709,540	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,883,816	0
3.0	511623	Belanja Tunjangan Struktural PPPK	48,125,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3,186,480	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	5,822,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	2,529,560,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	23,695,153,767	0
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan	0	35,589,200
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	303,352,500	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	3,900,470,347	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	148,230,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	7,200,000,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	3,444,542,999	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	18,432,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	851,368,200	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,357,327,930	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	782,763,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (130) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

Tgl Data : 14/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 19/05/26 10:44 AM
Halaman : 2
lap_neraca_percobaan_kas_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	443,633,500	0
3.0	522141	Belanja Sewa	10,188,850,200	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	2,791,050,000	0
3.0	522172	Belanja Jasa Pelayanan Perbendaharaan	17,500	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	10,315,257,088	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	866,732,618	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20,691,598,542	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	242,443,454
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	401,130,000	0
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	340,000
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	12,850,165,201	0
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting	0	260,000
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	20
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7,043,135,328	0
3.0	524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	3,411,456,211	0
3.1	524211	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	35,152,412
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46,632,007,856	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	579,802,950	0
JUMLAH			**172,251,436,883**	**172,251,436,883**

Keterangan :

FINAL

LAMPIRAN

PRINTOUT SAKTI:
NERACA PERCOBAAN AKRUAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (130) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

Tgl Data : 14/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 19/05/26 10:44 AM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	848,216,607	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	457,699,926	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	62,269,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	47,577,329,916	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	6,196,555,757
0.0	162161	Lisensi	1,011,802,950	0
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	50,590,148
0.0	212113	Belanja modal yang masih harus dibayar	0	947,151,900
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	171,915,532,601
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	12,212,279	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	420,055,150
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai	0	1,223,468
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	488,811
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	10,500,000
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	60,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	7,350,554,333	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	102,405	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	413,819,750	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	95,443,470	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	1,176,360,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	669,837,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	135,579,382	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	309,523,080	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	1,089,302,450	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	98,935,000	0
3.0	511512	Beban Tunjangan Pegawai Non PNS	333,000,780	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	47,095,400	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	64	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	4,709,540	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	1,883,816	0
3.0	511623	Beban Tunjangan Struktural PPPK	48,125,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	3,186,480	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	5,822,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	2,529,560,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	23,659,564,567	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	303,352,500	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	3,198,517,014	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	148,230,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (130) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

Tgl Data : 14/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 19/05/26 10:44 AM
Halaman : 2
lap_neraca_percobaan_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	7,200,000,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	3,444,542,999	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	18,432,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	851,368,200	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	16,163,510	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	782,763,000	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	443,633,500	0
3.0	522141	Beban Sewa	9,873,850,200	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	2,791,050,000	0
3.0	522172	Beban Jasa Pelayanan Perbendaharaan	17,500	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	10,315,257,088	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	425,144,430	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	804,869,344	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	20,449,155,088	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	400,790,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	12,849,905,201	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7,043,135,308	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	3,376,303,799	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5,951,172,807	0
3.0	592116	Beban Amortisasi Lisensi	50,590,148	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	647,320,004	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	214,392,000	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	267,000	0
JUMLAH			**179,542,157,835**	**179,542,157,835**

Keterangan :

FINAL

LAMPIRAN

PRINTOUT SAKTI :
LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA **: (130) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN**

Tgl Data : 14/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 19/05/26 10:43 AM
Halaman : 1
lap_lo_kl_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	12,212,279	0	12,212,279	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	12,212,279	0	12,212,279	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	12,212,279	0	12,212,279	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	38,275,757,017	0	38,275,757,017	
Beban Persediaan	647,320,004	0	647,320,004	
Beban Barang dan Jasa	39,083,825,011	0	39,083,825,011	
Beban Pemeliharaan	1,444,405,774	0	1,444,405,774	
Beban Perjalanan Dinas	44,119,289,396	0	44,119,289,396	
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA **: (130) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN**

Tgl Data : 14/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 19/05/26 10:43 AM

lap_lo_kl_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	6,001,762,955	0	6,001,762,955	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	129,572,360,157	0	129,572,360,157	
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(129,560,147,878)	0	(129,560,147,878)	()
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(207,000)	0	(207,000)	()
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	60,000	0	60,000	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	267,000	0	267,000	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(207,000)	0	(207,000)	()
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(129,560,354,878)	0	(129,560,354,878)	()
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(129,560,354,878)	0	(129,560,354,878)	()

Keterangan :

FINAL

LAMPIRAN

PRINTOUT SAKTI :
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (130) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

Tgl Data : 14/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 19/05/26 10:43 AM
Halaman : 1
lap_lpe_kl_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(129,560,354,878)	0	(129,560,354,878)	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	172,323,375,472	0	172,323,375,472	0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	42,763,020,594	0	42,763,020,594	0
EKUITAS AKHIR	42,763,020,594	0	42,763,020,594	0

Keterangan :

FINAL

LAMPIRAN

PRINTOUT SAKTI :
LRA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN 130

Tgl Data : 14/05/26 7:23 AM
Tgl Cetak : 19/05/26 10:43 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_kl_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Pendapatan Perpajakan	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	**0**	**12,212,279**	**12,212,279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	12,212,279	12,212,279	0	0	0	0	0
III. Pendapatan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	**0**	**12,212,279**	**12,212,279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. Belanja Negara	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belanja Pemerintah Pusat	209,124,409,000	171,915,532,601	(37,208,876,399)	82.21	0	0	0	0
1. Belanja Pegawai	56,582,768,000	38,275,757,017	(18,307,010,983)	67.65	0	0	0	0
2. Belanja Barang	103,284,229,000	86,427,964,778	(16,856,264,222)	83.68	0	0	0	0
3. Belanja Modal	49,257,412,000	47,211,810,806	(2,045,601,194)	95.85	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN 130

Tgl Data : 14/05/26 7:23 AM
Tgl Cetak : 19/05/26 10:43 AM

lap_lra_face_kl_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	**209,124,409,000**	**171,915,532,601**	**(37,208,876,399)**	**82.21**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. PEMBIAYAAN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Keterangan :

FINAL

LAMPIRAN

PRINTOUT SAKTI :
LRA-BELANJA
MENURUT AKUN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 19/05/26 10:47 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 130 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	9,000,000	12,594,258,000	7,359,216,700	8,662,367	7,350,554,333	58.43	5,243,703,667
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	70,000	269,000	102,405	0	102,405	38.07	166,595
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	3,000,000	675,275,000	413,819,750	0	413,819,750	61.28	261,455,250
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	1,800,000	165,383,000	95,443,470	0	95,443,470	57.71	69,939,530
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	17,316,000	2,157,159,000	1,176,360,000	0	1,176,360,000	54.53	980,799,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	34,000,000	1,231,976,000	669,837,000	0	669,837,000	54.37	562,139,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	3,000,000	1,387,981,000	135,579,382	0	135,579,382	9.77	1,252,401,618
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	5,000,000	497,801,000	309,523,080	0	309,523,080	62.18	188,277,920
511129	Belanja Uang Makan PNS	5,000,000	2,678,792,000	1,089,512,000	209,550	1,089,302,450	40.67	1,589,489,550
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	6,000,000	165,934,000	99,970,000	1,035,000	98,935,000	60.25	66,999,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	84,186,000	21,554,828,000	11,349,363,787	9,906,917	11,339,456,870	52.65	10,215,371,130
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS							
511512	Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	0	1,020,000,000	333,000,780	0	333,000,780	32.65	686,999,220
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5115	0	1,020,000,000	333,000,780	0	333,000,780	32.65	686,999,220
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	93,355,000	47,095,400	0	47,095,400	50.45	46,259,600
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	130,000	64	0	64	0.05	129,936
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	6,500,000	4,709,540	0	4,709,540	72.45	1,790,460
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	2,500,000	1,883,816	0	1,883,816	75.35	616,184
511623	Belanja Tunjangan Struktural PPPK	0	56,875,000	48,125,000	0	48,125,000	84.62	8,750,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	3,860,000	3,186,480	0	3,186,480	82.55	673,520
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	16,500,000	5,822,000	0	5,822,000	35.28	10,678,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	0	179,720,000	110,822,300	0	110,822,300	61.66	68,897,700
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	165,600,000	5,603,040,000	2,529,560,000	0	2,529,560,000	45.15	3,073,480,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	165,600,000	5,603,040,000	2,529,560,000	0	2,529,560,000	45.15	3,073,480,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	50,000,000	27,866,180,000	23,695,153,767	35,589,200	23,659,564,567	85.03	4,206,615,433
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0	359,000,000	303,352,500	0	303,352,500	84.5	55,647,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	50,000,000	28,225,180,000	23,998,506,267	35,589,200	23,962,917,067	85.03	4,262,262,933
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	299,786,000	56,582,768,000	38,321,253,134	45,496,117	38,275,757,017	67.73	18,307,010,983
52	BELANJA BARANG							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 19/05/26 10:47 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 130 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	313,660,000	5,462,160,000	3,900,470,347	0	3,900,470,347	71.41	1,561,689,653
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	25,680,000	164,130,000	148,230,000	0	148,230,000	90.31	15,900,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	0	7,200,000,000	7,200,000,000	0	7,200,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	339,340,000	12,826,290,000	11,248,700,347	0	11,248,700,347	87.7	1,577,589,653
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	2,281,779,000	7,359,900,000	3,444,542,999	0	3,444,542,999	46.8	3,915,357,001
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	6,000,000	31,792,000	18,432,000	0	18,432,000	57.98	13,360,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	52,500,000	893,498,000	851,368,200	0	851,368,200	95.28	42,129,800
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	2,340,279,000	8,285,190,000	4,314,343,199	0	4,314,343,199	52.07	3,970,846,801
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	132,463,000	1,419,005,000	1,357,327,930	0	1,357,327,930	95.65	61,677,070
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	132,463,000	1,419,005,000	1,357,327,930	0	1,357,327,930	95.65	61,677,070
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	60,000,000	510,000,000	0	0	0	0	510,000,000
522112	Belanja Langganan Telepon	12,000,000	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000
522113	Belanja Langganan Air	12,000,000	334,160,000	0	0	0	0	334,160,000
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	1,033,248,000	782,763,000	0	782,763,000	75.76	250,485,000
522131	Belanja Jasa Konsultan	81,737,000	443,634,000	443,633,500	0	443,633,500	100	500
522141	Belanja Sewa	172,640,000	10,651,867,000	10,188,850,200	0	10,188,850,200	95.65	463,016,800
522151	Belanja Jasa Profesi	1,218,800,000	4,096,200,000	2,791,050,000	0	2,791,050,000	68.14	1,305,150,000
522172	Belanja Jasa Pelayanan Perbendaharaan	840,000	1,260,000	17,500	0	17,500	1.39	1,242,500
522191	Belanja Jasa Lainnya	158,787,000	10,641,893,000	10,315,257,088	0	10,315,257,088	96.93	326,635,912
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,716,804,000	27,718,262,000	24,521,571,288	0	24,521,571,288	88.47	3,196,690,712
5231	Belanja Pemeliharaan							
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	61,840,000	951,730,000	866,732,618	0	866,732,618	91.07	84,997,382
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	61,840,000	1,151,730,000	866,732,618	0	866,732,618	75.25	284,997,382
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	933,460,000	24,400,924,000	20,691,598,542	242,443,454	20,449,155,088	84.8	3,951,768,912
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	617,970,000	937,264,000	401,130,000	340,000	400,790,000	42.8	536,474,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2,587,585,000	14,870,254,000	12,850,165,201	260,000	12,849,905,201	86.42	2,020,348,799
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	7,822,330,000	7,043,135,328	20	7,043,135,308	90.04	779,194,692
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	4,139,015,000	48,030,772,000	40,986,029,071	243,043,474	40,742,985,597	85.33	7,287,786,403

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 19/05/26 10:47 AM

Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 130 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	3,852,980,000	3,411,456,211	35,152,412	3,376,303,799	88.54	476,676,201
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	0	3,852,980,000	3,411,456,211	35,152,412	3,376,303,799	88.54	476,676,201
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	8,729,741,000	103,284,229,000	86,706,160,664	278,195,886	86,427,964,778	83.95	16,856,264,222
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	48,677,449,000	46,632,007,856	0	46,632,007,856	95.8	2,045,441,144
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	0	48,677,449,000	46,632,007,856	0	46,632,007,856	95.8	2,045,441,144
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	0	579,963,000	579,802,950	0	579,802,950	99.97	160,050
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	0	579,963,000	579,802,950	0	579,802,950	99.97	160,050
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	49,257,412,000	47,211,810,806	0	47,211,810,806	95.85	2,045,601,194
	JUMLAH BELANJA	9,029,527,000	209,124,409,000	172,239,224,604	323,692,003	171,915,532,601	82.36	37,208,876,399

LAMPIRAN

PRINTOUT SAKTI :
LRA-BELANJA
MENURUT
SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 130 **KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN**

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 19/05/26 10:45 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	**RUPIAH MURNI**							
CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan							
7151	Koordinasi Bidang Hukum	2,280,458,000	15,430,643,000	11,981,923,770	1,503,000	11,980,420,770	77.64	3,450,222,230
7152	Koordinasi Bidang Hak Asasi Manusia	2,123,179,000	14,984,439,000	12,040,709,052	20	12,040,709,032	80.35	2,943,729,968
7153	Koordinasi Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan	2,148,587,000	15,005,311,000	11,752,125,394	224,438,004	11,527,687,390	76.82	3,477,623,610
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CL	**6,552,224,000**	**45,420,393,000**	**35,774,758,216**	**225,941,024**	**35,548,817,192**	**78.764**	**9,871,575,808**
WA	Program Dukungan Manajemen							
7150	Dukungan Manajemen Sekretariat Kementerian Koordinator	2,477,303,000	163,704,016,000	136,464,466,388	97,750,979	136,366,715,409	83.3	27,337,300,591
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	**2,477,303,000**	**163,704,016,000**	**136,464,466,388**	**97,750,979**	**136,366,715,409**	**83.36**	**27,337,300,591**
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	**9,029,527,000**	**209,124,409,000**	**172,239,224,604**	**323,692,003**	**171,915,532,601**	**82.362**	**37,208,876,399**
	JUMLAH	**9,029,527,000**	**209,124,409,000**	**172,239,224,604**	**323,692,003**	**171,915,532,601**	**82.36**	**37,208,876,399**



LAMPIRAN

PRINTOUT SAKTI :
LRA-BELANJA
MENURUT
SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 130 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 19/05/26 10:45 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_kl_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	**RUPIAH MURNI**							
51	**BELANJA PEGAWAI**							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	9,000,000	12,594,258,000	7,359,216,700	8,662,367	7,350,554,333	58.43	5,243,703,667
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	70,000	269,000	102,405	0	102,405	38.07	166,595
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	3,000,000	675,275,000	413,819,750	0	413,819,750	61.28	261,455,250
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	1,800,000	165,383,000	95,443,470	0	95,443,470	57.71	69,939,530
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	17,316,000	2,157,159,000	1,176,360,000	0	1,176,360,000	54.53	980,799,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	34,000,000	1,231,976,000	669,837,000	0	669,837,000	54.37	562,139,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	3,000,000	1,387,981,000	135,579,382	0	135,579,382	9.77	1,252,401,618
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	5,000,000	497,801,000	309,523,080	0	309,523,080	62.18	188,277,920
511129	Belanja Uang Makan PNS	5,000,000	2,678,792,000	1,089,512,000	209,550	1,089,302,450	40.67	1,589,489,550
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	6,000,000	165,934,000	99,970,000	1,035,000	98,935,000	60.25	66,999,000
511512	Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	0	1,020,000,000	333,000,780	0	333,000,780	32.65	686,999,220
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	93,355,000	47,095,400	0	47,095,400	50.45	46,259,600
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	130,000	64	0	64	0.05	129,936
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	6,500,000	4,709,540	0	4,709,540	72.45	1,790,460
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	2,500,000	1,883,816	0	1,883,816	75.35	616,184
511623	Belanja Tunjangan Struktural PPPK	0	56,875,000	48,125,000	0	48,125,000	84.62	8,750,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	3,860,000	3,186,480	0	3,186,480	82.55	673,520
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	16,500,000	5,822,000	0	5,822,000	35.28	10,678,000
512211	Belanja Uang Lembur	165,600,000	5,603,040,000	2,529,560,000	0	2,529,560,000	45.15	3,073,480,000
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	50,000,000	27,866,180,000	23,695,153,767	35,589,200	23,659,564,567	85.03	4,206,615,433
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0	359,000,000	303,352,500	0	303,352,500	84.5	55,647,500
	JUMLAH BELANJA PEGAWAI	**299,786,000**	**56,582,768,000**	**38,321,253,134**	**45,496,117**	**38,275,757,017**	**67.73**	**18,307,010,983**
52	**BELANJA BARANG**							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	313,660,000	5,462,160,000	3,900,470,347	0	3,900,470,347	71.41	1,561,689,653
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	25,680,000	164,130,000	148,230,000	0	148,230,000	90.31	15,900,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	0	7,200,000,000	7,200,000,000	0	7,200,000,000	100	0
521211	Belanja Bahan	2,281,779,000	7,359,900,000	3,444,542,999	0	3,444,542,999	46.8	3,915,357,001
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	6,000,000	31,792,000	18,432,000	0	18,432,000	57.98	13,360,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	52,500,000	893,498,000	851,368,200	0	851,368,200	95.28	42,129,800
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	132,463,000	1,419,005,000	1,357,327,930	0	1,357,327,930	95.65	61,677,070
522111	Belanja Langganan Listrik	60,000,000	510,000,000	0	0	0	0	510,000,000
522112	Belanja Langganan Telepon	12,000,000	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000
522113	Belanja Langganan Air	12,000,000	334,160,000	0	0	0	0	334,160,000
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	1,033,248,000	782,763,000	0	782,763,000	75.76	250,485,000
522131	Belanja Jasa Konsultan	81,737,000	443,634,000	443,633,500	0	443,633,500	100	500
522141	Belanja Sewa	172,640,000	10,651,867,000	10,188,850,200	0	10,188,850,200	95.65	463,016,800
522151	Belanja Jasa Profesi	1,218,800,000	4,096,200,000	2,791,050,000	0	2,791,050,000	68.14	1,305,150,000
522172	Belanja Jasa Pelayanan Perbendaharaan	840,000	1,260,000	17,500	0	17,500	1.39	1,242,500

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 130 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 19/05/26 10:45 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_kl_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
522191	Belanja Jasa Lainnya	158,787,000	10,641,893,000	10,315,257,088	0	10,315,257,088	96.93	326,635,912
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	61,840,000	951,730,000	866,732,618	0	866,732,618	91.07	84,997,382
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	933,460,000	24,400,924,000	20,691,598,542	242,443,454	20,449,155,088	84.8	3,951,768,912
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	617,970,000	937,264,000	401,130,000	340,000	400,790,000	42.8	536,474,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2,587,585,000	14,870,254,000	12,850,165,201	260,000	12,849,905,201	86.42	2,020,348,799
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	7,822,330,000	7,043,135,328	20	7,043,135,308	90.04	779,194,692
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	3,852,980,000	3,411,456,211	35,152,412	3,376,303,799	88.54	476,676,201
	JUMLAH BELANJA BARANG	**8,729,741,000**	**103,284,229,000**	**86,706,160,664**	**278,195,886**	**86,427,964,778**	**83.95**	**16,856,264,222**
53	**BELANJA MODAL**							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	48,677,449,000	46,632,007,856	0	46,632,007,856	95.8	2,045,441,144
536111	Belanja Modal Lainnya	0	579,963,000	579,802,950	0	579,802,950	99.97	160,050
	JUMLAH BELANJA MODAL	**0**	**49,257,412,000**	**47,211,810,806**	**0**	**47,211,810,806**	**95.85**	**2,045,601,194**
	JUMLAH RUPIAH MURNI	**9,029,527,000**	**209,124,409,000**	**172,239,224,604**	**323,692,003**	**171,915,532,601**	**82.36**	**37,208,876,399**
	TOTAL	**9,029,527,000**	**209,124,409,000**	**172,239,224,604**	**323,692,003**	**171,915,532,601**	**82.36**	**37,208,876,399**

LAMPIRAN

PRINTOUT SAKTI :
LRA-BELANJA
MENURUT
FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 130 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
03	**KETERTIBAN DAN KEAMANAN**							
90	**KETERTIBAN DAN KEAMANAN LAINNYA**							
CL	**Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan**							
7151	Koordinasi Bidang Hukum	2,280,458,000	15,430,643,000	11,981,923,770	1,503,000	11,980,420,770	77.64	3,450,222,230
7152	Koordinasi Bidang Hak Asasi Manusia	2,123,179,000	14,984,439,000	12,040,709,052	20	12,040,709,032	80.35	2,943,729,968
7153	Koordinasi Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan	2,148,587,000	15,005,311,000	11,752,125,394	224,438,004	11,527,687,390	76.82	3,477,623,610
	JUMLAH PROGRAM Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	**6,552,224,000**	**45,420,393,000**	**35,774,758,216**	**225,941,024**	**35,548,817,192**	**78.76**	**9,871,575,808**
WA	**Program Dukungan Manajemen**							
7150	Dukungan Manajemen Sekretariat Kementerian Koordinator	2,477,303,000	163,704,016,000	136,464,466,388	97,750,979	136,366,715,409	83.3	27,337,300,591
	JUMLAH PROGRAM Program Dukungan Manajemen	**2,477,303,000**	**163,704,016,000**	**136,464,466,388**	**97,750,979**	**136,366,715,409**	**83.36**	**27,337,300,591**
	JUMLAH SUBFUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN LAINNYA	**9,029,527,000**	**209,124,409,000**	**172,239,224,604**	**323,692,003**	**171,915,532,601**	**82.36**	**37,208,876,399**
	JUMLAH FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN	**9,029,527,000**	**209,124,409,000**	**172,239,224,604**	**323,692,003**	**171,915,532,601**	**82.36**	**37,208,876,399**



LAMPIRAN

PRINTOUT SAKTI :
LRA-BELANJA
MENURUT
ORGANISASI/AKUN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / JENIS BELANJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 19/05/26 10:45 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_org_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 130 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI							
51	BELANJA PEGAWAI	299,786,000	56,582,768,000	38,321,253,134	45,496,117	38,275,757,017	67.65	18,307,010,983
52	BELANJA BARANG	8,729,741,000	103,284,229,000	86,706,160,664	278,195,886	86,427,964,778	83.68	16,856,264,222
53	BELANJA MODAL	0	49,257,412,000	47,211,810,806	0	47,211,810,806	95.85	2,045,601,194
	JUMLAH BELANJA (01) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG	9,029,527,000	209,124,409,000	172,239,224,604	323,692,003	171,915,532,601	82.36	37,208,876,399
	JUMLAH BELANJA	9,029,527,000	209,124,409,000	172,239,224,604	323,692,003	171,915,532,601	82.36	37,208,876,399



LAMPIRAN

PRINTOUT SAKTI :
LRA-PENDAPATAN
MENURUT
KELOMPOK PENDAPATAN/AKUN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 130 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

Kode Lap : LRA.P.KL.1
Tanggal : 19/05/26 10:45 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	1,223,468	0	1,223,468	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	1,223,468	0	1,223,468	0
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	488,811	0	488,811	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	488,811	0	488,811	0
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	10,500,000	0	10,500,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	10,500,000	0	10,500,000	0
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	12,212,279	0	12,212,279	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	12,212,279	0	12,212,279	

LAMPIRAN

PRINTOUT SAKTI :
LRA-PENDAPATAN
MENURUT
ORGANISASI/AKUN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 130 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

Kode Lap : LRA.P.KL.3
Tanggal : 19/05/26 10:46 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN					
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	1,223,468	0	1,223,468	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	488,811	0	488,811	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	10,500,000	0	10,500,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN 01 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG	0	12,212,279	0	12,212,279	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	12,212,279	0	12,212,279	



LAMPIRAN

PRINTOUT SAKTI :
LAPORAN BARANG PERSEDIAAN

LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

UAPB : 130 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN

Kode	Uraian	Jumlah
117111	**Barang Konsumsi**	
1010301001	Alat Tulis	8,587,500
1010301003	Penjepit Kertas	1,360,625
1010301004	Penghapus/Korektor	470,000
1010301005	Buku Tulis	80,000
1010301006	Ordner Dan Map	28,745,420
1010301007	Penggaris	155,500
1010301010	Alat Perekat	2,023,000
1010301012	Staples	60,000
1010301013	Isi Staples	110,000
1010301014	Barang Cetakan	8,500,000
1010301015	Seminar Kit	161,700,000
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	8,438,000
1010302001	Kertas HVS	1,172,000
1010302002	Berbagai Kertas	17,530,000
1010302004	Amplop	1,613,000
1010303999	Bahan Cetak Lainnya	14,953,900
1010304004	Tinta/Toner Printer	40,300,000
1010304006	USB/Flash Disk	5,400,000
1010304009	Harddisk Internal	29,700,000
1010304010	Mouse	6,480,000
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	8,185,000
1010306010	Batu Baterai	1,585,000
1010309001	Meterai	410,000
1010314001	Obat Cair (Barang Konsumsi)	9,269,045
1010314002	Obat Padat (Barang Konsumsi)	88,312,008
1010314004	Obat Serbuk/Tepung (Barang Konsumsi)	2,223,608
1010314005	Obat Gel/ Salep (Barang Konsumsi)	10,336,320
Jumlah Barang Konsumsi		**457,699,926**
117113	**Bahan untuk Pemeliharaan**	
1010305008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	2,748,000
1010305012	Pengharum Ruangan	37,600,000
1010305999	Perabot Kantor Lainnya	21,921,000
Jumlah Bahan untuk Pemeliharaan		**62,269,000**
TOTAL		**519,968,926**

Keterangan :

1. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.

LAMPIRAN

PRINTOUT SAKTI :
LAPORAN PERSEDIAAN
POSISI DI NERACA

LAPORAN POSISI PERSEDIAAN DI NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 130 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN

Kode	Uraian	NILAI
117111	Barang Konsumsi	457,699,926
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	62,269,000
JUMLAH		**519,968,926**

LAMPIRAN

PRINTOUT SAKTI :
LAPORAN MUTASI
BARANG PERSEDIAAN

LAPORAN MUTASI BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 14/05/26 6:36 AM
Tanggal : 19/05/26 11:31 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_mutasi_kl_poc

UAPB : 130 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN

Kode	Uraian	SALDO AWAL	MUTASI		NILAI
			MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	
117111	Barang Konsumsi	0	1,253,348,911	795,648,985	457,699,926
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	280,156,000	217,887,000	62,269,000
JUMLAH		**0**	**1,533,504,911**	**1,013,535,985**	**519,968,926**

LAMPIRAN

PRINTOUT SAKTI :
LAPORAN POSISI BMN
DI NERACA
(SALDO AWAL)

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA - TINGKAT KL
POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)
TAHUN ANGGARAN 2025

UAPB : 130 **KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN**

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2

LAMPIRAN

PRINTOUT SAKTI :
LAPORAN POSISI BMN
DI NERACA

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2025

Tgl.Data : 14/05/26 6:36 AM
Tanggal : 19/05/26 11:30 AM

Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_kl_poc

UAPB : 130 **KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN**

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	457,699,926
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	62,269,000
132111	Peralatan dan Mesin	47,577,329,916
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6,196,555,757)
162161	Lisensi	1,011,802,950
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(50,590,148)
J U M L A H		**42,861,955,887**



LAMPIRAN

PRINTOUT SAKTI :
LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMTABEL
DAN EKSTRAKOMTABEL

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 14/05/26 6:36 AM
Tanggal : 19/05/26 10:49 AM

Kode Lap : lap_bmn_gab_kl

UAPB : 130 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132111	**Peralatan dan Mesin**	**0**	**0**	**3,318**	**61,089,029,526**	**199**	**13,495,536,100**	**3,119**	**47,593,493,426**
30201030	Pick Up	0	0	1	255,879,500	0	0	1	255,879,500
30201039	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Lainnya	0	0	1	291,690,500	0	0	1	291,690,500
30201040	Sepeda Motor	0	0	10	378,097,999	0	0	10	378,097,999
30202010	Meja Dorong Saji/Trolley Saji	0	0	6	16,650,000	0	0	6	16,650,000
30501040	Lemari Besi/Metal	0	0	11	99,900,000	0	0	11	99,900,000
30501040	Lemari Kayu	0	0	14	273,986,905	0	0	14	273,986,905
30501040	Rak Besi	0	0	1	4,995,000	0	0	1	4,995,000
30501040	Rak Kayu	0	0	1	16,459,575	0	0	1	16,459,575
30501040	Filing Cabinet Besi	0	0	1	137,928,600	1	137,928,600	0	0
30501040	Filing Cabinet Kayu	0	0	2	27,875,150	0	0	2	27,875,150
30501040	Brandkas	0	0	3	33,411,000	0	0	3	33,411,000
30501040	Locker	0	0	45	164,096,250	0	0	45	164,096,250
30501050	Rambu-Rambu	0	0	40	49,284,000	0	0	40	49,284,000
30501050	CCTV - Camera Control Television System	0	0	44	371,878,750	1	189,171,750	43	182,707,000
30501050	Papan Visual/Papan Nama	0	0	6	87,395,073	0	0	6	87,395,073
30501050	Alat Penghancur Kertas	0	0	42	264,501,900	0	0	42	264,501,900
30501050	Mesin Absensi	0	0	4	57,622,000	0	0	4	57,622,000
30501050	Hand Metal Detector	0	0	8	14,240,000	0	0	8	14,240,000
30501050	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	0	0	5	40,468,000	0	0	5	40,468,000
30501050	Interactive kios	0	0	11	1,023,475,500	0	0	11	1,023,475,500
30502010	Meja Kerja Kayu	0	0	157	4,104,170,000	24	728,322,300	133	3,375,847,700
30502010	Kursi Besi/Metal	0	0	732	1,942,332,962	0	6,947,500	732	1,935,385,462
30502010	Kursi Kayu	0	0	54	372,236,200	0	0	54	372,236,200
30502010	Sice	0	0	12	65,268,000	0	0	12	65,268,000
30502010	Meja Rapat	0	0	56	1,317,846,538	28	897,546,000	28	420,300,538
30502010	Meja Resepsionis	0	0	3	63,795,600	0	0	3	63,795,600
30502010	Meja Marmer	0	0	2	30,187,575	0	0	2	30,187,575
30502010	Kasur/Spring Bed	0	0	33	498,156,900	0	0	33	498,156,900
30502010	Pot Bunga	0	0	3	4,500,000	0	337,500	3	4,162,500
30502010	Nakas	0	0	258	585,400,000	0	0	258	585,400,000
30502010	Workstation	0	0	58	3,604,947,000	58	3,604,947,000	0	0
30502010	Sofa	0	0	37	787,535,200	0	20,852,500	37	766,682,700
30502010	Meja Ruang Tamu	0	0	18	171,839,100	0	0	18	171,839,100
30502010	Meja Lipat	0	0	99	351,426,000	0	0	99	351,426,000
30502020	Jam Elektronik	0	0	1	1,500,000	0	112,500	1	1,387,500
30502030	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	0	0	3	11,433,000	0	0	3	11,433,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 14/05/26 6:36 AM
Tanggal : 19/05/26 10:49 AM

Kode Lap : lap_bmn_gab_kl

UAPB : 130 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30502030	Mesin Cuci	0	0	1	18,496,929	0	0	1	18,496,929
30502030	Air Cleaner	0	0	36	260,716,800	0	0	36	260,716,800
30502040	Lemari Es	0	0	3	74,481,000	0	0	3	74,481,000
30502040	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	0	0	5	160,594,800	0	0	5	160,594,800
30502040	Kipas Angin	0	0	4	26,320,000	0	0	4	26,320,000
30502040	Exhause Fan	0	0	10	14,430,000	0	0	10	14,430,000
30502050	Kitchen Set	0	0	1	15,749,575	0	0	1	15,749,575
30502050	Meja Dapur	0	0	7	93,243,321	0	0	7	93,243,321
30502050	Stir Fry Cooker (Mesin Penggoreng)	0	0	1	31,379,700	0	0	1	31,379,700
30502060	Televisi	0	0	58	841,685,515	0	19,691,332	58	821,994,183
30502060	Loudspeaker	0	0	27	842,248,500	0	0	27	842,248,500
30502060	Sound System	0	0	4	446,220,000	1	401,265,000	3	44,955,000
30502060	Mic Conference	0	0	130	1,358,488,400	0	0	130	1,358,488,400
30502060	Stabilisator	0	0	1	2,640,000	0	0	1	2,640,000
30502060	Camera Video	0	0	2	81,408,000	0	0	2	81,408,000
30502060	Alat Hiasan	0	0	11	20,540,550	0	0	11	20,540,550
30502060	Lambang Garuda Pancasila	0	0	18	59,860,080	0	0	18	59,860,080
30502060	Gambar Presiden/Wakil Presiden	0	0	22	26,398,920	0	0	22	26,398,920
30502060	Tiang Bendera	0	0	36	104,600,000	0	0	36	104,600,000
30502060	Pataka	0	0	41	89,435,950	0	0	41	89,435,950
30502060	Kaca Hias	0	0	4	9,657,000	0	0	4	9,657,000
30502060	Dispenser	0	0	9	40,459,500	0	0	9	40,459,500
30502060	Mimbar/Podium	0	0	2	67,821,000	0	0	2	67,821,000
30502060	Lambang Instansi	0	0	2	30,000,000	2	30,000,000	0	0
30502060	Coffee Maker	0	0	11	110,740,000	0	0	11	110,740,000
30502060	Karpet	0	0	15	461,588,540	1	121,833,600	14	339,754,940
30502060	Mesin Pengering Tangan	0	0	3	6,127,200	0	0	3	6,127,200
30502060	Lampu Belajar	0	0	4	12,432,000	0	0	4	12,432,000
30502060	Kabel	0	0	1	222,000,000	1	222,000,000	0	0
30502060	Lampu	0	0	11	168,819,900	0	0	11	168,819,900
30502060	Bracket Standing Peralatan	0	0	28	59,718,000	0	0	28	59,718,000
30502060	Lampu Dinding	0	0	15	46,620,000	0	0	15	46,620,000
30502060	Lampu Emergency	0	0	13	23,088,000	0	0	13	23,088,000
30502069	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0	0	23	893,550,000	0	0	23	893,550,000
30502070	Humidifier	0	0	11	12,210,000	11	12,210,000	0	0
30502999	Alat Rumah Tangga Lainnya	0	0	89	766,133,100	0	0	89	766,133,100
30601010	Audio Mixing Console	0	0	1	25,500,000	0	20,283,000	1	5,217,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 14/05/26 6:36 AM
Tanggal : 19/05/26 10:49 AM

Kode Lap : lap_bmn_gab_kl

UAPB : 130 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30601010	Microphone/Wireless MIC	0	0	8	139,407,400	0	0	8	139,407,400
30601010	Power Supply Microphone	0	0	9	495,900,000	0	0	9	495,900,000
30601010	Audio Command Desk	0	0	1	974,913,000	1	974,913,000	0	0
30601010	Uninterruptible Power Supply (UPS)	0	0	2	81,000,000	0	28,281,500	2	52,718,500
30601010	Power Amplifier	0	0	1	39,703,590	0	0	1	39,703,590
30601010	Chairman/Audio Conference	0	0	25	2,785,767,000	9	2,617,403,000	16	168,364,000
30601010	Microphone Cable	0	0	4	28,800,000	0	7,488,000	4	21,312,000
30601010	Voice Recorder	0	0	6	20,377,000	0	0	6	20,377,000
30601010	Mixer Sound Sistem	0	0	22	444,306,915	1	197,392,410	21	246,914,505
30601020	Camera Electronic	0	0	2	58,552,500	0	0	2	58,552,500
30601020	Video Mixer	0	0	1	45,000,000	0	33,307,260	1	11,692,740
30601020	Video Switcher	0	0	1	45,513,000	0	32,926,932	1	12,586,068
30601020	Teleprompter	0	0	2	48,497,002	0	0	2	48,497,002
30601020	Tripod Camera	0	0	30	65,931,989	0	0	30	65,931,989
30601020	Lighting Stand Tripod	0	0	4	41,032,003	0	21,573,100	4	19,458,903
30601020	Camera Film	0	0	5	5,466,750	5	5,466,750	0	0
30601020	Lensa Kamera	0	0	7	251,980,000	0	20,920,000	7	231,060,000
30601020	Camera Adaptor	0	0	3	9,102,000	0	0	3	9,102,000
30601021	Head Set	0	0	4	18,000,000	0	6,575,436	4	11,424,564
30601021	Camera Digital	0	0	8	332,860,750	0	82,236,150	8	250,624,600
30601021	Tas Kamera	0	0	2	5,994,000	0	0	2	5,994,000
30601021	Video Conference	0	0	5	1,142,190,000	0	0	5	1,142,190,000
30601021	Camera Conference	0	0	37	715,327,500	0	0	37	715,327,500
30601021	Drone	0	0	4	141,822,500	0	0	4	141,822,500
30601021	Video Wall	0	0	13	942,168,000	0	0	13	942,168,000
30601021	Gimbal Tripod	0	0	1	9,823,500	0	0	1	9,823,500
30601021	Videotron	0	0	2	286,380,000	0	0	2	286,380,000
30601029	Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya	0	0	4	4,800,000	4	4,800,000	0	0
30602010	Handy Talky (HT)	0	0	20	41,486,250	0	0	20	41,486,250
30701010	Sterilisator	0	0	2	13,852,800	0	0	2	13,852,800
30701010	Tensimeter	0	0	2	3,996,000	0	0	2	3,996,000
30701010	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	0	0	5	2,042,400	1	1,021,200	4	1,021,200
30701010	Blood Exchange Set (Alat Kedokteran Umum)	0	0	1	15,815,000	1	15,815,000	0	0
30701011	Standar Infus	0	0	4	3,996,000	1	1,998,000	3	1,998,000
30701011	Syringe Pump (Alat Kedokteran Umum)	0	0	1	32,800,500	0	0	1	32,800,500
30701011	Senter (Alat Kedokteran Umum)	0	0	11	2,442,000	1	1,221,000	10	1,221,000
30701011	Electronic Stethoscope	0	0	3	12,121,200	0	0	3	12,121,200

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 130 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30701011	Thermometer Gun	0	0	4	2,042,400	1	1,021,200	3	1,021,200
30701011	Vein Finder	0	0	1	49,783,500	0	0	1	49,783,500
30701041	Micro Surgery Set	0	0	1	4,662,000	0	0	1	4,662,000
30701050	Oxygen Regulator	0	0	3	4,828,500	0	0	3	4,828,500
30701050	Lampu Gynaecologi	0	0	1	1,687,200	0	0	1	1,687,200
30701080	Nebulizer	0	0	5	7,992,000	1	3,996,000	4	3,996,000
30701080	Ultra Sono Graphy (USG) Internal Medicine	0	0	1	56,610,000	0	0	1	56,610,000
30701080	Glucometer Complete With Glucostic	0	0	6	3,465,000	0	0	6	3,465,000
30701081	Walker Polding	0	0	3	2,974,800	1	1,487,400	2	1,487,400
30701100	Meja Periksa 200X90X100 cc	0	0	1	2,331,000	0	0	1	2,331,000
30701110	Bed Pasien	0	0	1	23,310,000	0	0	1	23,310,000
30701140	EKG Elektro Photo Cardiograph For Recording Elektro And	0	0	2	55,389,000	0	0	2	55,389,000
30701210	Wheel Chair (Alat Kedokteran Gawat Darurat)	0	0	4	31,546,200	0	0	4	31,546,200
30701260	Pulse Oxymeter	0	0	4	2,077,920	1	1,038,960	3	1,038,960
30806020	Air Purlier	0	0	36	260,716,800	36	260,716,800	0	0
30904020	Kamera Digital	0	0	1	44,566,500	1	44,566,500	0	0
30904070	Lemari Camera	0	0	1	9,657,000	1	9,657,000	0	0
31001020	P.C Unit	0	0	4	148,207,200	0	0	4	148,207,200
31001020	Lap Top	0	0	320	10,204,954,700	0	27,800,900	320	10,177,153,800
31001029	Personal Komputer Lainnya	0	0	70	2,258,612,300	0	39,189,500	70	2,219,422,800
31002010	Storage Modul Disk (Peralatan Mainframe)	0	0	1	6,058,935,000	0	0	1	6,058,935,000
31002030	Monitor	0	0	3	1,091,715,000	0	20,600,520	3	1,071,114,480
31002030	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0	0	97	506,332,500	0	0	97	506,332,500
31002030	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	0	0	29	341,835,900	0	0	29	341,835,900
31002030	External/ Portable Hardisk	0	0	5	55,527,750	0	0	5	55,527,750
31002040	Server	0	0	2	5,247,400,000	1	2,548,800,000	1	2,698,600,000
31002040	Router	0	0	2	100,914,750	0	0	2	100,914,750
31002040	Rak Server	0	0	2	85,200,000	1	55,000,000	1	30,200,000
31002040	Firewall	0	0	1	53,900,000	0	0	1	53,900,000
31503020	Tenda	0	0	3	14,874,000	3	14,874,000	0	0
TOTAL			**0**		**61,089,029,526**		**13,495,536,100**		**47,593,493,426**



LAMPIRAN

PRINTOUT SAKTI :
LAPORAN CRBMN
GABUNGAN INTRA DAN EKSTRA
RINCIAN PER BIDANG BARANG

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

Tanggal : 19/05/2026 11.32.37
Halaman : 1 dari 3
Kode Lap : lap_crbmn_kl_poc

NAMA KL : 130 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

132111 Peralatan dan Mesin

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
302	ALAT ANGKUTAN		18	942,317,999	18	942,317,999	0	0
101	Pembelian	-	18	942,317,999	18	942,317,999	0	0
305	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA		2,295	17,686,828,476	2,295	17,686,828,476	0	0
101	Pembelian	-	1,237	15,671,762,843	1,237	15,671,762,843	0	0
107	Reklasifikasi Masuk	-	40	285,247,800	40	285,247,800	0	0
112	Perolehan Lainnya	-	1,146	8,119,805,600	1,146	8,119,805,600	0	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	-	0	3,177,815	0	3,177,815	0	0
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-	0	(56,817,132)	0	(56,817,132)	0	0
305	Koreksi Pencatatan	-	(128)	(6,336,348,450)	(128)	(6,336,348,450)	0	0
306	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR		214	5,194,036,111	214	5,194,036,111	0	0
101	Pembelian	-	166	7,769,815,704	166	7,769,815,704	0	0
107	Reklasifikasi Masuk	-	1	44,566,500	1	44,566,500	0	0
112	Perolehan Lainnya	-	67	1,427,753,695	67	1,427,753,695	0	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	-	0	5,466,750	0	5,466,750	0	0
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-	0	(253,592,178)	0	(253,592,178)	0	0
305	Koreksi Pencatatan	-	(20)	(3,799,974,360)	(20)	(3,799,974,360)	0	0
307	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN		58	308,166,660	23	292,917,900	35	15,248,760
101	Pembelian	-	31	320,516,660	31	320,516,660	0	0
112	Perolehan Lainnya	-	35	15,248,760	0	0	35	15,248,760
305	Koreksi Pencatatan	-	(8)	(27,598,760)	(8)	(27,598,760)	0	0
308	ALAT LABORATORIUM		0	0	0	0	0	0
101	Pembelian	-	36	260,716,800	36	260,716,800	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NAMA KL : 130 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

132111 Peralatan dan Mesin

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
304	Reklasifikasi Keluar	-	(36)	(260,716,800)	(36)	(260,716,800)	0	0
309	ALAT PERSENJATAAN		0	0	0	0	0	0
101	Pembelian	-	2	54,223,500	2	54,223,500	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	-	(2)	(54,223,500)	(2)	(54,223,500)	0	0
310	KOMPUTER		534	23,462,144,180	533	23,461,229,430	1	914,750
101	Pembelian	-	497	22,544,932,250	497	22,544,932,250	0	0
102	Transfer Masuk	-	30	665,438,100	30	665,438,100	0	0
112	Perolehan Lainnya	-	9	2,943,164,750	8	2,942,250,000	1	914,750
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-	0	(87,590,920)	0	(87,590,920)	0	0
305	Koreksi Pencatatan	-	(2)	(2,603,800,000)	(2)	(2,603,800,000)	0	0
315	ALAT KESELAMATAN KERJA		0	0	0	0	0	0
101	Pembelian	-	3	14,874,000	3	14,874,000	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	-	(3)	(14,874,000)	(3)	(14,874,000)	0	0
TOTAL				**47,593,493,426**		**47,577,329,916**		**16,163,510**

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NAMA KL : 130 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

162161 Lisensi

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	ASET TAK BERWUJUD		2	1,011,802,950	2	1,011,802,950	0	0
101	Pembelian	-	1	579,802,950	1	579,802,950	0	0
112	Perolehan Lainnya	-	1	432,000,000	1	432,000,000	0	0
TOTAL				**1,011,802,950**		**1,011,802,950**		**0**



LAMPIRAN

PRINTOUT SAKTI :
LAPORAN DAFTAR BMN
MENURUT JENIS TRANSAKSI
GABUNGAN INTRA DAN EKSTRA
RINCIAN PER BIDANG BARANG

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tanggal : 19/05/2026 11.32.47

Kode Lap : lap_crbmn_jnstrn_kl_poc

NAMA KL : 130 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

101 Pembelian

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
132111	Peralatan dan Mesin		1	579,802,950	1	579,802,950	0	0
302	ALAT ANGKUTAN		18	942,317,999	18	942,317,999	0	0
305	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA		1,237	15,671,762,843	1,237	15,671,762,843	0	0
306	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR		166	7,769,815,704	166	7,769,815,704	0	0
307	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN		31	320,516,660	31	320,516,660	0	0
308	ALAT LABORATORIUM		36	260,716,800	36	260,716,800	0	0
309	ALAT PERSENJATAAN		2	54,223,500	2	54,223,500	0	0
310	KOMPUTER		497	22,544,932,250	497	22,544,932,250	0	0
315	ALAT KESELAMATAN KERJA		3	14,874,000	3	14,874,000	0	0
162161	Lisensi		1	579,802,950	1	579,802,950	0	0
801	ASET TAK BERWUJUD		1	579,802,950	1	579,802,950	0	0
TOTAL				**48,158,962,706**		**48,158,962,706**		**0**

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

NAMA KL : 130 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

102 Transfer Masuk

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
132111	Peralatan dan Mesin		30	665,438,100	30	665,438,100	0	0
310	KOMPUTER		30	665,438,100	30	665,438,100	0	0
TOTAL				**665,438,100**		**665,438,100**		**0**

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

NAMA KL : 130 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

107 Reklasifikasi Masuk

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
132111	Peralatan dan Mesin		41	329,814,300	41	329,814,300	0	0
305	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA		40	285,247,800	40	285,247,800	0	0
306	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR		1	44,566,500	1	44,566,500	0	0
TOTAL				**329,814,300**		**329,814,300**		**0**

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

NAMA KL : 130 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

112 Perolehan Lainnya

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
132111	Peralatan dan Mesin		1	432,000,000	1	432,000,000	0	0
305	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA		1,146	8,119,805,600	1,146	8,119,805,600	0	0
306	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR		67	1,427,753,695	67	1,427,753,695	0	0
307	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN		35	15,248,760	0	0	35	15,248,760
310	KOMPUTER		9	2,943,164,750	8	2,942,250,000	1	914,750
162161	Lisensi		1	432,000,000	1	432,000,000	0	0
801	ASET TAK BERWUJUD		1	432,000,000	1	432,000,000	0	0
TOTAL				**12,937,972,805**		**12,921,809,295**		**16,163,510**

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

NAMA KL : 130 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

204 Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
132111	Peralatan dan Mesin		0	8,644,565	0	8,644,565	0	0
305	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA		0	3,177,815	0	3,177,815	0	0
306	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR		0	5,466,750	0	5,466,750	0	0
TOTAL				**8,644,565**		**8,644,565**		**0**

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

NAMA KL : 130 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

264 Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
132111	Peralatan dan Mesin		0	(398,000,230)	0	(398,000,230)	0	0
305	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA		0	(56,817,132)	0	(56,817,132)	0	0
306	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR		0	(253,592,178)	0	(253,592,178)	0	0
310	KOMPUTER		0	(87,590,920)	0	(87,590,920)	0	0
TOTAL				**(398,000,230)**		**(398,000,230)**		**0**

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

NAMA KL : 130 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

304 Reklasifikasi Keluar

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
132111	Peralatan dan Mesin		(41)	(329,814,300)	(41)	(329,814,300)	0	0
308	ALAT LABORATORIUM		(36)	(260,716,800)	(36)	(260,716,800)	0	0
309	ALAT PERSENJATAAN		(2)	(54,223,500)	(2)	(54,223,500)	0	0
315	ALAT KESELAMATAN KERJA		(3)	(14,874,000)	(3)	(14,874,000)	0	0
TOTAL				**(329,814,300)**		**(329,814,300)**		**0**

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

NAMA KL : 130 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

305 Koreksi Pencatatan

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
132111	Peralatan dan Mesin		(158)	(12,767,721,570)	(158)	(12,767,721,570)	0	0
305	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA		(128)	(6,336,348,450)	(128)	(6,336,348,450)	0	0
306	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR		(20)	(3,799,974,360)	(20)	(3,799,974,360)	0	0
307	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN		(8)	(27,598,760)	(8)	(27,598,760)	0	0
310	KOMPUTER		(2)	(2,603,800,000)	(2)	(2,603,800,000)	0	0
TOTAL				**(12,767,721,570)**		**(12,767,721,570)**		**0**

LAMPIRAN

PRINTOUT SAKTI :
LAPORAN PENYUSUTAN
INTRAKOMTABEL

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 130 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

UAKPB : 693734 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

Tgl Data : 14/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 20/05/26 1:51 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
132111	**Peralatan dan Mesin**		**3,083**	**47,577,329,916**	**0**	**(6,196,555,757)**	**(6,196,555,757)**	**41,380,774,159**
3020103002	Pick Up	Unit	1	255,879,500	0	(18,277,107)	(18,277,107)	237,602,393
3020103999	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Lainnya	dummy	1	291,690,500	0	(20,835,036)	(20,835,036)	270,855,464
3020104001	Sepeda Motor	Unit	10	378,097,999	0	(27,007,002)	(27,007,002)	351,090,997
3020201010	Meja Dorong Saji/Trolley Saji	Unit	6	16,650,000	0	(8,325,000)	(8,325,000)	8,325,000
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	11	99,900,000	0	(9,990,000)	(9,990,000)	89,910,000
3050104002	Lemari Kayu	Buah	14	273,986,905	0	(27,398,691)	(27,398,691)	246,588,214
3050104003	Rak Besi	Buah	1	4,995,000	0	(499,500)	(499,500)	4,495,500
3050104004	Rak Kayu	Buah	1	16,459,575	0	(1,645,958)	(1,645,958)	14,813,617
3050104006	Filing Cabinet Kayu	Buah	2	27,875,150	0	(2,787,516)	(2,787,516)	25,087,634
3050104007	Brandkas	Buah	3	33,411,000	0	(6,682,200)	(6,682,200)	26,728,800
3050104015	Locker	Buah	45	164,096,250	0	(16,409,626)	(16,409,626)	147,686,624
3050105005	Rambu-Rambu	Buah	40	49,284,000	0	(4,928,400)	(4,928,400)	44,355,600
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	43	182,707,000	0	(18,270,700)	(18,270,700)	164,436,300
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	6	87,395,073	0	(8,739,507)	(8,739,507)	78,655,566
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	42	264,501,900	0	(26,450,190)	(26,450,190)	238,051,710
3050105017	Mesin Absensi	Buah	4	57,622,000	0	(5,762,200)	(5,762,200)	51,859,800
3050105029	Hand Metal Detector	Buah	8	14,240,000	0	(1,424,000)	(1,424,000)	12,816,000
3050105057	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	Buah	5	40,468,000	0	(4,046,800)	(4,046,800)	36,421,200
3050105099	Interactive kios	Buah	11	1,023,475,500	0	(102,347,550)	(102,347,550)	921,127,950
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	133	3,375,847,700	0	(596,375,650)	(596,375,650)	2,779,472,050
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	732	1,935,385,462	0	(306,269,486)	(306,269,486)	1,629,115,976
3050201004	Kursi Kayu	Buah	54	372,236,200	0	(37,223,620)	(37,223,620)	335,012,580
3050201005	Sice	Buah	12	65,268,000	0	(6,526,800)	(6,526,800)	58,741,200
3050201008	Meja Rapat	Buah	28	420,300,538	0	(64,051,229)	(64,051,229)	356,249,309
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	3	63,795,600	0	(6,379,560)	(6,379,560)	57,416,040
3050201015	Meja Marmer	Buah	2	30,187,575	0	(3,018,758)	(3,018,758)	27,168,817
3050201016	Kasur/Spring Bed	Buah	33	498,156,900	0	(90,268,530)	(90,268,530)	407,888,370
3050201021	Pot Bunga	Buah	3	4,162,500	0	(416,250)	(416,250)	3,746,250
3050201026	Nakas	Buah	258	585,400,000	0	(105,506,000)	(105,506,000)	479,894,000
3050201033	Sofa	set	37	766,682,700	0	(76,668,270)	(76,668,270)	690,014,430
3050201035	Meja Ruang Tamu	Buah	18	171,839,100	0	(17,183,910)	(17,183,910)	154,655,190
3050201039	Meja Lipat	UNIT	99	351,426,000	0	(35,142,600)	(35,142,600)	316,283,400
3050202003	Jam Elektronik	Buah	1	1,387,500	0	(138,750)	(138,750)	1,248,750
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	3	11,433,000	0	(1,143,300)	(1,143,300)	10,289,700
3050203004	Mesin Cuci	Buah	1	18,496,929	0	(1,849,693)	(1,849,693)	16,647,236
3050203005	Air Cleaner	Buah	36	260,716,800	0	(26,071,660)	(26,071,660)	234,645,140

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 130 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

UAKPB : 693734 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

Tgl Data : 14/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 20/05/26 1:51 PM

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3050204001	Lemari Es	Buah	3	74,481,000	0	(7,448,100)	(7,448,100)	67,032,900
3050204005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Buah	5	160,594,800	0	(16,059,480)	(16,059,480)	144,535,320
3050204006	Kipas Angin	Buah	4	26,320,000	0	(2,632,000)	(2,632,000)	23,688,000
3050204007	Exhause Fan	Buah	10	14,430,000	0	(2,886,000)	(2,886,000)	11,544,000
3050205008	Kitchen Set	Buah	1	15,749,575	0	(1,574,958)	(1,574,958)	14,174,617
3050205035	Meja Dapur	UNIT	7	93,243,321	0	(9,324,332)	(9,324,332)	83,918,989
3050205041	Stir Fry Cooker (Mesin Penggoreng)	Buah	1	31,379,700	0	(3,137,970)	(3,137,970)	28,241,730
3050206002	Televisi	Buah	58	821,994,183	0	(82,199,430)	(82,199,430)	739,794,753
3050206007	Loudspeaker	Buah	27	842,248,500	0	(84,224,851)	(84,224,851)	758,023,649
3050206008	Sound System	Buah	3	44,955,000	0	(4,495,500)	(4,495,500)	40,459,500
3050206016	Mic Conference	Buah	130	1,358,488,400	0	(135,848,840)	(135,848,840)	1,222,639,560
3050206019	Stabilisator	Buah	1	2,640,000	0	(264,000)	(264,000)	2,376,000
3050206020	Camera Video	Buah	2	81,408,000	0	(12,085,800)	(12,085,800)	69,322,200
3050206025	Alat Hiasan	Buah	11	20,540,550	0	(2,054,055)	(2,054,055)	18,486,495
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	Buah	18	59,860,080	0	(9,974,016)	(9,974,016)	49,886,064
3050206027	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Buah	22	26,398,920	0	(4,079,784)	(4,079,784)	22,319,136
3050206030	Tiang Bendera	Buah	36	104,600,000	0	(10,460,000)	(10,460,000)	94,140,000
3050206031	Pataka	Buah	41	89,435,950	0	(13,821,490)	(13,821,490)	75,614,460
3050206035	Kaca Hias	Buah	4	9,657,000	0	(965,700)	(965,700)	8,691,300
3050206036	Dispenser	Buah	9	40,459,500	0	(8,091,900)	(8,091,900)	32,367,600
3050206037	Mimbar/Podium	Buah	2	67,821,000	0	(6,782,100)	(6,782,100)	61,038,900
3050206045	Coffee Maker	Buah	11	110,740,000	0	(11,074,000)	(11,074,000)	99,666,000
3050206056	Karpet	Buah	14	339,754,940	0	(33,975,494)	(33,975,494)	305,779,446
3050206065	Mesin Pengering Tangan	Buah	3	6,127,200	0	(1,225,440)	(1,225,440)	4,901,760
3050206069	Lampu Belajar	Buah	4	12,432,000	0	(1,243,200)	(1,243,200)	11,188,800
3050206072	Lampu	Buah	11	168,819,900	0	(16,881,990)	(16,881,990)	151,937,910
3050206080	Bracket Standing Peralatan	Buah	28	59,718,000	0	(5,971,800)	(5,971,800)	53,746,200
3050206084	Lampu Dinding	dummy	15	46,620,000	0	(4,662,000)	(4,662,000)	41,958,000
3050206086	Lampu Emergency	Buah	13	23,088,000	0	(2,308,800)	(2,308,800)	20,779,200
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dummy	23	893,550,000	0	(178,710,000)	(178,710,000)	714,840,000
3050299999	Alat Rumah Tangga Lainnya	dummy	89	766,133,100	0	(77,062,860)	(77,062,860)	689,070,240
3060101001	Audio Mixing Console	Buah	1	5,217,000	0	(521,700)	(521,700)	4,695,300
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	8	139,407,400	0	(13,940,740)	(13,940,740)	125,466,660
3060101040	Power Supply Microphone	Buah	9	495,900,000	0	(49,590,000)	(49,590,000)	446,310,000
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	2	52,718,500	0	(5,271,850)	(5,271,850)	47,446,650
3060101060	Power Amplifier	Buah	1	39,703,590	0	(3,970,359)	(3,970,359)	35,733,231
3060101065	Chairman/Audio Conference	Buah	16	168,364,000	0	(16,836,400)	(16,836,400)	151,527,600

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 130 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

UAKPB : 693734 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

Tgl Data : 14/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 20/05/26 1:51 PM

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3060101079	Microphone Cable	Buah	4	21,312,000	0	(2,131,200)	(2,131,200)	19,180,800
3060101088	Voice Recorder	Buah	6	20,377,000	0	(2,037,700)	(2,037,700)	18,339,300
3060101098	Mixer Sound Sistem	unit	21	246,914,505	0	(24,691,454)	(24,691,454)	222,223,051
3060102003	Camera Electronic	Buah	2	58,552,500	0	(5,855,250)	(5,855,250)	52,697,250
3060102015	Video Mixer	Buah	1	11,692,740	0	(1,169,274)	(1,169,274)	10,523,466
3060102016	Video Switcher	Buah	1	12,586,068	0	(1,258,607)	(1,258,607)	11,327,461
3060102034	Teleprompter	Buah	2	48,497,002	0	(4,849,700)	(4,849,700)	43,647,302
3060102045	Tripod Camera	Buah	30	65,931,989	0	(6,593,199)	(6,593,199)	59,338,790
3060102055	Lighting Stand Tripod	Buah	4	19,458,903	0	(1,945,890)	(1,945,890)	17,513,013
3060102061	Lensa Kamera	Buah	7	231,060,000	0	(43,104,000)	(43,104,000)	187,956,000
3060102072	Camera Adaptor	Buah	3	9,102,000	0	(910,200)	(910,200)	8,191,800
3060102118	Head Set	Buah	4	11,424,564	0	(1,142,456)	(1,142,456)	10,282,108
3060102128	Camera Digital	Buah	8	250,624,600	0	(43,339,800)	(43,339,800)	207,284,800
3060102129	Tas Kamera	Buah	2	5,994,000	0	(599,400)	(599,400)	5,394,600
3060102132	Video Conference	Buah	5	1,142,190,000	0	(114,219,000)	(114,219,000)	1,027,971,000
3060102165	Camera Conference	Buah	37	715,327,500	0	(71,532,750)	(71,532,750)	643,794,750
3060102167	Drone	Buah	4	141,822,500	0	(14,182,250)	(14,182,250)	127,640,250
3060102168	Video Wall	unit	13	942,168,000	0	(94,216,800)	(94,216,800)	847,951,200
3060102170	Gimbal Tripod	Buah	1	9,823,500	0	(982,350)	(982,350)	8,841,150
3060102180	Videotron	Buah	2	286,380,000	0	(28,638,000)	(28,638,000)	257,742,000
3060201006	Handy Talky (HT)	Buah	20	41,486,250	0	(8,297,250)	(8,297,250)	33,189,000
3070101001	Sterilisator	Buah	2	13,852,800	0	(1,385,280)	(1,385,280)	12,467,520
3070101005	Tensimeter	Buah	2	3,996,000	0	(399,600)	(399,600)	3,596,400
3070101144	Syringe Pump (Alat Kedokteran Umum)	Buah	1	32,800,500	0	(3,280,050)	(3,280,050)	29,520,450
3070101170	Electronic Stethoscope	unit	3	12,121,200	0	(1,212,120)	(1,212,120)	10,909,080
3070101177	Vein Finder	Buah	1	49,783,500	0	(4,978,350)	(4,978,350)	44,805,150
3070104129	Micro Surgery Set	Buah	1	4,662,000	0	(466,200)	(466,200)	4,195,800
3070105027	Oxygen Regulator	Buah	3	4,828,500	0	(482,850)	(482,850)	4,345,650
3070105097	Lampu Gynaecologi	Buah	1	1,687,200	0	(168,720)	(168,720)	1,518,480
3070108030	Ultra Sono Graphy (USG) Internal Medicine	Buah	1	56,610,000	0	(5,661,000)	(5,661,000)	50,949,000
3070110049	Meja Periksa 200X90X100 cc	Buah	1	2,331,000	0	(233,100)	(233,100)	2,097,900
3070111062	Bed Pasien	Buah	1	23,310,000	0	(2,331,000)	(2,331,000)	20,979,000
3070114026	EKG Elektro Photo Cardiograph For Recording Elektro And	Buah	2	55,389,000	0	(5,538,900)	(5,538,900)	49,850,100
3070121049	Wheel Chair (Alat Kedokteran Gawat Darurat)	Buah	4	31,546,200	0	(3,154,620)	(3,154,620)	28,391,580
3100102001	P.C Unit	Buah	4	148,207,200	0	(55,577,700)	(55,577,700)	92,629,500
3100102002	Lap Top	Buah	320	10,177,153,800	0	(1,372,127,511)	(1,372,127,511)	8,805,026,289
3100102999	Personal Komputer Lainnya	dummy	70	2,219,422,800	0	(277,427,854)	(277,427,854)	1,941,994,946

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 130 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

UAKPB : 693734 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

Tgl Data : 14/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 20/05/26 1:51 PM

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3100201004	Storage Modul Disk (Peralatan Mainframe)	Buah	1	6,058,935,000	0	(757,366,875)	(757,366,875)	5,301,568,125
3100203002	Monitor	Buah	3	1,071,114,480	0	(133,889,311)	(133,889,311)	937,225,169
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	97	506,332,500	0	(137,015,328)	(137,015,328)	369,317,172
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	29	341,835,900	0	(67,166,400)	(67,166,400)	274,669,500
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	5	55,527,750	0	(6,940,970)	(6,940,970)	48,586,780
3100204001	Server	Buah	1	2,698,600,000	0	(337,325,000)	(337,325,000)	2,361,275,000
3100204002	Router	Buah	1	100,000,000	0	(12,500,000)	(12,500,000)	87,500,000
3100204014	Rak Server	Buah	1	30,200,000	0	(3,775,000)	(3,775,000)	26,425,000
3100204015	Firewall	Buah	1	53,900,000	0	(6,737,500)	(6,737,500)	47,162,500
JUMLAH			**3,083**	**47,577,329,916**	**0**	**(6,196,555,757)**	**(6,196,555,757)**	**41,380,774,159**

LAMPIRAN

PRINTOUT SAKTI :
LAPORAN PENYUSUTAN
EKSTRAKOMTABEL

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - TINGKAT KL
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAKPB : 130 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4-7
132111	**Peralatan dan Mesin**	**36**	**16,163,510**	**0**	**(1,639,220)**	**(1,639,220)**	**14,524,290**
3070101009	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	4	1,021,200	0	(102,120)	(102,120)	919,080
3070101139	Standar Infus	3	1,998,000	0	(199,800)	(199,800)	1,798,200
3070101162	Senter (Alat Kedokteran Umum)	10	1,221,000	0	(122,100)	(122,100)	1,098,900
3070101171	Thermometer Gun	3	1,021,200	0	(102,120)	(102,120)	919,080
3070108024	Nebulizer	4	3,996,000	0	(399,600)	(399,600)	3,596,400
3070108094	Glucometer Complete With Glucostic	6	3,465,000	0	(346,500)	(346,500)	3,118,500
3070108161	Walker Polding	2	1,487,400	0	(148,740)	(148,740)	1,338,660
3070126009	Pulse Oxymeter	3	1,038,960	0	(103,896)	(103,896)	935,064
3100204002	Router	1	914,750	0	(114,344)	(114,344)	800,406
JUMLAH		**36**	**16,163,510**	**0**	**(1,639,220)**	**(1,639,220)**	**14,524,290**



LAMPIRAN

PRINTOUT SAKTI :
LAPORAN PENYUSUTAN
ASET TAK BERWUJUD

LAPORAN AMORTISASI BARANG PEMBANTU PENGGUNA - TINGKAT KL
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 14/05/26 6:36 AM
Tanggal : 19/05/26 11:29 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_amor_kl_poc

UAPB : 130 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI AMORTISASI			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	MUTASI AMORTISASI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4-7
162161	**Lisensi**	**2**	**1,011,802,950**	**0**	**(50,590,148)**	**(50,590,148)**	**961,212,802**
8010101002	Lisensi	2	1,011,802,950	0	(50,590,148)	(50,590,148)	961,212,802
JUMLAH		**2**	**1,011,802,950**	**0**	**(50,590,148)**	**(50,590,148)**	**961,212,802**